

**PEMBERONTAKAN
PKI-MUSSO DI MADIUN**

18 - 30 SEPTEMBER 1948

Oleh:

Rachmat Susatyo

KOPERASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

JUNI 2008

Kata Pengantar

Kemerdekaan Indonesia yang baru berjalan selama tiga tahun, pada tanggal, 18 September 1948, sudah dikacaukan oleh pemberontakan yang di lakukan oleh kelompok Partai Komunis Indonesia (PKI). Kemerdekaan yang seharusnya diisi oleh pembangunan bangsa, justru dikacaukan oleh sekelompok orang yang tidak memahami arti kemerdekaan. Kepentingan pribadi dan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan nasional.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seharusnya setiap warga negara lebih mengedepankan kepentingan bersama; daripada kepentingan pribadi dan golongan. Akibat dari pemberontakan PKI ini, potensi bangsa dan negara seharusnya dapat dicurahkan bagi kemajuan; justru terkuras habis untuk memadamkan aksi pemberontakan tersebut.

Pemberontakan PKI ini terjadi, akibat dari kesalahan “kalkulasi politik” PKI yang merasa dirinya mendapat dukungan luas dari mayoritas bangsa Indonesia yang *nota bene* memang dari kalangan buruh dan tani. Akan tetapi kalkulasi politik mereka tidak didasari oleh pemahaman yang baik tentang falsafah hidup bangsa Indonesia, yang sangat mengutamakan kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera.

Paham komunisme hanya ada dan tumbuh dalam jiwa para aktivis PKI, sedangkan rakyat; khususnya buruh dan tani, tidak paham berpolitik. Mereka mengikuti aktivis PKI hanya karena ikut-ikutan, dan bukan karena pemahaman yang baik mengenai komunisme. Sehingga, ketika terjadi pemberontakan, rakyat yang mayoritas buruh dan tani; tidak serta merta ikut berjuang bersama para pimpinan PKI. Hasilnya, pemberon-

takan PKI hanya didukung oleh segelintir orang yang tidak siap dengan aksi-aksi pemberontakan itu sendiri. Mereka hanya bersenjatakan alakadarnya, persenjataan yang lazim mereka pakai untuk aktivitas pertanian mereka. Hanya dari kalangan tentara dan polisi saja yang bersenjatakan senjata api, senjata yang sesuai untuk menghadapi tentara dan polisi yang pro pemerintah. Akibatnya, pemberontakan PKI di Madiun ini hanya berlangsung singkat saja, yakni dari 18-30 September 1948.

Namun demikian, seharusnya bangsa Indonesia tidak lengah dengan aksi-aksi PKI ini. Akibat kelengahan, akibatnya PKI kembali mengulangi aksi pemberontakan mereka pada tanggal, 30 September 1965. pemberontakan yang lebih terencana dengan baik, tetapi tetap juga mengalami kegagalan karena tidak mendapat dukungan luas dari bangsa Indonesia; khususnya dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polisi.

Harapan penulis, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang berminat kepada masalah politik dan pemerintahan di Indonesia pada periode awal kemerdekaan. Tentu saja buku ini masih banyak kekurangannya, saran, kritik, dan masukan dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaannya.

Bandung, awal Maret 2008

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Berdirinya Partai Komunis Indonesia | 1 |
| 1.2. Situasi Politik Indonesia Sesudah Proklamasi | 7 |
| BAB II SIKAP POLITIK PKI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH | 19 |
| 2.1. Sikap PKI Terhadap Rekontruksi dan rasionalisasi | 19 |
| 2.2. Ofensif PKI di Surakarta | 33 |
| BAB III Pemberontakan PKI MUSSO DI MADIUN | 52 |
| 3.1. PKI Musso Menguasai Madiun | 52 |
| 3.2. Reaksi Pemerintah Terhadap Pemberontakan | 61 |
| 3.3 Reaksi Pemuda Pelajar Terhadap Pemberontakan | 64 |
| BAB IV GERAKAN PENUMPASAN TERHADAP PKI MUSSO | 69 |

| | |
|--|----|
| 4.1 Gerakan Operasi Militer Terhadap PKI | 69 |
| 4.2 Akhir Pemberontakan | 81 |
| 4.3. Berbagai Pendapat Tentang Pemberontakan | 95 |

| | |
|------------------|-----|
| BAB V KESIMPULAN | 104 |
|------------------|-----|

DAFTAR SUMBER

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB I PENDAHULUAN

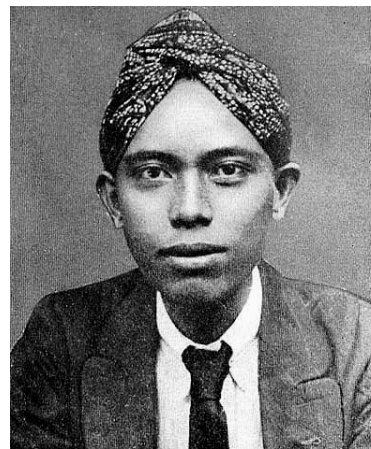
1.1. Berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI)

Komunisme pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1913 dibawa oleh H .J .F .M. Sneevliet seorang bangsa Belanda yang menjabat sebagai sekretaris suatu perkumpulan dagang di kota Semarang. Sejak kedatangannya di Indonesia ia giat mempropagandakan paham-paham sosialis, terutama di kalangan serikat pekerja VSTP (*Vereniging van Spoor en Traweg Personeel*) yang didirikan pada tahun 1908. kemudian pada bulan Mei 1914 dengan teman-temannya bangsa Belanda yang sepaham ia mendirikan ISDV (*De Indische Sociaal Demokratische Vereniging*) yang berusaha menyebarkan paham Marxis. Dalam usaha memperluas pengaruhnya, mereka berusaha mempengaruhi perkumpulan-perkumpulan lain yang telah ada.¹

Salah satu organisasi yang pada waktu itu berpengaruh besar ialah Serikat Islam (SI) yang merupakan organisasi massa rakyat Indonesia. Di dalam SI berkumpul

¹Mr. A. K. Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakjat, Djakarta, 1950, hal. 23-24.

kaum tani, buruh, pedagang, ulama, cendekiawan dan borjuisnasional. Suatu keuntungan bagi ISDV ialah adanya tokoh-tokoh muda dalam SI yang berjiwa militan yang dapat dipengaruhinya, antara lain Semaun dan Darsono.



Semaun

Melalui tokoh-tokoh tersebut, paham Marxis sedikit-demi sedikit dapat memasuki massa Serikat Islam. Semaun dan Darsono merupakan propagandis-propagandis yang utama dari ISDV guna menyebarkan paham komunis dalam tubuh SI. Sementara itu di kalangan ISDV sendiri timbul pertentangan sesama pimpinannya. Pertentangan tersebut terutama berkisar pada masalah taktik dan strategi perjuangan; di satu pihak menghendaki agar ISDV berfungsi sebagai pemberi petunjuk saja kepada organisasi pergerakan nasional dengan cara yang evolusioner. Sedang di lain pihak agar organisasi tersebut memimpin pergerakan dengan perjuangan yang revolusioner, sesuai dengan cara-cara perjuangan kaum Sosialis-Marxis.²

Pertentangan tersebut semakin tajam sesudah Partai Komunis Rusia mendapat kemenangan dalam Revolusi Oktober 1917, sehingga paham komunis mendapat kemajuan di seluruh dunia. Paham ini di tiap-tiap negara ditandai dengan berdirinya Partai Komunis di negara yang bersangkutan.³ Pengaruh revolusi Rusia sampai juga di

²Makmun Salim, *Komunisme dan Kegiatannya di Indonesia*, Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, Bandung, 1972 hal. 16.

³Soepeno, *Kamus Populer*, Cetakan ke enam, Ksatria, Su rabaya, tidak bertahun, hal. 85.

Indonesia. Dimana pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV diubah menjadi PKI (Perserikatan Komunis India)⁴ yang dipimpin oleh Semaun. Setelah terbentuknya PKI, organisasi tersebut segera mengadakan Kongres Istimewa pada tanggal 24 Desember 1920. Dalam kongres tersebut diambil keputusan akan memasukkan PKI dalam Komunis Internasional (Komintern) sebagai satu seksi.⁵

Sesudah kongres tersebut serangan golongan komunis terhadap pemerintah Belanda semakin tajam, bahkan haluan perjuangan SI-pun telah berusaha mereka ubah. Melihat gelagat yang kurang baik ini, maka kongres SI bulan Oktober 1921 di Surabaya diambil keputusan akan dijalankan disiplin partai.⁶ Selanjutnya pada bulan Februari 1923 mengadakan kongres di Madiun; kongres itu mengambil dua keputusan penting ialah:

1. Merubah Central Serikat Islam, diganti Partai Serikat Islam. Jadi istilah "Partai" untuk Serikat Islam baru dimulai bulan Februari 1923.
2. Mempertahankan disiplin partai. Hal ini disebabkan karena pihak Semaun berusaha menghapus disiplin Partai, maka kongres tersebut memutuskan untuk mempertahankan disiplin partai.⁷

Dengan adanya keputusan ini kemudian anggauta-anggauta PKI yang juga menjadi anggauta SI dikeluarkan dari SI. Sebagai reaksi dari keputusan Partai Sarikat Islam kemudian pada bulan Maret 1923 PKI mengadakan kongres di Bandung yang memutuskan bahwa anggauta Serikat Islam Lokal yang berhalua Komunis (SI Merah) dijadikan cabang

⁴Mr. Susanto Tirtoprodjo, *Sedjarah Nasional Indonesia*, PT Pembangunan Djakarta, 1962, hal. 38.

⁵Mr. A. K. Pringgogidgo, *Op. cit.*, hal. 37.

⁶Mr. A. K. Pringgogidgo, *loc. cit.*

⁷Mr. Susanto Tirtoprodjo, *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*, PT Pembangunan Djakarta, 1962, hal. 38.

PKI, tetapi diberi nama tersendiri ialah Serikat Rakyat.⁸

Untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia, PKI mengorganisasikan kaum buruh yang tergabung dalam VSTP di seluruh Jawa guna melancarkan pemogokan dan mengadakan tuntutan perbaikan nasib kaum buruh. Pemogokan itu dilancarkan pada tanggal 8 Mei 1923, tetapi semua tuntutan mereka ditolak oleh Pemerintah Belanda. Untuk mengatasi pemogokan tersebut, Pemerintah Belanda mengadakan penangkapan terhadap para pelaku dan pimpinan PKI. Semaun ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda,⁹ Pimpinan PKI selanjutnya dipegang oleh Darsono.

Sementara itu dalam dalam pucuk pimpinan komunis di Rusia, antara Stalin dan Trotsky timbul perbedaan paham tentang pelaksanaan garis revolusi Komunis; dimana Stalin mempunyai pandangan, bahwa untuk mencapai Revolusi Dunia Komunis sangat diperlukan sarat-sarat. Pertama memperkuat negara Rusia terlebih dahulu supaya dapat memimpin revolusi yang kuat, baru kemudian diadakan revolusi dunia yang dipimpin oleh Rusia. Dalam pertentangan ini Stalin ada di pihak yang menang, sehingga kedudukan Trotsky menjadi terancam.¹⁰

Pertentangan antara Stalin dan Trotsky berpengaruh juga di Indonesia, dimana tokoh-tokoh PKI Alimin dan Muso telah memilih aliran Stalin, sedang Tan Malaka lebih bersimpati terhadap cara perjuangan yang dianut oleh Trotsky. Menurut Tan Malaka, Komintern hanya akan dapat membantu pergerakan di suatu



Alimin

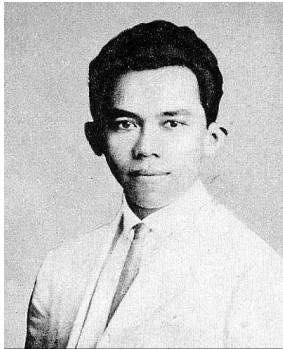
⁸Mr. Susanto Tirtoprodjo, *Loc.cit.*

⁹Makmun Salim, *OP.cit.*, hal .21.

¹⁰Dinas Sedjarah Meliter Angkatan Darat, *Kontra Revolusi Gestapu PKI*, Bandung, 1966.hal.4.

negara jajahan dengan “Semangat Revolusi Komunis”. Jadi bukan dengan perbuatan-perbuatan atau bantuan materi, tetapi sekadar batuan moril.¹¹ Karena itu Tan Malaka dianggap oleh pengikut-pengikut Stalin di Indonesia sebagai Trotsynya Indonesia dan dimusuhi.

Kegiatan pimpinan PKI dalam melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Belanda memuncak dengan timbulnya pemberontakan 1923, yang merupakan pemberontakan massa rakyat yang digerakkan oleh pemimpin-pemimpin komunis seperti Musso dan lain-lain. Tanggal 12-14 November 1926 terjadi di Jakarta dan Jatinegara (waktu itu Jatinegara masih terpisah dengan Jakarta) dan Tangerang, pada tanggal 12 November – 5 Desember di Karesidenan Banten (SIC), 12-18 November di Priangan, 17-23 November di Surakarta, 12-15 Desember di Tanah Kediri, direncanakan juga mengadakan pemberontakan di Banyumas, Pekalongan dan Kedu. Pemberontakan timbul karena waktu itu pimpinan PKI seperti Semaun dan Darsono yang selalu menghalang-halangi timbulnya pemberontakan sedang berada di luar



Tan Malaka

negeri. Dengan timbulnya pemberontakan ini Pemerintah Belanda segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku. Orang-orang Komunis yang tidak melakukan pemberontakan pun ditangkap dan kemudian diasingkan ke Boven Digul,¹² dan melarang segala kegiatan PKI.

Karena adanya larangan tersebut, Tan Malaka kemudian pada tahun 1927 mendirikan organisasi PARI (Partai Republik

¹¹*Ibid.*, hal .6.

¹²Mr. A. K. Pringgodigdo, *Op.cit.*, hal 45.

Indo-nesia) di Bangkok.¹³ Sedangkan PKI sendiri kemudian mengadakan gerakan secara ilegal. Dengan berdirinya PARI Tan Malaka ini pertentangan dasar antara cara-cara perjuangan PKI dan PARI semakin meruncing, bahkan kemudian PKI berusaha menghancu-kan Tan Malaka dengan PARI-nya.

Untuk membangkitkan kembali perjuangan PKI yang telah parah akibat adanya tekanan dari pemerintah Belanda, Musso mendapat tugas khusus dari Moskow untuk membina kembali kader-kader PKI yang harus bergerak sebagai organisasi bayangan di Indonesia. Pada tahun 1935 Musso tiba di Surabaya bersama Djokosujono, Pamudji, dan Achmad Sumadi mendirikan organisasi Partai Komunis Muda (PEM) di JawaTimur. Pihak Komunis meyakinkan sepenuhnya, dengan lahirnya kader-kader Komunis Muda organisasi Komunis Indonesia kelak akan bangun kembali.¹⁴

Menjelang mendaratnya tentara Jepang di Indonesia, pemerintah Kolonial Belanda telah mengambil siasat membebaskan semua interniran Digul dan selanjutnya dibawa ke Australia. Kegiatan pembebasan ini dikoordinir oleh Vander Plas dan Esten. Para Ex Digulis diajak kerjasama oleh Pemerintah Belanda untuk menentang kekuasaan Jepang. Untuk melaksanakan kerja sama tersebut Pemerintah Belanda mendirikan perkumpulan yang diberi nama “Serikat Indonesia Baru”. Kemudian dikenal dengan nama PKI/Sibar.¹⁵

Pada masa Pemerintahan Jepang, sikap Jepang terhadap organisasi PKI yang (waktu itu) dipimpin oleh Sardjono dan terhadap Komunisme Tan Malaka dapat dikatakan berlainan. Terhadap PKI Sardjono sama sekali dilarang mengadakan kegiatannya, sedang terhadap Tan Malaka agak lunak. Untuk melanjutkan perjuangannya, kemudian PKI mengadakan kegiatan secara ilegal sampai diproklamasikannya

¹³Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH., *Sedjarah Revolusi Indonesia*, Masa Revolusi Bersenjata, Cetakan II, Grafika, Jakarta, tidak bertahun, hal. 12.

¹⁴Makmun Salim, *OP. cit.*, hal.25-26.

¹⁵Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH, *Sedjarah Revolusi Indonesia, M asa Revolusi Bersenjata*, Cetakan II, Grafika, Jakarta, tidak bertahun, hal. 36.

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.¹⁶ Tetapi sikap Jepang terhadap Tan Malaka pun kemudian berubah pula, karena kemudian Pemerintah Jepang melarang semua kegiatan kepartaian di Indonesia. Hanya organisasi-organisasi bentukan Jepang saja yang boleh berdiri.

1.2 Situasi Politik di Indonesia sesudah Proklamasi

Sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat dan bertanah air. Di alam kemerdekaan inilah kepartaian di Indonesia hidup kembali secara legal, karena pada masa pendudukan Jepang kepartaian dilarang sehingga pada masa itu partai-partai hanya dapat bergerak secara ilegal.

Untuk menghidupkan kepartaian di Indonesia, kemudian wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan maklumat pada tanggal 3 November 1945 (vid. Lampiran I) yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik di Indonesia. Dengan keluarnya Maklumat 3 November 1945, maka segera berdiri beberapa partai di Yogyakarta dan di lain-lain tempat; antara lain partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) pada tanggal 7 November 1945, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) pada tanggal 10 November 1945. Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah berdiri sejak tanggal 21 Oktober 1945 di bawah pimpinan Mr. Mohammad Jusup (sebenarnya partai tersebut baru diresmikan berdirinya pada tanggal 7 November 1945, tetapi oleh Jusuf tanggal 21 Oktober 1945 diakui sebagai tanggal berdirinya PKI,¹⁷ sedangkan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) baru berdiri pada

¹⁶Makmun Salim, *OP. cit.*, hal.27.

¹⁷George MC Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca London, 1970, hal.156-158.

tanggal 29 Januari 1946 di Kediri dipimpin oleh S. Mangoensarkoro.¹⁸

Dengan adanya bermacam-macam partai tersebut, sebenarnya menunjukkan pula adanya bermacam-macam aliran atau golongan yang ada dan timbul sesudah Proklamasi Kemerdekaan. Sebelum merdeka semua aliran kepartaian dapat bersatu dalam usaha melawan kaum penjajah, tetapi di alam kemerdekaan mulai menampakkan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam melanjutkan Revolusi Indonesia. sehingga pada awal Kemerdekaan Indonesia mulai timbul usaha-usaha untuk menggulingkan Pemerintah Soekarno, karena dianggap kurang revolusioner dan tidak cocok dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. rencana tersebut dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 1945 oleh Soekarno yang datang kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta mengusulkan supaya Soekarno diganti saja oleh Tan Malaka; karena Tan Malaka dianggap lebih cocok dengan revolusi Indonesia waktu itu.¹⁹ Tetapi usaha ini tidak berhasil, karena tidak mendapat tanggapan.

Sementara itu kepartaian di Indonesia mulai tumbuh dengan suburnya. Pada tanggal 8 Desember 1945 Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) berdiri di Surakarta yang diketuai oleh I.J. Kasimo. Kemudian berdiri Barisan Pelopor pada tanggal 14 Desember 1945 yang dipimpin oleh DR. Muwardi, sedangkan Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Sjahrir, Oei Hwat dan Amir Sjafruddin baru didirikan pada tanggal 17 Desember 1945 di Cirebon.²⁰ Sehingga suasana politik di Indonesia mulai meruncing, karena dalam usaha memperkuat partainya telah menimbulkan pertentangan antara partai yang satu dengan partai yang lain yang dapat

¹⁸Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Kepartaian di Indonesia*, Pertjetakan Negara, Jakarta, 1951, hal.110.

¹⁹Kementerian Republik Indonesia, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, 1953, hal. 137.

²⁰Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Daerah dan Peristiwa 17 Agustus 1945-23 Djanuari 1950*, Jogjakarta, 1950, hal.9.

merugikan perjuangan Bangsa Indonesia selanjutnya. Karena itu terasa oleh kalangan pemuda betapa perlunya konsolidasi dan kesatuan tindakan untuk menjaga dan mengamankan proklamasi, karena ancaman dari pasukan Belanda sudah nampak di ambang pintu. Oleh karena itu pada tanggal 19 November 1945 diadakan Kongres Pemuda I, bertempat di Balai Mataram Yogyakarta.²¹

Sampai bulan Februari 1946 suasana kota Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia sudah tidak terjamin lagi keamanannya, karena serdadu-serdadu Belanda sering melakukan aksi-aksi pembersihan terhadap pejuang-pejuang RI. Keadaan semacam ini memaksa pusat pemerintah RI. Keadaan semacam ini memaksa pusat pemerintahan RI dipindahkan ke Yogyakarta. Karena itu pada tanggal 4 Januari 1946 Presiden dan Wakil Presiden pindah ke Yogyakarta, sedang kedudukan Perdana Menteri dan beberapa anggota kabinet tetap di Jakarta. Dengan pindahnya Presiden dan Wakil Presiden, dengan resmi Ibu Kota RI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta.²² Kepindahan dimaksud supaya pemerintahan dapat dijalankan dengan lancar, jauh dari pada pertikaian-pertikaian yang sering timbul. Karena mulai bulan September 1945 Jakarta telah menjadi kota NICA²³ (Netherlands Indische Civiel Administratie). Di kota ini teror dari pihak Belanda memuncak dengan timbulnya usaha pembunuhan terhadap Perdana Menteri Sjahrir.

Pada tanggal 6 Januari 1946 dibentuklah Persatuan Perjuangan di Purwokerto yang dipimpin oleh Tan Malaka, yang merupakan golongan oposisi terhadap pemerintah yang berusaha merubah kabinet Sjahrir.²⁴

Untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda, maka pada hari Minggu tanggal 10 Februari 1946, Sjahrir dan

²¹Kementrian Penerangan Republik Indonesia, *Op.cit*, hal.9.

²²Abito Martono, *Dokumentasi Perjuangan Indonesia 1915-1950*, Toko Buku Islamyah, Cetakan I, Medan, 1950, hal.22.

²³Kementrian Penerangan Republik Indonesia, *Op.cit*, hal.69.

²⁴Kementrian Penerangan Republik Indonesia, *Op.cit*, hal.12.

Van Mook (wakil Belanda) telah membuka perundingan dengan Clark Kerr di Jakarta. Dalam pertemuan itu Van Mook telah menyampaikan keterangan politik Pemerintah Belanda tertanggal 10 Februari 1946 didasarkan atas maklumat Ratu Belanda tanggal 6 Desember 1942. keterangan Pemerintah Belanda ternyata tidak menggembirakan golongan oposisi yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka. Mereka menghendaki agar Pemerintah RI berunding atas dasar kemerdekaan penuh. Golongan oposisi melancarkan serangan sengit dalam Sidang Komite Nasional Indonesia yang diselenggarakan di Surakarta dari tanggal 28 Februari s/d 2 Maret 1946 yang memaksa Kabinet Sjahrir I menyerahkan mandatnya kepada Kepala Negara.²⁵

Tetapi pada tanggal 12 Maret 1946 Sjahrir telah ditunjuk kembali untuk membentuk kabinetnya yang ke dua. Pada masa Kabinet Sjahrir kedua telah diadakan perundingan Hoge Voluwe antara Pemerintah RI dan Pemerintah Belanda yang diadakan pada tanggal 23-24 April 1946. Perundingan mengalami kegagalan, karena itu MR. Suwandi yang memimpin delegasi RI kembali ke Indonesia pada tanggal 25 April 1946, dimana ikut pula Maruto Darusman dan Drs. Setiadjud²⁶ yang kemudian menjadi tokoh-tokoh Komunis Indonesia.

Sejak Sjahrir membentuk Kabinet Kedua (Kabinet Parleментар) politik pemerintah RI dialihkan dari gelanggang pertempuran ke gelanggang diplomasi. Hal ini ditentang pula oleh golongan Tan Malaka dan kelompok Persatuan Perjuangan yang tidak mau kompromi dengan penjajah. Tan Malaka mengadakan agitasi kemana-mana, mengeritik Pemerintah RI waktu itu. Agitasi ini rupanya mendapat sambutan dari kalangan luas termasuk dari kalangan militer, sehingga memperuncing suasana.

²⁵Prof. Dr. Slametmuljana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*, Jilid II, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1969, hal.218-219.

²⁶*Ibid*, hal.220.

Pada tanggal 27 Juni 1946 Sjahrir yang saat itu memegang peranan penting dalam pemerintahan telah diculik.²⁷ Dia diculik bersama beberapa orang lainnya yang terdiri dari pembesar-pembesar Republik, antara lain Mayor Jendral Soedibyo, Dr. Darmasetiawan, Dr. Soemitro Djojohadikusumo dan Tuan Gaos yang kemudian diasingkan ke Paras (Boyolali).²⁸ Karena perbuatan ini dianggap akan melemahkan kedudukan pemerintah, maka presiden Soekarno menyerukan supaya Sutan Sjahrir Cs segera dikembalikan.

Pidato Presiden Soekarno pada tanggal 30 Juni 1946 agar Sjahrir Cs segera dikembalikan telah mendapat sambutan baik dari masyarakat. Suatu pasukan yang dipimpin oleh Iskandar (almarhum) dari markas Pimpinan Pertempuran Jawa Tengah telah berangkat meninggalkan front dan markasnya berhasil menemukan Perdana Menteri Sjahrir, Dr. Darmasetiawan, Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Mayor Jendral Soedibyo di Pasanggrahan Paras Boyolali, kemudian diantar ke Yogya dan tiba pada keesokan harinya tanggal 1 Juli 1946 jam 04.00 pagi.²⁹

Setelah Sutan Sjahrir Cs dikembalikan, tak lama kemudian timbul lagi kerusuhan dengan adanya usaha *coup d'état* yang dilakukan oleh Jendral Mayor Sudarsono pada tanggal 3 Juli 1946; seorang Komandan Divisi III Daerah Istimewa Yogyakarta yang hendak memaksakan kepada

²⁷Sesungguhnya yang dinamai penculikan itu ialah suatu penangkapan resmi yang dijalankan oleh Mayor A.K.Jusuf at as perintah atasannya yang sya h yaitu Jendral Mayor Sudarsono, dengan sebuah surat perintah yang dinamai "Surat Kuning". Surat tersebut oleh A.K. Jusuf diperlihatkan kepada Komandan Divisi Surakarta Kolo nel Sutarto dan diparaf oleh beliau. Selanjutnya pelaksanaan Surat Kuning tersebut dibantu oleh Kepala Polisi Solo, Domopranoto yang kemudian turut terlibat dalam peristiwa 3 Juli. Vid. Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH., *Sedjarah Revolusi Indonesia, Masa Revolusi Bersenjata*, Cetakan II, Grafika, Jakarta, tidak be rtahun, hal. 143-143.

²⁸ A. Panitia Penjusun Buku Peri ngatan 2 Tahun DPRD Sementara Kota Besar Surakarta, *Kenang-kenangan Kota Besar Surakarta 1945-1953*, Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, 1953, hal. 5.

²⁹Dokumen Semdam VII/Diponegoro no. 24 B (10) II, hal.4.

presiden suatu dekrit pengganti kabinet yang telah disusun untuk ditanda-tangani. Usaha ini dapat digagalkan oleh pasukan kawal pribadi yang dipimpin oleh Inspektur Polisi II Mar-djaman dan Pembantu Inspektur Polisi II Winarso. Selanjutnya atas perintah Panglima Besar Sudirman segera dilakukan tindakan tegas terhadap golongan yang mencoba melakukan *coup d'état* tersebut. Selain itu didatangkan pula Polisi Istimewa Jawa Timur dari Kompi II, III dan IV yang baru pulang dari front.³⁰ Dan terhadap jendral Mayor Sudarsono dilakukan pemecatan dari jabatan sebagai Panglima Divisi III. Peristiwa coup ini dikenal dengan nama "Peristiwa 3 Juli" dan sebagai pengganti Mayor Jendral Sudarsono ditunjuk Kolonel Susait Komandan Divisi IV Cirebon dan pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jendral.³¹

Ternyata penculikan Sutan Sjahrir Cs pada tanggal 27 malam 28 Juni adalah permulaan dari aksi Tan Malaka, Mr. Subardjo, Mr. Iwa Kusumasumantri, Sukarni, Mr. Muhammad Yamin dan lain-lain untuk merebut kekuasaan. Sebenarnya komplotan tersebut sudah sejak lama diketahui oleh pemerintah. Oleh karena mereka dianggap membahayakan, maka pemerintah mengadakan penangkapan. Yang dihukum oleh Mahkamah Tentara Agung ialah Mayor Jendral Sudarsono, Mr. Moh Yamin, Mr. Subardjo, Mr Iwa Kusumasumantri, Mr. R. Sudoro Budhyarto, Dr. R. Buntaran Mar-toatmodjo dan Muhammad Saleh, sedang yang dibebaskan pada waktu itu ialah tujuh orang. Selain dari itu dimajukan tiga orang lagi yang ditangkap tanggal 17 Maret 1946, antara lain Tan Malaka, Abikusno Tjokrosujono dan Sukarni kepada Pengadilan Negeri di Surakarta. Mereka juga diruntut perkara peristiwa tiga Juli.³²

³⁰Inspektur Jendral Polisi Memet Tanumihardja SH, *Sejdjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, 1971, hal .34-38.

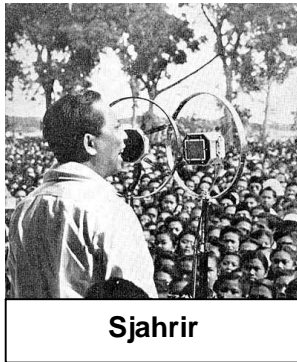
³¹Panitya Sewindu Devisi Diponegoro, *Lintasan Sedjarah Terbentuknya Divisi Diponegoro*, Percetakan DADAT/Diponegoro, Semarang, hal .34-36.

³²Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH, *OP.cit.*, hal 149.

Sementara itu dalam usaha menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda telah disusun Rencana Persetujuan Linggajati, tetapi Masyumi menolak Rencana Persetujuan tersebut dan menyerukan kepada Menteri anggauta Masyumi supaya menolak rencana tersebut sebagaimana tertera pada pasal 5 persetujuan tersebut. Sikap Masyumi itu diumumkan pada tanggal 6 Desember 1946. seruan tersebut antara lain:

“...mengharap kepada anggauta Masyumi di dalam kabinet yang sekarang, supaya ikhlas hati menyesuaikan diri dengan keputusan penolakan partai terhadap Naskah Persetujuan Linggajati”. Sedangkan Dewan Pleno PNI dalam sidangnya tanggal 26 November 1946, telah, mengambil keputusan tidak menyetujui Rencana Naskah Persetujuan Linggajati.³³

Tanggal 25 Maret 1947 Naskah Persetujuan Linggajati ditandatangani di Jakarta. Dalam penandatanganan itu Indonesia diwakili oleh St. Sjahrir dan Mr. Mohammad Roem, sedangkan Belanda diwakili van Mook dan van Pall.³⁴



Dengan disetujuinya perundingan ini, timbul golongan yang pro dan kontra Persetujuan. Pucuk pimpinan Komunis Muda yang mewakili seluruh cabang-cabangnya menyatakan tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh delegasi RI. Juga pengurus besar Partai Kristen Indonesia tidak menyetujuinya, karena naskah itu tidak menyinggung tentang kedaulatan negara RI.³⁵ Pertentangan semakin meruncing karena adanya agitasi dari golongan yang

³³Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Op.cit.*, hal.135-137.

³⁴Panitya Sewindu Devisi Diponegoro, *Op.cit.*, hal.43

³⁵Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Op.cit.*, hal.167.

tidak setuju dengan isi perjanjian tersebut.

Melihat situasi yang memburuk, maka Badang Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI) menyerukan pedoman bagi tiap-tiap pemuda Indonesia dalam menanggapi persetujuan Linggajati. Antara lain diserukan sebagai berikut:

“...berhubung banyaknya berbagai soal yang timbul berkenaan dengan adanya Naskah Persetujuan Linggajati, yang mau tidak mau menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemuda terhadap keamanan masyarakat dan tujuan revolusi kita, maka BKPRI merasa sangat perlu mengadakan seruan dan pedoman bagi tiap-tiap pemuda yang berbunyi sebagai berikut:

1. Jagalah keamanan dan azas demokrasi kita.
2. Jaga dan pegang teguh persatuan kita
3. Pegang teguh pendirian Badan Kongres Pemuda RI.³⁶

Selanjutnya Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia secara tidak memihak telah menyatakan pendapatnya antara lain:

1. Bahwa ditolak atau diterimanya Naskah Rencana Persetujuan Linggajati, adalah siasat Belanda dalam perjuangan bangsa Indonesia.
2. Bahwa ditolah atau diterimanya Naskah tersebut, tidaklah dapat dijadikan alasan perpecahan di kalangan bangsa kita.
3. Bahwa ditolah atau diterimanya Naskah tersebut mungkin nanti ada perasaan kecewa dari sebagian besar Bangsa Indonesia.³⁷

³⁶Abito Martono Hardjono, *Op.cit.*, hal .82.

³⁷Prof. Dr. Slametmuljana, *Op.cit.*, hal .127.

Karena pendirian Badan Kongres Pemuda Indonesia dianggap tidak sesuai, maka dalam Mukhtamar Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yang diselenggarakan pada tanggal 18-21 April 1947 telah diputuskan, bahwa GPII keluar dari BKPRI. Keputusan ini kemudian dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1947 yang menyatakan dengan resmi keluar dari BKPRI dengan disertai perintah ke daerah-daerah, supaya GPII daerah mengundurkan diri dan keluar dari dewan Pertimbangan Pemuda. Kemudian pada tanggal 25 Juni 1947 menyusul Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO) mengumumkan manifestasinya yang pertama; tidak menyetujui *beleid* politik Sjahrir tersebut.³⁸

Akibat adanya agitasi yang hebat dari golongan oposisi, pada tanggal 27 Juni 1947 Kabinet Sjahrir jatuh. Untuk mengisi kekosongan itu, maka pada tanggal 27 Juni 1947 Presiden menunjuk Amir Sjarifuddin, Dr. Sukiman, Drs, Setiadji dan MR.A.K. Gani untuk membentuk Kabinet Koalisi, tetapi tidak berhasil. Sehingga keempat formatur tersebut mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 1 Juli 1947 jam 22.00. Selanjutnya untuk kedua kalinya presiden menyerahkan Mandat pembentukan kabinet pada tanggal 2 Juli 1947 kepada Amir Sjarifuddin, Mr. A. K. Gani dan DRS Setiadji dengan dasar Kabinet Nasional. Sesudah dua kali mendapat mandat, barulah Amir dapat membentuk Kabinet Nasional. Sedangkan Sjahrir sesudah jatuh dari kabinet kemudian diangkat sebagai penasehat Presiden pada tanggal 30 Juni 1947.³⁹

Sejak duduk dalam Kabinet, Amir lebih banyak lagi membangun partainya. Ia mengadakan perubahan-perubahan organisasi perjuangan, kelaskaran, Pimpinan Biro Perjuangan Pusat dan Koordinator di propinsi serta Karesidenan, terutama yang dipegang oleh partai-partai pemerintah. Kepala biro itu merangkap sebagai Ketua Dewan Kelaskaran Pusat

³⁸Abito Martono Hardjono, *Op.cit.*, hal .82.

³⁹Kementrian Penerangan Republik Indonesia, *Op.cit*, hal.225-226.

dan Daerah. Organisasi ini langsung dibawah menteri pertahanan, dimana Amir menjabat sebagai menterinya. Tidak berada dibawah Markas Besar Tentara yang diketuai oleh Panglima Besar Sudirman, tetapi sejajar dengan Markas Besar Tentara (MBT). Begitupula inspektorat-inspektorat dari desa, kecamatan, kabupaten, karesidenan, sampai pusat, terutama dipegang oleh pengikut-pengikut pemerintah (Amir) dengan pimpinan tertinggi dipegang oleh Biro Perjuangan Pusat yang langsung di bawah perintah menteri pertahanan. Oleh karena itu partai-partai oposisi menentang sistem ini dan pernah hal ini mengakibatkan terlontarnya kritik-kritik keras di dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP).⁴⁰ Rupa-rupanya rencana Amir ini adalah dalam rangka menyusun kekuatan untuk menguasai pemerintah selanjutnya.

Berkali-kali dalam BPKNIP dikemukakan oleh pihak Masyumi dan PNI (golongan oposisi) keberatan-keberatan usaha-usaha politik dalam tentara; seperti adanya Pepolit dan sebagainya yang 90% diduduki oleh orang-orang sosialis, sehingga golongan oposisi melihat bahaya Angkatan Bersenjata yang telah dipengaruhi oleh golongan kiri (golongan Amir). Lebih kurang 80% Anggaran Belanja Negara untuk membiayai Tentara Republik Indonesia (TRI). Sehingga timbul kecurigaan kalau-kalau dengan melalui kementrian ini diadakan kegiatan untuk kepentingan kaum sosialis. Pendidikan Pepolit, Marxhouse, Asrama RI dan lain-lain yang diadakan atas inisiatif Amir Cs tetap menjadi kecurigaan bagi lawan-lawan politiknya; bahkan juga dari Markas Besar Tentara sendiri mulai curiga. Amir senantiasa mengatakan, bahwa kita harus mewujudkan sistem pertahanan rakyat total dan sebagai konsekwensinya harus mengatur hubungan antara tentara dan rakyat. Karena lasan tersebut didirikannya Inspektorat Biro Perjuangan dan lain-lain badan yang bersifat

⁴⁰Jendral A. H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia, Jilid II, Seruling Massa*, Jakarta, 1968, hal .41.

politik. Ia mencontoh ucapan Mao Tse Tung; bahwa tentara berada dalam badan rakyat seperti ikan dalam air. Juga ditegaskan oleh Amir bahwa “*Total People Defence*” adalah tak terpisah dari sistem “*Figerting Democracy*” (*sic.*) oleh karena itu usaha kementerian Pertahanan dewasa ini tidak boleh dipandang terlalu berbau politik.⁴¹

Dalam suasana politik yang keruh itu pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi Meliternya yang pertama, yang diakhiri dengan adanya Persetujuan Renville pada tanggal 6 Desember 1947. Dari 10 pasal perundingan, dua diantaranya berisi:

1. Pasukan RI yang mengadakan perjuangan di belakang garis pendudukan Belanda, harus ditarik mundur dan dilakukan sebaik-baiknya dalam waktu 21 hari.
2. Semua tentara yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, harus segera mengosongkan daerah masing-masing dan pindah masuk ke daerahnya sendiri-sendiri dengan membawa semua senjata dan perlengkapan militer, di bawah pengawasan pembantu-pembantu militer Komisi Tiga Negara.⁴²

Karena isi Perjanjian Renville tersebut dianggap oleh Masyumi tidak memuaskan, maka Masyumi menolak usul-usul Belanda dan Putusan Kabinet RI tersebut. Penolakan ini kemudian disusul dengan pengunduran diri menteri-menteri Masyumi dari Pemerintah Pusat. Pernyataan pengunduran diri ini dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai Masyumi pada tanggal 16 Januari 1948, sedang penolakan PNI diputuskan dalam rapat Plenonya tanggal 18 Januari 1948; bahwa Dewan Partai menyetujui Dewan Pimpinan PNI dan para menteri

⁴¹Jendral A. H. Nasution, *Op. cit.*, hal. 18-19.

⁴²Jendral A.H. Nasution, *Op cit.*, hal .3-4.

anggauta PNI yang menolak persetujuan Renville.⁴³ Karena banyaknya golongan yang menentang kabinet Amir, maka pada tanggal 24 Januari 1948 Kabinet Amir jatuh.

⁴³Kementrian Penerangan Republik Indonesia, *Op.cit*, hal.25.

BAB II

SIKAP POLITIK PKI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH

2.1 Sikap PKI terhadap Rekonstruksi dan Rasionalisasi (Re-ra)

Sesudah Kabinet Amir jatuh, maka pada tanggal 26 Januari 1948 Mohammad Hatta ditunjuk untuk menyusun kabinet Presidentil, dimana Hatta selaku Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan juga sebagai Wakil Presiden. Amir tidak ikut dalam kabinet, kemudian jadi golongan oposisi yang susunan kabinet Hatta. Ia mengatakan bahwa Kabinet Hatta adalah Kabinet Masyumi, karena banyak orang Masyuminya dan tidak ada wakil buruh, tani dan pemuda.⁴⁴

Golongan oposisi mengadakan demonstrasi, menuntut kembalinya Amir dalam Kabinet dan sebagai Menteri Pertahanan. Demonstrasi ini membawa pula poster-poster dan slogan-slogan yang isinya membela politik Amir, dan mengecam Kabinet Hatta. Amir mengusulkan agar Kabinet Hatta dibubarkan dan dibentuk Kabinet yang meliputi

⁴⁴Muhammad Dimjati, *Sedjarah Perjuangan Indonesia*, Penerbit Widjaja, Jakarta, 1951, hal.161.

buruh, tani dan pemuda. Golongan oposisi mengadakan “adu domba”, sehingga dalam masyarakat timbul pertentangan yang menumbuhkan adanya dua aliran politik yang saling bertentangan. Partai-partai dan organisasi politik oposisi tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR); sedang sebagian partai-partai dan organisasi pendukung pemerintah bergabung dalam sebuah organisasi Gerakan Revolusi Rakyat (GRR).⁴⁵ Pada umumnya DPR mengikuti garis politik Tan Malaka yang dikenal sebagai seorang Tortskest yang menyokong kebijaksanaan pemerintah, sedang FDR suatu front yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin merupakan golongan oposisi. Beberapa hari sebelum terbentuknya FDR.⁴⁶ Partai Sosialis yang dipimpin Amir Sjarifuddin me-



Amir Sjarifuddin

⁴⁵Yayasan Penerbit Diponegoro, *Sedjarah TNI Angkatan Darat Kda m VII/Diponegoro*, Sirnaning Jaks o Katon Gapuraning Ratu, Semarang, 1958, hal .126.

⁴⁶FDR adalah sebuah gabungan dari sejumlah organisasi politik, organisasi bersenjata, organisasi massa/tani yang berhaluan kiri yang menjelma sejak tanggal 28 Januari 1948. *Vid. Drs Moela Marboen, Gerakan Organisasi Militer I Untuk Menumpas Pemberontakan Madiun*, Mega Book Store, Jakarta, 1965, hal 1.1 Sedangkan GRR merupakan Gabungan dari 8 buah partai dan organisasi Massa kelaskaran, antara lain:

1. Partai Rakyat
2. Partai Rakyat Jelata
3. Partai Wanita Rakyat
4. Angkatan Komunis Muda (AKOMA)
5. Persatuan Invaliden Indonesia
6. Laskar Rakyat Jakarta (laskar ini berkedudukan di Jawa Barat dan sekitar Kota Jakarta, terutama di Karawang)
7. Barisan Banteng Surakarta, yang mempunyai pasukan sebanyak lebih kurang 3000 orang bersenjata
8. Partai Rakyat yang dipimpin oleh Maruto Nitimihardjo, merupakan Partai Politik yang cukup berarti dan besar. *Vid. Pinardi, Peristiwa Madiun 1948*, Inkopak-Hasera, Jakarta, 1966, hal.56.

ngalami perpecahan. Di satu pihak berdiri Partai Sosialis yang dipimpin oleh Sjahrir, di lain pihak tetap berdiri Partai Sosialis yang dipimpin Amir Sjarifuddin. Perpecahan ini akibat adanya perbedaan paham, pandangan serta corak dan cara melanjutkan revolusi. Partai Sosialis Sjahrir berhasil menarik golongan cendekiawan ke dalam partainya; Partai Sjahrir ini dikenal dengan nama Partai Sosialis Indonesia yang berhaluan kanan yang pro pemerintah Hatta.⁴⁷

Usaha Amir untuk menggulingkan Kabinet Hatta sia-sia belaka, Kabinet Hatta berjalan terus dengan dibebani warisan Naskah Renville yang sudah menjadi perjanjian negara. Program Kabinet Hatta antara lain:

1. Menyelenggarakan isi Persetujuan Renville
2. Mempercepat terbentuknya Negara Serikat
3. Mengadakan Rasionalisasi
4. Mengadakan Pembangunan.⁴⁸

Sementara itu usaha Amir merebut kunci Kabinet semakin diperhebat. Kampanye dilakukan lewat rapat-rapat umum dan siaran pers FDR.⁴⁹ Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) yang ikut jatuh bersama tergulingnya Kabinet Amir, lalu menjadi golongan oposisi dan menyalahkan bleid Dr. Sukiman dari Masyumi, walaupun orang-orang PSII masih termasuk orang-orang Masyumi. Karena terpengaruh oleh FDR, PSII semakin berani mengeluarkan kritik-kritik keras terhadap Masyumi. Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) ikut terbawa-bawa dalam perselisihan itu, karena dalam pucuk pimpinan GPII banyak orang-orang PSII maupun

⁴⁷Lettu Drs. Arif Budhiman, *Analisa Bandingan Pemberontakan PKI Madiun dan Pemberontakan G.30 S/PKI*, Vidya Yudha No. 6 th. Ke II/ 1968, Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat, Bandung, 1969, hal.55-56.

⁴⁸Yayasan Penerbit Diponegoro, *Op.cit.*,hal.126.

⁴⁹Adalah satu Harian FDR ialah surat kabar "Api Rakjat", kemudian sewaktu PKI menguasai Madiun menjadi harian Pemerintah Front Nasional dan berganti menjadi Harian "Front Nasional". Vid. Pinardi, *Peristiwa Madiun 1948*, Inkopak-Hasera, Jakarta, 1966, hal.91.

Masyumi, sehingga sebagian dari pemuda GPII ikut pula mengeritik Masyumi dan menjalankan politiknya sendiri; lepas dari Masyumi.⁵⁰

Dalam keadaan politik yang semakin meruncing, pemerintah RI terus berusaha menjalankan program yang telah digariskan. Dalam program tersebut, Rekonstruksi dan Rasionalisasi paling menimbulkan masalah pertentangan politik yang hebat. FDR tidak menyetujui adanya Rasionalisasi dalam angkatan perang RI; hal ini dapat dimengerti mengapa FDR menolak adanya Rasionalisasi dalam angkatan Perang. Karena bila Rasionalisasi dijalankan, banyak dari golongan oposisi yang menjadi Laskar ataupun TNI masyarakat akan terkena Rasionalisasi tersebut. Oleh karena itu Kabinet Hatta yang hendak melaksanakan Rasionalisasi ditentang hebat dengan mengadakan kritik tajam dan adu domba, sehingga banyak pemuda-pemuda yang akan terkena Rasionalisasi terpengaruh dan masuk dalam ke-satuan-kesatuan yang ada di bawah pimpinannya.

Sebagai langkah pertama untuk melaksanakan Rasionalisasi dalam Angkatan Perang, dikeluarkan Pene-tapan Presiden No. 1 Tahun 1948 pada tanggal 2 Januari 1948 yang isinya antara lain:

1. Pembubaran Pucuk Pimpinan TNI dan Staf Gabungan Angkatan Perang
2. Pengangkatan untuk sementara Kepala Staf umum Angkatan Perang beserta Wakilnya
3. Mengangkat Jendral Sudirman menjadi Panglima Angkatan Perang Mobil
4. Pengangkatan Angkatan Staf Markas Besar Per-tempuran.⁵¹

Keputusan Presiden ini menimbulkan reaksi di ka-

⁵⁰Muhammad Dimjati, *Op.cit.*, hal.167.

⁵¹Nugroho Notosusanto, *Op.cit.*, hal .9.

langan Pimpinan Angkatan Perang, karena konsep dan rencana Penetapan Presiden tersebut dibuat oleh Kabinet Amir dengan tidak terlebih dahulu mengadakan peundingan dengan tokoh-tokoh TNI.⁵² Oleh karena itu adanya mutasi besar-besaran dalam pimpinan tertinggi Angkatan Perang sangat membingungkan TNI. Penetapan Presiden No. 1 th. 1984 sebenarnya sudah diundangkan, akan tetapi pengumumannya ditunda sambil menunggu penetapan bagi kedudukan tokoh-tokoh TNI yang telah banyak jasanya pada nusa dan bangsa.⁵³

Masalah Rasionalisasi di bidang militer menjadi suatu masalah yang gawat, karena dipolitisir. Masalah Rasionalisasi sudah ada sejak sebelum ditanda tangannya persetujuan Renville, tetapi baru dapat dilaksanakan pada Kabinet Hatta. Baik Kabinet Amir maupun Kabinet Hatta dalam rencananya menjalankan Rasionalisasi mendapatkan tantangan hebat dari berbagai pihak; juga BPRI sendiri pernah menolak Rasionalisasi tersebut.⁵⁴ Demikianlah pada bulan Desember 1947 dan Januari 1948, BPKNIP (Badan Pekerja Komite Indonesia Pusat) di Yogyakarta diterima suatu mosi mengenai susunan pemerintahan Negara dan Angkatan Perang RI. Kemudian mosi ini dikenal setelah diundangkan dengan undang-undang No.3 Tahun 1948. adapun isi pokok dari mosi yang diterima BPKNIP antara lain bahwa; ditetapkan Angkatan Perang dibawah kekuasaan Menteri Pertahanan dan ditetapkan pula bertanggung jawab dibidang organisasi, administrasi, perlengkapan persenjataan, kualitas seluruh Angkatan Perang dan Pimpinan Militer Pertahanan atas Kementerian Pertahanan serta angkatan perang selaku paduan erat. Mosi Re-Ra dari Baharuddin (golongan Kiri) diterima oleh Pemerintah dan Menteri Muda Pertahanan

⁵²Tentara Republik Indonesia den gan resmi menjadi Tentara Nasi onal Indonesia (TNI) pada tgl 5 Mei 1947.

⁵³*Ibid*, hal. 10.

⁵⁴Sutomo, *Kemana Bekas Pedjuang Bersendj ata*, Balapan, Jakarta, 1952, hal.7.

Arudji Kartawinata, dikatakan pula bahwa Undang-undang No. 3 Th.1948 akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Menurut Presiden dengan Rasionalisasi dan Rekonstruksi harus diciptakan suatu kesatuan di bawah satu komando. Pertahanan harus pertahanan rakyat, bukan pertahanan partai.⁵⁵ Mosi Baharuddin terutama ditujukan untuk mencari legalisasi hukum atas *Move* tersebut. Sejak berlakunya undang-undang No. 3 Th. 1948 tumbuh dualisme di bidang Angkatan Perang antara Menteri Pertahanan di satu pihak dengan Markas Besar Tentara dilain pihak.⁵⁶

Dipandang dari kepentingan nasional Rasionalisasi merupakan suatu keharusan yang tujuannya untuk meringankan beban Masyarakat, untuk menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja negara. Dalam pidatonya tanggal 16 Januari 1948 di depan BPKNIP, Hatta antara lain mengatakan:

“...dalam taraf pertama akan dimobilisasikan sebanyak 16.000 orang di kalangan Angkatan Perang. Diharap dalam Angkatan Perang akan terdapat jumlah 57.000 pasukan tetap saja yang akan diorganisir dan diperlengkapi dengan senjata dan dilatih dengan baik”.⁵⁷

Mengenai Re-Ra dalam pelaksanaannya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

Pelaksana usul mosi Baharuddin dan kawan-kawannya diselenggarakan oleh Kepala Staf Angkatan Perang, sedang mengenai pasukan-pasukan dari da-

⁵⁵Dr. A. H. Nasution, *Sedjarah Pertahanan Nasional Dibidang Bersendjata*, Mega Book Store, Jakarta, 1966, hal.122-123.

⁵⁶Lettu Drs. L. Arif Budhiman, Analisa Bandingan Pemberantasan PKI Madiun dan Pemberontakan G30S/PKI ke I, *Vidya Yudha* No. 5 Th. Ke II/1969, hal.54.

⁵⁷Nugroho Notosusanto, *Op.cit.*,hal.8.

erah perlawanan diselenggarakan oleh Wakil Panglima Besar Angkatan Perang, untuk menghadapi agresi Belanda ke dua.

Selama Re-Ra dijalankan, pimpinan Angkatan Perang tidak sedikit menerima berita-berita bersifat provokatif. Hal ini disebabkan banyaknya pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat yang diadakan panglima besar sewaktu membicarakan Re-Ra. Pada tanggal 8 Maret Panglima Besar menghadap Presiden untuk membentuk panitia khusus, yang diketuai oleh Panglima Besar sendiri untuk melaksanakan Re-Ra. Oleh Panglima Besar ditunjuk tiga orang Jendral yang dianggap cukup mewakili tiga aliran perwira yang ada dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) waktu itu; yaitu Mayor Jendral Susalit (mewakili ex-Peta), Mayor Jendral Suwardi (mewakili golongan KNIL) dan Mayor Jendral A.H. Nasution (mewakili golongan perwira muda). Pada rapat yang sering diadakan, para perwira pada pokoknya tidak dapat menerima Undang-undang hasil mosi Baharuddin, karena menimbulkan dualisme di kalangan pimpinan Angkatan Perang, yaitu antara Panglima Besar Angkatan Perang dan Kepala Staf Angkatan Perang, masing-masing merupakan pimpinan tertinggi dan ke dua-duanya berada dibawah Menteri Pertahanan.⁵⁸

Sesuai dengan penetapan Presiden No.1 Tahun 1948 tentang Rekonstruksi dan Rasionalsasi dalam Angkatan Perang, maka pada tanggal 17 Maret 1948 Kolonel Subijakto diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut.⁵⁹ Sedangkan Divisi I dan II Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) dilebur dan digabungkan ke dalam Angkatan Darat, sedang kesatuan

⁵⁸Dr.A.H. Nasution, *Op. cit.*, hal122-123.

⁵⁹Sudjono Jusuf, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI 1965, hal.42.

Corps Marinieers di Jawa Tengah dan Jawa Barat masih tetap di bawah naungan Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI).⁶⁰ Tetapi peleburan dari tubuh TLRI tidak semuanya lancar, di Solo dan di Blitar timbul demonstrasi Laskar yang menentang Rekonstruksi dan Rasionalisasi. Peleburan TNI Masyarakat dan sebagainya kedalam organisasi baru TNI mengalami kesukaran dan ternyata Rekonstruksi dan Rasionalisasi belum dapat dilaksanakan pada waktu itu.⁶¹

Adanya Panglima Besar Angkatan Perang, yaitu dalam pengertian pimpinan pasukan yang dipegang oleh Jendral Sudirman dan A.H.Nasution selaku Wakil Panglima Besar Angkatan Perang, dan adanya Kepala Staf Angkatan Perang Surjadarma dan T.B. Simatupang selaku Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, mereka adalah pimpinan administrasi, menimbulkan anggapan seolah-olah Pimpinan Angkatan Perang akan pecah. Timbul pula pendapat yang mengatakan bahwa "ada dua garis komando" yang akan menimbulkan



Jend Soedirman

bermacam-macam organisasi pasukan, bahkan ada pula yang beranggapan atau berpendapat bahwa konsepsi ter-sebut akan memecah dan melemahkan potensi Angkatan Perang. Ada pula yang yang menghubungkan dengan konsepsi yang diajukan oleh Belanda, yaitu konsepsi Tentara Federal, jadi dianggap sebagai persiapan Tentara Re-publik Indonesia Serikat. Kesulitan dan kesukaran tersebut makin memuncak setelah pasukan Siliwangi datang di Jawa Tengah.

⁶⁰Ibid., hal .72.

⁶¹Drs. Moela Marboen, *Gerakan Operasi Militer I Untuk Menumpas Pemberontakan Madiun*, Mega Book Store, Jakarta, 1965, hal .2.

Pasukan yang hijrah sebagai pelaksanaan persetujuan Renville, disebut sebagai *Stoot Leger Wilhelmina* (SLW). Demikianlah bermacam-macam anggapan atau pendapat yang timbul waktu itu, masing-masing orang dan golongan punya tafsiran tentang kejadian peristiwa sesuai dengan kemauan dan kepentingannya sendiri.⁶²

Untuk menghilangkan salah paham mengenai Re-Ra dalam angkatan perang, Panglima Besar Sudirman dan Wakil Panglima Besar A.H. Nasution pada tanggal 19 Maret 1948 dalam keterangan yang disampaikan kepada pers tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan hal tersebut Panglima Besar Sudirman dengan tegas Menyatakan:

“...tiada seorangpun dari kalangan Angkatan Perang yang tidak setuju dengan tindakan Pemerintah itu. Tidak saja Angkatan Perang, tetapi semua lapangan perlu diadakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi yang sesuai dengan susunan politik dewasa ini”.⁶³

Sedangkan Mr. Kasman Singodimedjo antara lain mengatakan:

“...bahwa Rasionalisasi itu secara teknis diskundig telah dapat bahannya dari Panglima Tertinggi. Setelah menjadi Mosi Badan Pekerja yang disetujui oleh segenap anggauta, lalu menjadi inisiarif porstel Badan Pekerja yang tidak seorangpun menolaknya. Baik Kabinet Amir maupun Kabinet Hatta sangat setuju dengan Rekonstruksi dan Rasionalisasi. Rekonstruksi yang direncanakan pemerintah sejak kabinet Amir sampai sekarang masih terus dijalankan. Kita

⁶²Dr.A.H. Nasution, *Op. cit.*, hal.123-124.

⁶³Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No.7 P (28), Surak Kabar *Kedaulatan Rakjat* Tanggal 20 Maret 1948.

masih dalam keadaan bahaya, karena itu Rekonstruksi harus merupakan usaha memperkuat Angkatan Perang dan Pertahanan kita. Tentang Rasionalisasi kita telah siap menjalankan, tinggal menunggu kesanggupan opvanglegaan harus benar-benar menjaga supaya mereka tidak terlantar dan dapat merupakan tenaga yang sewaktu-waktu siap sedia menghadapi kejadian yang akan datang”.⁶⁴

Program pemerintah mengadakan Re-Ra didukung oleh semua partai, kecuali FDR/PKI. Partai ini semula gigih mendukung persetujuan Renville, kini menolak mati-matian persetujuan tersebut. Re-Ra telah dijadikan alat untuk memburuk-burukkan pemerintah, supaya pemerintah Hatta yang melaksanakan Re-Ra tersebut jatuh. Dalam provokasi yang mereka lakukan, golongan oposisi telah berusaha untuk mempengaruhi kalangan militer. Sehingga banyak dari kalangan militer yang terpengaruh, terutama dalam kalangan Divisi Panembahan Senopati di Surakarta. Karena Divisi Panembahan Senopati sebelumnya juga menyatakan tidak setuju dengan adanya Re-Ra, pernyataan itu telah mereka lakukan melalui Panitia Pertimbangan Pucuk Pimpinan Tentara (P4T). dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Rasionalisasi jangan dijalankan dulu, karena musuh masih diambang pintu terutama karena mengingat siasat militer. Alasan tersebut sama sekali bukan ambisi perseorangan,⁶⁵ karena Jendral Mayor Sutarto sendiri selaku Panglima Divisi IV Panembahan Senopati telah menurunkan pangkatnya menjadi Kolonel. Sikap Panglima Divisi IV Panembahan Senopati terhadap Re-Ra bersandar siasat militer telah dijadikan pertarungan politik, dibesar-besarkan dan diperuncing

⁶⁴Dokumen Semdam VII/Diponegoro, No. 6B (10) II, hasil wawancara dengan Letkol Purnawirawan Sunarto Kusumodirdjo, tanggal 30 Agustus 1967.

⁶⁵Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A. No. 6B (10) II, hasil wawancara dengan Letkol Purnawirawan Sunarto Kusumodirdjo, tanggal 30 Agustus 1967.

dengan penapsiran politik mereka sendiri, sehingga sebagian masyarakat (terutama dari luar Surakarta) mendapat gambaran yang lain tentang diri Panglima Divisi IV; seolah-olah condong kepada komunis, karena pihak komunispun tidak setuju dengan adanya Re-Ra atas dasar politik dan keyakinannya sendiri.⁶⁶

Pelaksanaan Re-Ra tidak selancar seperti yang diharapkan, karena adanya beberapa panglima yang tidak mau menyerahkan daerahnya kepada panglima-panglima yang baru. Oleh karena orang-orang FDR/PKI mereka dihasut dan dipengaruhi, untuk kemudian dijadikan pengikutnya. Dengan mempergunakan orang-orang Pepolit dan beberapa kader PKI dengan FDR-nya berhasil menimbulkan suasana tegang antara pasukan Siliwangi dan Pasukan Panembahan Senopati.

Dalam usaha mempengaruhi perwira-perwira atau komandan-komandan bawahan dan prajurit-prajurit Siliwangi, dengan tekun dan terarah sekali tokoh-tokoh FDR/PKI mengadakan infiltrasi dan taktik yang digerakkan secara simultan dari atas dan bawah. Tidak sedikit perwira-perwira Siliwangi dan prajurit-prajuritnya mengadakan kunjungan ke penginapan tokoh Komunis Alimin, yang waktu itu menempati Paviliun Lojigandrung (sekarang di jalan Slamet Ryadi) Surakarta. Dari situlah tokoh-tokoh FDR menyusun dan merealisasikan rencana-rencananya. Alimin yang bertubuh kecil dan biasanya berpakaian sangat sederhana; memakai kain sarung, jas, handuk, peci merah, bersepatu dan berkaos kaki, dengan sopan dan ramah sering menceritakan perjuangan Lenin, Mao dan beberapa tokoh Komunis dunia terkemuka kepada tamu-tamunya, termasuk prajurit Siliwangi.⁶⁷ Sehingga banyak pula dari kesatuan-kesatuan TNI Siliwangi yang terpengaruh oleh mereka.

⁶⁶Dokumen Semdam VII/Diponegoro, No. 8B (10)II, hasil wawancara dengan Kolonel Purnawirawan S. Surjosukanto, Tanggal 23 September 1967.

⁶⁷Makmun Salim, *Op.cit.*, hal.79-80.

Di Jawa Timur, pelaksanaan Rasionalisasi menimbulkan banyak keonaran dalam Angkatan Perang. Karena untuk seluruh Jawa Timur harus ada satu Divisi saja; Divisi V, VI, dan VII lama mengalami perubahan. Karena itu pembentukan Divisi tersebut terpaksa didahului dengan pembentukan Badan Staf Pertahanan Jawa Timur untuk memberi pimpinan kepada Brigade-brigade baru, sebagai penjelmaan resimen lama. Staf Pertahanan Jawa Timur dipimpin oleh Letkol Marhadi. Dalam usaha menggagalkan pelaksanaan Rasionalisasi tersebut, maka Letkol Marhadi dan beberapa anggota pimpinan lainnya ditahan oleh kaum Komunis dan kemudian dibunuh.⁶⁸

Pada tanggal 5 Mei 1948 dilangsungkan pelantikan di Kepatihan Yogyakarta terhadap opsir-opsir menurut Rekonstruksi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang seperti tersebut dalam Penetapan Presiden. Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman dalam amanatnya mengharap supaya memegang teguh disiplin ketentaraan. Angkatan Perang yang kecil tetapi berdisiplin teguh, akan lebih kuat dari pada yang besar tetapi kurang berdisiplin.⁶⁹

Untuk melaksanakan Undang-undang No. 3 Th.1948 tentang organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang, telah diumumkan Penetapan Presiden No. 14 mengenai Reorganisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Mulai tanggal 15 Mei 1948 susunan Kementerian Pertahanan terdiri atas staf-staf dan bagian-bagian seperti termaktub dalam undang-undang No. 3 Th.1948. Kesatuan Mobil dan Teritorial tersusun dalam Komando Jawa dan Sumatra, terdiri atas Divisi dan Sub Teritorial. Dengan ini dihapuskan semua staf atau kesatuan-kesatuan diluar susunan Kementerian Pertahanan. Selain itu Menteri Pertahanan mengadakan tanda-tanda baru yang mulai berlaku

⁶⁸Prof.Dr. Slametmuljana, *Op.cit.*,hal.265-266.

⁶⁹Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No.7 P (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat* Tanggal 14 Mei 1948.

bulan Mei 1948 dan peraturan uniform yang mulai berlaku bulan Juni 1948, peraturan alat-alat senjata dan kendaraan yang termasuk Angkatan Perang.⁷⁰

Berbagai pihak yang kurang mengerti dan me-nyadari betapa pentingnya Rekonstruksi dan Rasionalisasi dalam Angkatan Perang menolak dan mengusulkan pada pemerintah agar membatalkan rencana tersebut. Lebih-lebih golongan oposisi yang memang sudah sejak lama menentang Kabinet Hatta dan menolak program Rasionalisasi Kabinet tersebut, sehingga dengan berbagai jalan berusaha untuk menggagalkan program-programnya.

Ternyata tuntutan-tuntutan FDR/PKI tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, maka segera FDR/PKI mengadakan tuntutan berupa pendemokrasian kabinet. Adanya tuntutan dari golongan oposisi yang menghendaki pendemokrasian kabinet, pemerintah Hatta menjawab; bahwa semua itu telah menjadi program pemerintah, akan tetapi bukan berarti perlu diadakannya resuffle kabinet. Tuntutan pendemokrasian kabinet semacam itu merupakan pola gerakan komunis di mana-mana termasuk pula di Indonesia yang telah masuk pengaruh Moskow, karena pertentangan politik antara pemerintah dan golongan komunis pada saat itu ternyata tidak hanya bertemakan anti Imperialis dan Kolonialis dalam arti yang sempit, melainkan mempunyai latar belakang yang cukup luas. Hal mana nampak dari nada oposisi FDR/PKI yang selalu menuntut terbentuknya Kabinet Parleментар dan dihentikannya perundingan dengan Belanda; karena menurut perhitungan Moskow perundingan dengan Belanda berarti semakin mendekatkan Indonesia pada lawan politik Moskow.⁷¹

Demikianlah FDR/PKI dengan berbagai cara untuk menjatuhkan Kabinet Hatta secara Parleментар tidak berhasil,

⁷⁰Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A. No. 7 P (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat* Tanggal 15 Mei 1948.

⁷¹Makmun Salim, *Op.cit.*, hal.76.

karena itu FDR/PKI berusaha dengan jalan non Parleментар seperti tertera dalam Dokumen FDR yang telah disiarkan dalam Harian Murba tanggal 1 April 1948, dimana dalam pasal 6 ayat 11 dari dokumen tersebut memuat antara lain:

1. menimbulkan kekacauan di mana-mana selama Kabinet Masyumi memegang tampuk pimpinan pemerintah dengan jalan menggerakkan segala organisasi penjahat, supaya giat melakukan penggedoran-penggedoran, pencurian- pencurian diwaktu siang dan malam hari. Kepolisian belum siap untuk menghadapi semua itu. Apabila semua rencana tersebut dapat dijalankan dengan teliti dan rapi, maka seluruh rakyat akan selalu ketakutan, akibatnya pemerintah tidak mendapatkan kepercayaan.
2. melakukan tindakan, kalau perlu penculikan harus dilakukan terhadap orang-orang yang melawan rencana FDR, termasuk mereka yang melepaskan diri dari sayap kiri; Partai Buruh Merdeka, Serikat Buruh Gula (SBG) dan lain-lainnya.⁷²

Adanya berita tersebut dengan tergesa-gesa pimpinan FDR menjelaskan, bahwa program mereka itu telah dipalsukan oleh lawan politiknya. Kata surat kabar Murba dokumen tersebut dibuat pada tanggal 5 Februari 1948 selaku rencana teratur guna menjatuhkan Kabinet Hatta. Selanjutnya FDR akan mengadakan Surat Kabar Murba, karena telah melakukan pemalsuan dokumen rahasia tersebut. Oleh jaksa agung lalu diminta bukti rencana FDR yang asli, supaya dapat dibandingkan dengan yang dipalsukan. Tetapi peristiwa itu tidak ada kelanjutannya, dan publikpun tinggal diam saja.⁷³

⁷²A. Muhammad Dimjati, *Op.cit.*, hal .172.

b. Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No.7 P (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat* Tanggal 20 September 1948.

⁷³Muhammad Dimjati, *Op.cit.*, hal .173.

2.2 Offensif PKI di Surakarta

Program pemerintah untuk melaksanakan Re-Ra semakin memperuncing suasana, karena menimbulkan berbagai reaksi terutama dari kalangan militer sendiri, ditambah meruncingnya suasana politik yang menimbulkan berbagai eksekusi yang merugikan tingkatan perjuangan waktu itu. Sehingga timbul insiden-insiden bersenjata yang sengaja dilancarkan dan ditunggangi oleh golongan-golongan tertentu. Ada pula oknum-oknum yang merugikan perjuangan nasional dengan perbuatan-perbuatan anarchisme dengan menyalahgunakan kepercayaan atau kekuasaan yang disinyalir dilakukan segolongan tentara Bekas Laskar Barisan Pembontak Republik Indonesia (BPRI) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Mardjuki. Untuk menjaga nama baik TNI, telah berulang kali Panglima Besar Sudirman memperingatkan kepada para Komandan Kesatuan yang dipimpinnya untuk lebih erat memegang disiplin dan hukum militer serta menghindarkan hal-hal yang menurunkan derajat tentara. Untuk mengambil tindakan terhadap Letkol Mardjuki, pada tanggal 23 Maret 1948 Letkol Suadi dan pemuda Achmadi dari TP (Tentara Pelajar) diberi tugas dari Panglima Tertinggi untuk mengambil tindakan tegas terhadap anasir-anasir anarkisme dalam tubuh tentara.

Dengan setahu dan dengan persetujuan Panglima Divisi IV, kemudian diambil tindakan tegas terhadap Letkol Mardjuki, seorang Komandan Resimen V Brigade XXXV di Surakarta, sehingga terjadi pertemuan di pagi hari tanggal 23 Maret 1948 di dalam kota Surakarta.⁷⁴

Pertempuran timbul karena Mardjuki telah mengahsut anak buahnya untuk melakukan perlawanan sebagai usaha

⁷⁴ a. Panitia Sewindu Divisi Diponegoro, *Op.cit.*, hal.127

b. Dokumen Semdam VII?Diponegoro No. 18b (12) II, Sejarah TNI Periode 1948-1950, disusun oleh Sem.Menif 15.

mempertahankan diri, di mana Tentara Pelajar yang berhasrat berbakti pada negara telah terlibat dalam pertempuran. Dalam pertempuran ini telah gugur pemuda Gajah Suranto dari TP dan beberapa orang anggota BPRI, Gajah Suranto telah gugur pada tanggal 27 Maret 1948. sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir ia sempat berkata bahwa ; *"..ora dadi apa dadi tumbale negara"* (tidak jadi apa demi negara). Gajah Suranto dilahirkan di Surakarta pada tanggal 10 April 1924, putera dari Rngt. Purwowidjojo. Mendapat julukan "Gajah" karena berbadan besar. Untuk menenangkan suasana ini datang Bung Tomo memberikan penjelasan-penjelasan di muka umum tentang persoalan sebenarnya. Bung Tomo (pemimpin BPRI) dapat membenarkan tindakan Tentara Pelajar tersebut. Dia menegaskan bahwa siapa saja baik dia kawan sendiri, baik dia dari partai manapun juga; baik dia PNI, Mayumi maupun BPRI sendiri, jika terbukti bersalah melakukan korupsi, maka wajiblah dia mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dari TP-pun memberikan penjelasan-penjelasan untuk menenangkan suasana, sedang Mardjuki kemudian dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Mayor Slamet Ryadi.⁷⁵

Untuk menghilangkan kegelisahan masyarakat dan juga untuk menenangkan suasana dan keamanan di Surakarta mengenai peristiwa yang baru terjadi itu. Kementerian Penerangan segera mengeluarkan pengumuman yang berbunyi:

"...pada tanggal 27 Maret 1948 pagi di kota Surakarta telah terjadi peristiwa yang menimbulkan kegelisahan, peristiwa tersebut adalah suatu tindakan resmi pemerintah untuk membasmi pengacau-pengacau".⁷⁶

⁷⁵Panitia Penyusunan Buku Peringatan 2 Tahun DPRD Sementara Kota Besar Surakarta, *Op.cit.*, hal.10

⁷⁶Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No.7 P (28), Surat Kabar Kedaulatan Rejkat Tanggal 30 Maret 1948.

Dengan keluarnya pengumuman pemerintah itu, kegelisahan dan ketegangan di kalangan masyarakat diredakan. Karena dengan terjadinya peristiwa tersebut, telah menimbulkan berbagai pendapat yang berlainan yang dapat memperuncing suasana.

Kegelisahan masyarakat tidak dapat hilang sama sekali, karena FDR masih terus melakukan adu domba dengan menyebarkan isue-isue yang dapat menimbulkan pertentangan. Karena keadaan semacam itu akan memudahkan bagi FDR untuk melaksanakan maksudnya dalam usaha menjatuhkan Kabinet Hatta. Perpaduan antara Alimin, Amir Sjarifuddin, Setiadjud, Sardjono dan Aidit cukup kuat untuk merebut simpati masyarakat supaya memusuhi kabinet.Hatta. kelemahan Kabinet Hatta karena mendukung warisan linggarjati dan Renville peninggalan Kabinet Sjahrir dan Amir. Hal ini memudahkan bagi golongan oposisi dalam mencari pengikut dari kalangan masyarakat.⁷⁷

Lawan politik FDR yang paling agresip dan tidak kalah revolusionernya adalah GRR dari pengikut-pengikut komunis Tan Malaka yang berpusat di Surakarta yang dipimpin oleh Dr.Muwardi dan golongan Sjamsu Harja Udaja dari Partai Buruh Merdeka. Golongan ini mengeluarkan Surat Kabar Harian Murba di Surakarta yang terus-menerus menyerang orang FDR, orang-orang SOBSI, orang-orang Partai Sosialis Amir dan PKI, terutama mengupas watak personalia tokoh-tokoh sayap kiri; Setiadjud, Sardjono dan lain-lain kaum komunis Sibar yang datang dari Australia dan Negeri Belanda. Pada dasarnya kaum FDR, juga golongan Sjamsu Harja Udaya sama-sama mengikuti Marxisme, tetapi dalam usaha memperjuangkan politik, keduanya berbeda. Kaum komunis yang tergabung dalam FDR mengatakan bahwa; Tan Malaka dan kaum GRR adalah kaum Trotskyist dan pengkhianat partai komunis, sebaliknya golongan Tan Malaka

⁷⁷Muhammad Dimjati, *Op.cit.*, hal.171.

Cs menuduh PKI Alimin adalah PKI van der Plas, karena berasal dari pelarian Brisbane (dari Digul terus ke Australia), kemudian mengadakan kerja sama dengan Belanda.⁷⁸

Sementara itu semenjak Kabinet Amir dibubarkan, pertentangan yang timbul antara FDR dan Golongan Persatuan Perjuangan yang tergabung dalam GRR yang pro pemerintah semakin tajam, terutama di Surakarta. Dr. Muwardi ketua Barisan Banteng yang juga menjadi Ketua BPRI adalah penentang utama FDR, di mana dalam setiap kritikan yang dilancarkan mengatakan bahwa Amir Sjarifuddin adalah kaki tangan Imperialis, karena itu Amir harus digantung di depan masyarakat.⁷⁹

Adanya kritikan yang dilontarkan kepadanya, Amir dengan berbagai jalan berusaha untuk melemahkan BPRI dan berusaha menarik Panglima Divisi Siliwangi A.H. Nasution agar bekerjasama dengan pihak FDR untuk menyelamatkan perjuangan dan akan memberikan kedudukan penting dalam pemerintahan yang akan datang.⁸⁰ Tetapi usaha ini tidak mendapat sambutan, sehingga pasukan Siliwangi kemudian dimusuhi. Pasukan Siliwangi diadu-domba dengan Batalyon Pesindo yang tergabung dalam FDR seperti terjadi di Tulungagung, Blitar, Madiun, Solo, Yogyakarta dan lain-lain tempat.

Pernah FDR mempergunakan polisi untuk menangkap Dr. Muwardi dengan dua orang temannya yang menjadi pimpinan BPRI, akan tetapi kemudian mereka dilepaskan dari tahanan atas perintah seorang utusan Panglima Besar Sudirman.⁸¹ Dalam suasana politik yang makin meruncing, pada tanggal 20 Mei 1948 dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke III, Divisi IV Panembahan Senopati mengadakan parade besar-besaran yang dipimpin oleh Komandan Divisi IV Kolonel Sutarto. Parade tersebut

⁷⁸*Ibid*, hal.172.

⁷⁹Dr.A.H.Nasution, *Op.cit.*, hal.126-127.

⁸⁰Jenderal A.H. Nasution, *Op.cit.*, hal. 236.

⁸¹Prof. Iwa Kusumantri SH., *Op.cit.*, hal.193

telah diputar balikkan oleh orang-orang oposisi dan dikatakan bahwa parade itu dimaksud sebagai penolakan terhadap Re-Ra, sedang dari aliran-aliran politik memberitahukan pula tap-siran yang berbeda-beda atas parade tersebut,⁸² sehingga pertentangan politik menjadi semakin keruh dan membahayakan negara.

Pada bulan Juni 1948 terjadi pemogokan besar-besaran di Perkebunan Delangu. Kaum buruh Perkebunan yang tergabung dalam SARBUPRI menuntut kenaikan upah, di mana FDR menjadi pelaku penting dalam masalah pemogokan itu. Kekerusuhan politik telah menjalar ke Lapangan perjuangan buruh yang menyeret pengikut Masyumi dan STII (Serikat Tani Islam Indonesia) ke dalam pemogokan itu. Petani-petani dari STII yang akan mengerjakan tanaman yang terlantar akibat pemogokan telah bentrok dengan kaum buruh yang tergabung dalam SARBUPRI, BTI dan Pesindo. Dalam bentrokkan tersebut petani-petani STII mendapat bantuan dari pemuda-pemuda bekas Hisbullah, Sabillillah dan Pasukan Siliwangi. Akhirnya pemogokan tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah, setelah ditangani oleh suatu panitia pen-damai sebagai pihak ketiga.⁸³

Walaupun pemogokan itu dapat diselesaikan oleh pemerintah, namun ketegangan politik masih terus berlangsung. Karena pemogokan itu timbul akibat adanya pertentangan politik, maka penyelesaiannya pun harus dilakukan dalam bidang politik. Pemogokan tersebut adalah salah satu dari rencana FDR untuk merongrong kewibawaan pemerintah Hatta.

Usaha mempengaruhi Divisi Panembahan Senopati telah dilakukan FDR dengan jalan mengadakan rapat bert-empat di Markas Pasukan Senopati di Timuran Surakarta. Dalam rapat tersebut antara lain hadir : Kolonel Sutarto, Mayor Sutarno, Kapten Sunarjo, Mayor Sumantri (dari

⁸²Yayasan Penerbit Diponegoro, Op.cit., hal.138.

⁸³Muhammad Dimjati, Op.cit., hal.168-169.

MBPM), Mayor Djojosingito (dari BPRI Surakarta), Iskandar (dari Laskar Rakyat Surakarta), Letnan Hadikusumo, Letkol Sujoto, Wikana, Achmad Fajar, Sunar Sugiarto, Mayor Harso, Samsuddin (Pepolit), Mursito, Hendro Pradjoko, Tukiman, Rushak dan beberapa orang dari Badan Perjuangan, di-antaranya 3 orang dari Jawa Timur. Dalam rapat tersebut Sujoto mengajak untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah, dan Kolonel Sutarto kalau tidak mau dianggap pasip saja. Tetapi bila setuju, nanti akan mendapat perintah dari Brigade 29 Jawa Timur. Dalam persoalan ini Klonel Sutarto menunjukkan sikap militernya, bahwa dia baru akan bertindak apabila telah ada perintah dari Markas Besar Tentara. Sikap tersebut telah menimbulkan debat sengit antara Kolonel Sutarto dan Sutojo, yang berakhir dengan keluarnya Kolonel Sutarto meninggalkan rapat.⁸⁴

Kurang lebih satu minggu sesudah pertemuan itu, pada tanggal 2 Juli 1948 sewaktu Kolonel Sutarto pulang dari Lojgandrung ke Rumahnya di Timuran Surakarta yang di-antar oleh Kusmanto dengan mengendarai mobil, sesam-painya di depan rumah beliau ditembak dari belakang secara pengecut. Usaha dari pihak militer untuk mengatasi keadaan yang tegang akibat terbunuhnya Kolonel Sutarto tidak berhasil, bahkan pertentangan politik semakin tajam.⁸⁵ Bivakmut hitam berbede "Siliwangi" yang terbentuk dari kaleng ber-bentuk bulat sebesar uang sen RI, dengan gambar macan yang diketemukan di tempat tertembaknya Kolonel Sutarto, mungkin oleh si pembunuh bermaksud bahwa prajurit Siliwa-ngilah yang melakukan penembakkan itu, sekaligus menodai

⁸⁴ a. Dokumen Semdam VII/Diponegoro No. 6B (10) II hasil wawancara dengan Letkol Purnawirman Sunarto Kusumodirjo tanggal 30 Agustus 1967.

b. Dokumen Semdam VII/Diponegoro No. 10B (10) II hasil wawancara dengan Mayor Purnawirawan Hadikusumo tanggal Agustus 1967.

c. Dokumen Semdam VII/Diponegoro No. 6B (10) II hasil wawancara dengan Kapten Purnawirawan M.A. Djamito, tanggal 29 Agustus 1967.

⁸⁵Dokumen Semdam VII/Diponegoro No. 6B (10) II, hasil wawancara dengan Kapten Purnawirawan M.A. Djamito, tanggal 29 Agustus 1967.

nama baik Siliwangi. Dari pihak Siliwangi menyanggah, bahwa seorang pembunuh kaliber besar tidak akan meninggalkan jejak yang sebenarnya dan diketemukannya benda-benda tersebut hanyalah sebagai alat untuk menyesatkan saja. Ternyata sanggahan ini diperkuat sendiri oleh Komandan KMK Mayor Achmadi. Sedang dari anak buah Kolonel Sutarto sendiri meyakinkan, bahwa hal ini tidak lain merupakan pembunuhan yang berlatar belakang politik.⁸⁶ Sedang menurut berita penyelidikan pelaku pembunuhan itu ialah Amin pemuda Pesindo dan Mayor Sunarjo yang sudah meninggal.⁸⁷

Sesudah Kolonel Sutarto meninggal, sebagai penggantinya adalah Letkol Suadi Suromihardjo. Sedang sebagai Kepala stafnya digantikan oleh Kolonel Sutojo (dari TLRI), Letkol Slamet Riyadi menggantikan Letkol Suadi sebagai Komandan Brigade V. Dengan diketemukannya bodge Siliwangi di tempat terbunuhnya Kolonel Sutarto, timbullah ketegangan antara Pasukan Senopati dan Pasukan Siliwangi, karena disangka Pasukan Siliwangi terlibat pembunuhan tersebut.⁸⁸ Ketegangan ini akhirnya menimbulkan bentrokan bersenjata, seperti terjadi di Tasikmadu di Surakarta. Peristiwa tersebut dapat diselesaikan, namun seasana seperti api dalam sekam, masing-masing kesatuan mengadakan *stealing* di sekitar markasnya.

Dalam suasana politik yang meruncing, datang pula Suripno dari Praha pada tanggal 11 Agustus 1948 di Yogyakarta beserta sekretarisnya bernama Suparto. Ternyata Suparto adalah Musso yang selama hampir 23 tahun berada di luar negeri dan berdiam di Rusia. Kedatangan Suripno tersebut karena dipanggil oleh Pemerintah sehubungan dengan adanya berita-berita yang mengatakan bahwa Suropto sebagai Duta Besar RI di Praha telah mengadakan persetujuan

⁸⁶Makmun Salim, *Op.cit.*, hal. 90-91.

⁸⁷Dokumen Semdam VII/Diponegoro No. 6B (10) II, hasil wawancara dengan Kapten Purnawirawan M.A. Djamito, tanggal 29 Agustus 1967

⁸⁸Dokumen Semdam VII/Diponegoro No. 18B (10) II, *Sedjarah TNI Periode II Tahun 1948-1950*, disusun oleh Sem. Menif 15., hal.7.

dengan Duta Besar Rusia di Praha untuk tukar-menukar Konsul antara RI dan Rusia.⁸⁹

Kedatangan Musso ke tanah air disambut baik oleh Presiden Soekarno dan diharapkan dapat ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Musso sendiri menjelaskan, bahwa kedatangannya kembali ke Indonesia adalah untuk ikut bersama berjuang dan menempatkan perjuangan bangsa Indonesia pada perjuangan yang tepat. Ia mengatakan bahwa kegagalan pemerintah tidak hanya disebabkan karena tidak adanya Front Nasional, tetapi juga dikarenakan semasa penjajahan Jepang pemerintah Indonesia mau bekerja sama dengan penjajah Jepang dan kemudian melanjutkan politik kerja sama tersebut dengan pemerintah Kolonial Belanda. Di samping mengadakan koreksi terhadap pemerintah, Mussopun mengadakan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan politik FDR dan kemudian mengadakan pembaharuan politiknya.⁹⁰

Kedatangan Musso sedikit banyak memang tepat sekali bila ditinjau bahwa dengan itu kondisi dan situasi kaum komunis Indonesia sedang dalam keadaan tidak menguntungkan. Mereka sedang sibuk-sibuknya merealisasikan langkah lanjut guna merebut kunci pemerintahan yang telah beberapa bulan tersingkirkan oleh pemerintahan Hatta, bahkan di beberapa bidang kehidupan komunis terancam. Dengan cepat Musoo dapat menarik simpati kaum komunis Indonesia, Musso kemudian memegang peranan penting dalam menjadi penggerak yang



Musso

⁸⁹Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Lukisan Revolusi Indonesia 1945-1949*, Yogyakarta, 1949, halaman tidak pakai nomor.

⁹⁰Arnold C Brackman, *Indonesian Communism*, Third Printing, Frederick A Praeger Publisher, New York, 1963, hal.81.

melakukan politik baru pada gerakan komunis Indonesia yang sesuai dengan pola-pola yang telah digariskan oleh pimpinan komunis Moskow.⁹¹

Sejak kedatangannya hingga melakukan koreksi, Amir terus menerus mengurung Musso dalam lingkungannya sendiri, sehingga orang-orang di Luar FDR tidak dapat menemui atau berunding dengan Musso secara bebas. Musso terus dikawal oleh pemuda-pemuda Pesindo. Segala keterangan yang diminta oleh Musso untuk mengetahui perkembangan politik di Indonesia hanya diberikan oleh golongan Amir; kaum komunis Tan Malaka seperti Rustam Efendi, Sjamsu Harja Udaja dan lain-lain musuh FDR tidak dapat mengadakan kontak dengan Musso. Memang hal ini tidak perlu, karena kemudian Musso mengeluarkan keterangan bahwa golongan Tan Malaka adalah benar-benar pengikut Trotsky, jadi tidak perlu diajak berunding dan bekerja sama.⁹²

Musso untuk pertama kali tampil di muka umum pada tanggal 20 Agustus 1948 dalam rapat yang diselenggarakan oleh FDR. Dalam rapat tersebut Musso telah menyampaikan pidatonya seperti yang dikutip Harian Revolusioner tanggal 23 Agustus 1948, ia antara lain mengatakan :

Revolusi kita telah disesatkan oleh Soekarno dan Hatta dengan melakukan politik berunding dengan Kolonialisasi Belanda dan Amerika. Renville harus ditentang dan hubungan diplomatik dengan Rusia harus segera diratifikasikan untuk mengimbangi tekanan Belanda dan Amerika terhadap Republik. Revolusi harus dipegang oleh golongan proletar dan bukan oleh golongan borjuis, karena kaum proletarlah yang paling revolusioner dan paling anti imperialis. Kesalahan ini harus segera diperbaiki. Tidak adanya

⁹¹Makmun Salim, *Op.cit.*, hal.83.

⁹²Nuhammad Dimjati, *Op.cit.*, hal.178.

Front Nasional merupakan sebab-sebab kelemahan perjuangan kita, karena itu harus segera dibentuk Front Nasional dimana rakyat dapat ikut serta tanpa terikat oleh keanggutaan suatu partai yang didukung dari bawah dan berakar dalam masyarakat. Kabinet yang sekarang sudah tidak sesuai, karena itu harus segera dibentuk kabinet baru.⁹³

Dengan adanya koreksi Musso, kemudian Amir Sjarifuddin mengatakan pula, antara lain :

“...saya seorang komunis, dan saya mengakui telah menjalankan politik yang salah dan saya berjanji, tidak akan menjalankan politik yang salah lagi dan akan saya perbaiki. Selanjutnya orang bilang, bahwa saya harus digantung, saya tidak takut; kalau saya harus diberikan kepada kaum kolabulator dijamin pendudukan Jepang ini. Kepada penjual beratus-ratus romusha, seperti Somukacho Sjamsu Harja Udaja. Saya akui telah menerima uang dari van der Plas sebanyak 25.000 gulden, tetapi saya jalankan itu karena Komintern telah menganjurkan kepada kami untuk bekerja sama dengan kaum penjajah di dalam front bersama untuk menantang fasisme”.⁹⁴

Pada tanggal 20 Agustus itu juga kemudian FDR mengumumkan, bahwa mereka mengakui dan membenarkan koreksi Musso. Mengenai kesalahan di lapangan politik dikatakan, bahwa secara prinsipil kaum komunis tidak boleh menyetujui perundingan antara Republik dengan Belanda atau negara lain yang akibatnya memberi “*unieverband*” kepada Indonesia. sebab kedudukan semacam itu pada

⁹³Arnold C Brackman, *Op.cit.*, hal.82.

⁹⁴a. Dr.A.H.Nasution, *Op.cit.*, hal.126-127.

b. Pinardi, *Op.cit.*, hal.57.

hakekatnya merupakan jajahan saja. Dengan pakaian baru PKI hanya menyetujui perundingan-perundingan yang memberi hasil meneguhkan kedudukan dan kedaulatan RI. Harus diadakan persatuan kuat seluruh rakyat yang anti Imperialis, yang akan membawa revolusi ke arah kemenangan. Ujud satu-satunya untuk mencapai itu, ialah dibentuknya Front Nasional yang disusun dari bawah dan didukung oleh semua partai serta golongan dan orang-orang yang progresif dan supaya kabinet diubah menjadi Kabinet Front Nasional.⁹⁵

Pada sidang Presidium Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) ke III pada tanggal 22 Agustus 1948 di Yogyakarta, antara lain diputuskan mengakui kesalahan politik anti imperialis yang konsekwen dan mendesak kepada pemerintah untuk mencabut manifesto politik dan berunding atas dasar kedaulatan RI yang penuh.⁹⁶ Juga SOBSI menuduh bahwa di kalangan pemerintah banyak agen Belanda yang akan menyerang Republik, dan Hatta adalah kaki tangan agen-agen itu. Dalam sidang Presidium tersebut SOBSI menuntut :

1. Adanya kemerdekaan bicara, pers dan demokrasi
2. Menuntut agar pemerintah menindak kaum koruptor
3. Menuntut agar diadakannya pertahanan rakyat
4. Hapuskan Perjanjian Linggarjari dan Renville
5. Segera disusun Kabinet Parlementer.⁹⁷

Kedatangan Musso di Indonesia mengakibatkan berubahnya jalur politik partai-partai kiri, di mana pada tanggal 24 Agustus 1948 Politik Biro Central Komite PKI mengeluarkan pula pernyataan sebagai koreksi kesalahan dalam lapangan organisasi di waktu Lampau. Musso mengusulkan

⁹⁵Muhammad Dimjati, *Op.cit.*, hal.174-175

⁹⁶Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Op.cit.*, hal. 279.

⁹⁷Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, *Op.cit.*, hal.15.

supaya tiga partai anggota FDR yaitu: PKI, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia diadakan fusi sehingga hanya ada satu partai saja, yaitu Partai Kelas Buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yaitu PKI.⁹⁸

Sekalipun Partai Buruh dan Partai Sosialis yang dipimpin Amir Sjarifuddin telah berfusi dalam PKI, namun keanggotaan PKI masih dibatasi. Pemimpin-pemimpin PKI waktu waktu itu dengan bersemangat mengikuti garis Stalin, yang mengutamakan disiplin keanggotaan partai.⁹⁹

FDR yang terdiri dari tiga partai yang merupakan front kesatuan dari partai-partai, organisasi bersenjata, organisasi massa dan organisasi buruh yang berhaluan kiri kemudian berfusi menjadi satu dalam PKI pada tanggal 23 Agustus 1948, yang diperkuat oleh tokoh-tokohnya antara lain: Maruto Darusman, Tan Ling Djie, Ngadiman, Sutrisno, Wikana, Suripno, Amir Sjariffudin, Lukaman, Sardjono, Sudisman, Sujoto dan Rushak.¹⁰⁰

Pada rapat tanggal 25 Agustus 1948 kepada Musso diserahkan tugas untuk mengadakan analisa situasi politik di Indonesia pada waktu itu. Sebagai doktrin hasil analisisnya, Musso telah mengeluarkan suatu move yang disebut garis revolusi dengan nama "Jalan Baru Menuju Republik Indonesia". kemudian pada tanggal 30 Agustus Musso diangkat sebagai Ketua PKI untuk melaksanakan garis barunya itu, di mana ia menekankan bahwa tentara harus di bawah pengaruh Partai Komunis.¹⁰¹

Untuk melaksanakan garis politiknya, maka pada tanggal 7 September pemimpin-pemimpin PKI Musso (dikatakan PKI Musso karena sejak tanggal 23 Agustus 1948 partai-partai yang tergabung dalam FDR berfusi ke dalam PKI yang dipimpin oleh Musso, sehingga sejak saat itu tidak lagi disebut PKI Alimin tetapi PKI Musso sekalipun Alimin masih

⁹⁸Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Op.cit.*, hal. 278

⁹⁹Pinardi, *Op.cit.*, hal.44.

¹⁰⁰Yayasan Penerbit Diponegoro, *Op.cit.*,hal.141.

¹⁰¹Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, *Op.cit.*,hal.15-16.

tetap menjadi pemuka PKI, tetapi kedudukannya di bawah Musso), mereka mengadakan perjalanan keliling Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menggelorakan semangat rakyat supaya berdiri di belakang PKI yang sedang menggalang Front Nasional. Rombongan tersebut berangkat dari Yogyakarta dengan disertai beberapa pimpinan komunis seperti: Amir Sjariffudin, Alimin, Wikana, Harjono dan lain-lain.¹⁰²

Dalam tur propagandanya Musso antara lain mengatakan bahwa :

...Proklamasi Kemerdekaan kita telah terdapat kesalahan, di mana kaum poletar dasingkan dari pemerintahan. Karena itu revolusi kita sekarang baru revolusi nasional, belum revolusi sosial, apalagi revolusi komunis. Pimpinan revolusi telah jatuh ke tangan golongan borjouis. Kalau kita mengadakan hubungan diplomatik dengan Rusia bukan berarti kita akan mendirikan Pemerintah Rusia di Indonesia, tetapi untuk mengimbangi tekanan Amerika. Hatta telah mencapai kemerdekaan dengan kompromi dengan Belanda atas desakan Amerika yang berarti bahwa pemerintah kita adalah pemerintahan neo kolonialisme. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk berjuang seperti rakyat Athena dan Tiongkok. Andai-kata umat Islam di Indonesia berjuang dengan keimanannya, mengapa mereka tidak menyatakan perang sabil saja? Kita berjuang terutama untuk menghancurkan kolonialis.¹⁰³

Sementara tokoh-tokoh PKI mengadakan tur propaganda, pada tanggal 9 September 1948 PKI mengirimkan surat kepada Masyumi maupun PNI yang memuat usul supaya segera diadakan pembicaraan untuk mengadakan

¹⁰²Muhammad Dimjati, *Op.cit.*, hal.178.

¹⁰³Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, *Op.cit.*, hal. 16-17.

persatuan nasional tetapi usulan PKI tersebut ditolak oleh Masyumi dalam nota jawabannya tanggal 10 September 1948. Demikian pula Dewan Pimpinan PNI pada tanggal 15 September 1948, PNI menyatakan dengan resmi tidak dapat memenuhi permintaan PKI untuk mengadakan perundingan guna membentuk Front Nasional. Sebagai alasannya dinyatakan, bahwa perundingan itu tidak akan mendapat hasil, selama rasa curiga mencurigai masih tetap terdapat diantara kedua pihak. Ditambah adanya perbedaan besar tentang azas serta taktik perjuangan antara PNI dan PKI.¹⁰⁴

Pada tanggal 9 September 1948 dilangsungkan Pekan Olahraga Nasional (PON) Pertama, yang diadakan di Surakarta. Dari berbagai daerah telah datang orang-orang yang ingin menyaksikan PON tersebut, lebih kurang 13 daerah Republik; baik yang masih diduduki Belanda maupun yang tidak. PON diketahui oleh Pangeran Surjomihardjo. Tepat sehari sesudah PON ditutup dengan resmi, pada tanggal 13 September 1948 mulai jam 13.00 terjadi pertempuran di Srambatan.¹⁰⁵

Pertempuran di dahului oleh peristiwa penculikan pada kedua belah pihak; dua anggota PKI masing-masing Slamet Widjojo dan Padio yang diculik pada tanggal 1 September 1948 dan Letkol Suharman dari TNI Masyarakat diamankan di Tasikmadu, kemudian pada tanggal 7 September 1948 Lima orang dari Divisi Panembahan Senopati juga telah diculik,¹⁰⁶ antara lain; Mayor Ismara Sugeng, Kapten Sartarto, Kapten Supardi, Kapten Suradi dan Letnan Mudjono, karena diduga penculikan tersebut dilakukan oleh kesatuan-kesatuan yang bermarkas di Srambatan; setidak-tidaknya anggota Pasukan Siliwangi telah ikut membantu pelaksanaan penculikan tersebut, maka Panglima Pasukan Panembahan Senopati Letkol Suadi mengeluarkan ultimatum kepada

¹⁰⁴Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Op.cit.*, hal 279.

¹⁰⁵Yayasan Penerbit Diponegoro, *Op.cit.*, hal.264.

¹⁰⁶Prof.Dr.Slamet Muljana, *Op.cit.*, hal.264.

Kesatuan-kesatuan Siliwangi di Surakarta; bahwa apabila perwira-perwira yang diculik itu pada tanggal 13 September 1948 tidak dikembalikan, maka Pasukan Senopati akan mengambil tindakan tegas. Karena sampai batas waktu yang ditentukan belum juga dikembalikan, kemudian Pasukan Senopati memerintahkan Mayor Sutarno beserta beberapa orang pasukan untuk datang ke markas Siliwangi dengan membawa tugas menyelesaikan masalah penculikan tersebut. Tugas Mayor Sutarno tidak dapat terlaksana, sedang suasana semakin tegang sehingga terjadi tembak menembak. Dalam insiden ini Mayor Sutarno dan beberapa orang pengawalnya tewas.¹⁰⁷ Pada hari itu juga telah terjadi penculikan atas diri Dr. Muwardi Ketua Barisan Banteng dari GRR. Beliau diculik sewaktu selesai menjalankan operasi di Rumah Sakit Jebres Surakarta dengan ancaman kekerasan, kemudian dibawa dan dibunuh di suatu tempat tidak jauh dari Surakarta.¹⁰⁸

Supaya tidak terjadi lagi tindakan melanggar dasar negara, terhadap pengacau dari pihak manapun juga pemerintah mengambil tindakan tegas. Orang-orang yang diculik berdasarkan alasan apapun juga pemerintah meminta supaya segera dikembalikan, karena dapat membahayakan negara. Oleh karena itu pada sore harinya Pemerintah segera memerintahkan kepada Jaksa Agung memanggil tokoh-tokoh pimpinan militer dan sipil untuk mengadakan perundingan di Balai Kota, perundingan mencapai kata sepakat dengan dikeluarkannya pengumuman bersama yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Pengumuman Bersama¹⁰⁹

Merdeka !

Berdasarkan atas keputusan rapat pada tanggal 13 September 1948 jam 5 sore di Balai Kota antara: 1.

¹⁰⁷ Yayasan Penerbit Diponegoro, *Op.cit.*, hal.137-138.

¹⁰⁸ Prof. Iwa Kusumasumantri SH., *Op.cit.*, hal. 193.

¹⁰⁹ Yayasan Penerbit Diponegoro, *Op.cit.*, hal.38.

Jaksa Agung, 2. Panglima Pasukan Panembahan Senopati, 3. Overste Sadikin, 4. Residen Surakarta, 5. Walikota, 6. Komandan Militer Kota, 7. CPM Jawa Detasemen III, 8. STC Surakarta – Semarang dan 9. Kepolisian Negara ; maka dengan ini pemerintahan No.3.VC/tgl. 13 - IX - 1948 ditetapkan.

Selanjutnya diperintahkan kepada semua kesatuan untuk mengadakan konsigneering anak buahnya dan dilarang membawa senjata ke Luar asrama mulai dikeluarkannya surat pengumuman ini, hingga ada perintah lebih lanjut. Sedang patroli diadakan oleh CPM, KMK, dan Polisi Negara.

Terhadap mereka yang tidak mengindahkan pengumuman ini, akan diambil tindakan keras.

Solo, tanggal 13 Bulan IX, 1948.

1. Panglima Panembahan Senopati, Letkol Suadi
2. STC Surakarta-Semarang, Letkol Achmad Fadjar
3. Komandan Brigade Siliwangi, Letkol Sadikin
4. KMK Surakarta, Mayor Achmadi
5. Jaksa Agung Tirawinata, SH
6. CPM Detasemen III, Mayor Sudjono
7. Residen Surakarta, P.Tn.Sudiro
8. Walikota Surakarta, P.Tn. Samsuridjal
9. Kepolisian Negara, P.T.n.Saleh Sastronegoro.

Diumumkan di Surakarta

Tanggal, 13 – IX – 1948 jam 19.00

Gubernur Militer Gatot Subroto juga mengeluarkan pengumuman yang ditujukan kepada semua pihak yang saling bermusuhan, setelah diketahui adanya pasukan yang telah mengundurkan diri ke luar kota. Adapun pengumuman tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut :

Pada hari-hari belakangan ini di dalam kota Surakarta terjadi tembak-menembak antara beberapa kesatuan

TNI. Dalam pada itu beberapa kesatuan telah meninggalkan tempatnya semula di dalam kota, hal ini membahayakan keamanan negara. Oleh karena itu Gubernur Militer Daerah Solo; Gatot Subroto ditunjuk oleh Presiden untuk mengembalikan keamanan pemerintahan dalam Pengumuman No.1, agar supaya tembak menembak diantara kita segera dihentikan, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 20 September 1948 jam 12.00. Selain dari pada itu maka komandan-komandan kesatuan yang sedang bermusuhan agar supaya menghadap Gubernur Militer Surakarta di Kantor Karisidenan untuk menyatakan kesetiannya kepada pemerintah RI, dan untuk selanjutnya menerima perintah-perintah dan instruksi guna mengembalikan keadaan seperti biasa. Perintah ini juga berlaku terhadap komandan-komandan yang keluar kota; untuk pasukan-pasukan yang ke luar kota di beri kesempatan sampai pada tanggal 21 September 1948 jam 12.00. Jikalau dalam waktu yang ditentukan ternyata ada komandan yang tidak ingin mengindahkan perintah tersebut di atas, maka mereka dianggap sebagai pemberontak terhadap pemerintah RI dan akan dilakukan tindakan keras terhadapnya menurut undang-undang. Diharap rakyat tenang-tenang.¹¹⁰

Pertentangan ini mulanya berhasil diselesaikan, tetapi kemudian terjadi lagi pertempuran yang lebih hebat. Pasukan Batalyon Rukman dari Siliwangi telah diserang oleh pasukan setempat di Tasikmadu pada tanggal 14 September 1948. Dengan terjadinya serangan ini Mayor Rukman telah diperintahkan oleh Komandan Pasukan Siliwangi untuk membalas serangan tersebut, akan tetapi guna menghindari pertempuran yang lebih luas di antara sesama kita, maka diperin-

¹¹⁰Dr.A.H.Nasution, *Op.cit.*, hal.130-131.

takkan pula agar Batalyon Siliwangi yang lain jangan bergerak. Sementara itu di kota Surakarta sendiri pada waktu yang bersamaan telah terjadi pula penyerangan terhadap Asrama Siliwangi, yang pada saat itu sedang ditempati oleh satu peleton Pasukan Kawal Markas Brigade Sadikin.¹¹¹

Pada keesokan harinya tanggal 15 September 1948 pertempuran meluas ke kota; Sukoharjo, Wonogiri, Pracimantoro, Baturetno dan tempat-tempat lain.¹¹² Menurut laporan yang disampaikan kepada pimpinan tentara, bahwa Siliwangilah yang menjadi sasaran. Penyerangan dilakukan oleh Pasukan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Suadi dan Letkol Sutojo terhadap Pasukan Siliwangi di Srambatan, tetapi dibuat sedemikian rupa seolah-olah yang menyerang ialah Batalyon Slamet Riyadi yang bermarkas di dekat stasiun Balapan. Serangan Pasukan Senopati ini mendapat sambutan hebat dari Pasukan Siliwangi, sehingga mereka mengundurkan diri ke luar kota. Batalyon Slamet Riyadi yang melihat gelagat kurang baik ini telah mengundurkan pasukannya ke zona netral Merapi Merbabu Complex, kemudian Slamet Riyadi menghadap Gubernur Militer Gatot Subroto. Akibat serangan Pasukan Siliwangi Markas Resimen 26 berantakan.¹¹³

Waktu itu Letnan I S.Surjosukanto mendapat radio-gram dari Panglima Besar Sudirman, yang memerintahkan agar Letkol Suadi menghadap di Yogyakarta. Dengan adanya perintah ini Letnan I S.Surjosukanto kemudian menuju Sukoharjo dan terus ke Wonogiri, karena pasukan Letkol Suadi telah melarikan diri ke Wonogiri akibat serangan balasan dari Pasukan Siliwangi. Di Wonogiri berhasil menemui Letkol Suadi lengkap dengan Staf dan Ajudannya di rumah Dr. Dirun di Wonogiri. Datang pula Letkol Suharto yang juga mendapat perintah dari Panglima Besar Sudirman untuk meleraikan Letkol

¹¹¹Jendral. A.H.Nasution, *Op.cit.*,hal 233-234.

¹¹²Yayasan Penerbit Diponegoro, *Op.cit.*,hal.139-140.

¹¹³Dokumen Semdam VII/Diponegoro No.8B (10) II, hasil wawancara dengan Kolonel Purnawirawan S. Surjosukanto, tanggal 23 September 1967.

Suadi. Dalam hal ini Letkol Suadi telah menyatakan kesediannya untuk menghadap Panglima Besar di Yogyakarta. Di Wonogiri diadakan rapat oleh tokoh-tokoh PKI bersama dengan Letkol Suadi. Tokoh-tokoh PKI yang hadir waktu itu tidak menyetujui dengan tindakan Amir Cs yang menggunakan kekerasan terhadap rakyat di daerah Wonogiri, Ponogiri dan Madiun.¹¹⁴ Rupanya selama Pasukan Senopati mengundurkan diri ke daerah Wonogiri, pada waktu itu di Madiun telah diproklamasikan berdirinya Negara Komunis oleh PKI. Dan penyerangan Pasukan Senopati di daerah Surakarta adalah permulaan dari usaha perebutan usaha kekuatan tersebut.

Musso, Amir dan lain-lain pimpinan PKI yang sedang mengadakan tur propaganda ke daerah-daerah; Surakarta pada tanggal 7 September, tanggal 8 tampil dalam rapat umum di Madiun, tanggal 10 dan 11 September 1948 meneruskan tur propogandanya ke Kediri, tanggal 13 ke Jombang, tanggal 14 ke Bojonegoro, tanggal 16 ke Cepu, dan pada tanggal 17 merencanakan berpidato di depan rapat umum di Purwodati. Tetapi rencana tersebut terpaksa dibatalkan, berhubung dengan tiba-tiba Musso Cs mendengar berita perkembangan baru bahwa Sumarono Cs akan mengadakan perebutan kekuasaan tanggal 18 September 1948. Karena itu Musso Cs bergegas menuju ke Madiun.¹¹⁵

¹¹⁴Dokumen Semdam VII/Diponegoro No.8B (10) II, hasil wawancara dengan Kolonel Purnawirawan S. Surjosukanto, tanggal 23 September 1967

¹¹⁵Pinardi, Op.cit., hal.54.

BAB III

PEMBERONTAKAN PKI MUSO DI MADIUN

3.1 PKI Musso Menguasai Madiun

Pada tanggal 18 September 1948 telah tersiar berita bahwa kaum komunis di Madiun telah melakukan perebutan kekuasaan. Berita tentang terjadinya *coup d'etat* tersebut mula-mula disiarkan oleh Harian Murba di Surakarta, malahan jauh sebelumnya harian ini telah mensinyalir bahwa PKI akan segera mengadakan pemberontakan. Tetapi karena pemerintah tidak mengadakan reaksi atas berita tersebut, rakyat masih ragu-ragu menerima kebenaran berita itu. Barulah keragu-raguan rakyat lenyap ketika ada pengumuman resmi dari pemerintah, yang mengumumkan bahwa di kota Madiun oleh dan di bawah pimpinan PKI dengan memakai tenaga salah satu kesatuan brigade TNI di Jawa Timur telah dilakukan penyerangan atas alat-alat kekuasaan negara dan penggantian pemerintah daerah secara tidak syah.¹¹⁶

Sebenarnya bagian intelijen dari Divisi Siliwangi sebelumnya telah mendapat keterangan tentang adanya gerakan

¹¹⁶Muhammad Dimjati, *Sedjarah Perdjuaan Indonesia*, Penerbit Widjaja, Jakarta, 1951, hal, 180

yang bersifat melawan pemerintah bahkan Amir Sjarifuddin pernah pula membujuk seorang Kapten dari Divisi Siliwangi yang secara pribadi dekat dengannya; agar menarik Panglima Divisi Siliwangi Nasution untuk bekerjasama dengan PKI guna menyelamatkan perjuangan.¹¹⁷

Jauh sebelum terjadinya pemberontakan di Madiun, PKI telah mempersiapkan kekuatannya berupa formasi-formasi Biro Perjuangan dan organisasi teritorial yang rapi, lengkap dengan inspektorat-inspektorat serta bagian-bagiannya yang tersebar di pelosok desa. Penyusunan dan penempatan ini adalah dengan menggunakan wewenang Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin, dimana biayanya diambil dari anggaran belanja Kementerian Pertahanan.¹¹⁸

Adapun kesatuan-kesatuan yang telah dipersiapkan untuk melakukan pemberontakan tersebut antara lain: kesatuan yang dipimpin oleh Sumartono (Pesindo). Pasukan Divisi VI Jawa Timur dibawah pimpinan Kolonel Djokosujono dan Letkol Dahlan yang waktu Panglima Divisinya ialah Kolonel Sungkono.¹¹⁹ Juga dari sebagian Divisi Panembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Suadi dan Letkol Sujoto.

Pemberontakan PKI di Madiun tersebut dimulai pada jam 3.00 setelah terdengar tembakan pistol tiga kali sebagai tanda dimulainya gerakan non parlementer oleh kesatuan komunis yang disusul dengan gerakan perlucutan senjata, kemudian kesatuan PKI menduduki tempat-tempat penting di kota Madiun, seperti Kantor Pos, Gedung Bank, Kantor Telepon, dan Kantor Polisi Dalam gerakan ini kesatuan PKI telah melakukan pembunuhan terhadap dua orang pegawai pemerintah dan menangkap empat orang militer. Perebutan kekuasaan ini berjalan lancar, kemudian mereka mengibarkan ben-

¹¹⁷Jendral A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, Jilid II, Seruling Massa, Jakarta, 1971, hal 235-236.

¹¹⁸Jendral A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, Jilid II, Seruling Massa, Jakarta, 1971, hal.16.

¹¹⁹Dr. A.H. Nasution, *Sedjarah Perjuangan Nasional Indonesia*, Mega Book Store, Jakarta, 1966, hal. 131-132.

dera merah di depan Balai Kota. Melalui Radio Madiun, pimpinan pemberontak mengadakan pidato-pidato penyerangan terhadap pemerintah, antara lain dikatakan :

Madiun telah bangkit, saat berevolusi telah dimulai. Pemimpin-pemimpin Republik telah menjual Bangsa Indonesia kepada penjajah Belanda, kaum kolaborator seperti Hatta telah mempergunakan kekuasaan untuk menekan kaum buruh dan tani. Kini Madiun telah bangkit dan rakyat telah melakukan perlucutan senjata terhadap polisi dan tentara. Kaum buruh dan tani telah membentuk pemerintahan baru, kepada kaum buruh dan tani jangan meletakkan senjata sebelum seluruh Indonesia dapat merdeka.¹²⁰

Pasukan-pasukan komunis yang dipimpin oleh Sumarsono, Dahlan dan Djokosujono dengan cepat telah bergerak menguasai seluruh kota Madiun, karena sebagian besar tentara di kota itu tidak mengadakan perlawanan. Disamping itu pertahanan kota Madiun sebelumnya praktis sudah dikuasai oleh Pasukan Brigade 29.¹²¹ Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 07.00 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Pada pagi itu pasukan komunis dengan tanda merah mondar mandir sepanjang jalan. Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah RI. Sudah lama kota Madiun dijadikan pusat gerakan pemuda ; terutama yang tergabung dalam Pesindo. Wikana dari Badan Kongres Pemuda sewaktu Kabinet Amir, turut aktif dalam perebutan kekuasaan ini.¹²²

Setelah menguasai Madiun, Karesidenan Madiun dan tempat-tempat lain; dengan melalui Radio Madiun yang ke-

¹²⁰Arnold C Brackman, *Indonesian Communism*, Third Printing A Praeger Publisher, New York, 1963, page, 93.

¹²¹Pinardi, *Peristiwa Madiun 1948*, Inkopak-Hazera, Jakarta, 1966, hal. 76.

¹²²Prof. Dr. Slametmuljana, *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*, Jilid II, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1969, hal. 164-1965.

mudian disebut Radio Gelora Pemuda, PKI Musso telah menyatakan dirinya sebagai pemerintah dan melakukan serangan dan fitnahan terhadap pemimpin-pemimpin negara RI, antara lain dikatakan :

Soekarno telah memakai revolusi kita sebagai kudaraan untuk menguntungkan diri sendiri, mereka sewaktu pendudukan Jepang telah menjadi quisling-quisling, budak-budak Jepang, tukang jual romusha dan propagandis heiho,. Lebih dari dua juta wanita Indonesia telah menjadi janda, lantaran laki-lakinya menjadi romusha. Lupakah Soekarno, bahwa ia di Solo telah memakai pengkhianat Trotskyist untuk melakukan pembunuhan dan teror terhadap orang-orang komunis. Lupakah Soekarno Cs, bahwa ia telah membantu dan mensyahkan kejahatan-kejahatan Siliwangi dan kaum teroris itu? Apakah maksud Soekarno Cs ex pedagang romusha, telah melepaskan penjahat-penjahat Trotsky Malaka Cs yang telah mencoba merobohkan kepresidenannya? Dalam tiga tahun ini teranglah bahwa Soekarno-Hatta ex *romusha verkopers, quisling*, telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda, Inggris dan sekarang juga akan menjual rakyat Indonesia kepada Imperialis Amerika. Bolehkah orang-orang semacam itu bilang ; bahwa mereka mempunyai hak yang syah untuk memerintah Republik kita?¹²³

Sejak dimulainya pemberontakan, kaum komunis telah melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap para tawanan dan lawan politiknya; terhadap komandan-komandan, kepala-kepala kesatuan yang mereka anggap sebagai lawannya. Dari sejumlah komandan atau kepala-kepala kesatuan yang telah mereka bunuh, hanya Kepala Seksi III Letnan

¹²³Dr. A.H. Nasution, *Op.cit.* hal 133-134

Kolonel Kartidjo yang selamat, lainnya mereka bu-nuh.¹²⁴

Menurut berita Antara, setelah pasukan komunis menguasai Madiun kemudian diadakan penanda tangan serah terima jabatan pemerintahan, antara lain oleh Letkol Sumantri, Wakil Presiden Indarto, Walikota Purbo, Ketua SOBSI Madiun, Ketua partai Sosialis Madiun Surodarnodjo, Ketua Komisariat Daerah Pesindo dan Serikat Rakyat Singomentolo. Residen Samadikun telah pergi ke Yogyakarta,¹²⁵ rupanya telah mengetahui adanya gelagat yang tidak baik telah meninggalkan posnya dan pergi ke Yogyakarta. Jabatan yang lowong itu kemudian diisi oleh orang-orang PKI Musso setelah berhasil merebut kekuasaan di Madiun.¹²⁶

Sebagai bukti bahwa pemberontakan tersebut telah direncanakan sejak lama, ialah dari dokumen yang dapat diketemukan dari kamar Amir Sjarifuddin. Dimana dalam dokumen tersebut FDR/PKI antara lain merencanakan :¹²⁷

1. Pasukan yang ada dibawah pengaruh atau pro PKI Musso ditarik mundur dari medan pertempuran dan ditempatkan di daerah strategis bagi mereka.
2. Daerah Madiun dijadikan daerah gerilya sektor yang kuat, untuk melanjutkan perjuangan "op lang termijn"
3. Daerah Solo dijadikan "*Wild West*" agar perhatian umum tertuju ke sana.
4. Di samping tentara resmi, didirikan tentara illegal.
5. Diadakan demonstrasi besar-besaran, kalau perlu dengan kekerasan.

¹²⁴a. *ibid.*hal. 132.

b. Pinaridi, *Op.cit.*, hal. 79.

¹²⁵a. Muhammad Dimjati, *Op.cit.*, hal 180.

b. Pinaridi, *Op.cit.*, hal. 94.

¹²⁶ Drs. Moela Marboen, *Gerakan Operasi Militer I Untuk Menumpas Pemberontakan Madiun*, Mega Book Store, Jakarta, 1965, hal. 6.

¹²⁷ Dr. A.H. Nasution. *op.cit.*, hal.131.

Jelas dari isi dokumen tersebut, bahwa kejadian di Surakarta yang berupa demonstrasi, pemogokan dan adanya penyerbuan Markas Siliwangi di Srambatan dengan pemberontakan Madiun yang kemudian timbul, tidaklah berdiri sendiri. Tetapi merupakan suatu rangkaian gerakan PKI dalam usahanya menjatuhkan pemerintahan Soekarno-Hatta. Madiun dijadikan pusat pemerintahan dengan mengadakan penangkapan-penangkapan dan pembunuhan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan orang-orang yang mereka ang-gap sebagai lawan politiknya.

Di Ngawi pada umumnya rakyat tidak mengerti apa yang terjadi, rentetan tembakan bagi rakyat di sana merupakan hal yang biasa, Karena sebelumnya sering diadakan latihan oleh tentara. Di pojok alun-alun di sebelah Timur, di mana biasanya ditempatkan pengumuman-pengumuman pemerintah, pada waktu itu telah ditempelkan pengumuman baru yang antara lain berbunyi :

“... Tentara Merah telah mengambil kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, supaya kegiatan berjalan seperti biasa. Siapa yang tidak mematuhi akan dihukum”. Tiap-tiap persimpangan dijaga oleh Tentara Merah, yang berbaju merah atau berbaju hijau dengan memakai pita merah di lengan. Mereka kelihatan hilir mudik di mana-mana. Setelah mendengar bahwa PKI Musso telah mengambil alih kekuasaan, masyarakat gempar. Lebih-lebih setelah mendengar berita bahwa Komandan Distrik Militer dibunuh, tangsi-tangsi Polisi Negara diserbu dan diduduki PKI Musso, telah dilakukan penangkapan-penangkapan terhadap Kepala-kepala Jawatan Pemerintah setempat dan terhadap tokoh-tokoh partai politik lawannya.¹²⁸

¹²⁸Drs. Moela Marboen, *Op.cit.*, hal. 6-7.

Di Ponorogo, berkat taktik yang dilakukan oleh pasukan yang dipimpin oleh Mayor Sukowati; kerusuhan dan pembunuhan tidak terjadi sekejam di kota-kota lain di mana PKI Musso sempat berkuasa. Sewaktu pimpinan Tentara Merah meminta kepada anak buah Mayor Sukowati agar mengadakan perlawanan kepada TNI yang datang dari Utara, dengan berpura-pura tunduk serta menerima instruksi dari pucuk pimpinan Tentara Merah (PKI), mereka menerima senjata-senjata yang kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat untuk turut bersama TNI membela dan menegakan Negara.¹²⁹

Kaum pemberontak dapat menguasai jalan kereta api jurusan Kaliyoso-Purwodadi dan mengadakan pemeriksaan secara ketat terhadap penumpang-penumpang kereta api ; orang-orang yang dicurigai ditahan, bahan makanan yang akan diangkut ke Surakarta dilarang. Pemberontak berhasil menguasai daerah Sukoharjo dan Wonogiri. Musso-Amir sendiri pada tanggal 21 telah mengatakan, bahwa daerah-daerah tersebut sebagai Daerah Front Nasional.¹³⁰

Dalam usaha melemahkan kekuasaan pemerintah dan pasukan TNI, disamping mengadakan perusakan jembatan-jembatan, gedung-gedung penting dan pembakaran bahan-bahan makanan ; ternyata pasukan komunis telah berusaha pula untuk mengadakan blokade ekonomi terhadap pemerintah RI. Blokade ekonomi tersebut dilakukan dengan jalan melarang pengangkutan bahan makanan ke wilayah Republik, terutama ke daerah Surakarta dan Yogyakarta yang merupakan kota-kota pusat pemerintahan RI. Dengan mengadakan perusakan terhadap gedung-gedung penting, jembatan-jembatan dan alat-alat komunikasi dimaksud untuk menahan gerakan TNI.

Sejak terjadi pertempuran di Surakarta antara Pasukan Siliwangi dan Pasukan Panembahan Senopati yang

¹²⁹*Ibid*, hal. 8.

¹³⁰Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28), Surat kabar *Suara Merdeka*, tanggal 23 September 1948.

dipimpin oleh Letkol Suadi dan Letkol Sujoto yang merupakan awal pertempuran terjadinya pemberontakan, dimana pasukan Letkol Suadi dan Sujoto dapat dipukul mundur ke daerah Wonogiri dan sekitar Surakarta ; Panglima Besar Sudirman menugaskan Letnan I S. Surjosukanto untuk memanggil Letkol Suadi agar menghadap di Yogyakarta. Mendapat tugas ini kemudian Letnan I S. Surjosukanto menemui Letkol Suadi di Wonogiri, dan disana sempat mengikuti rapat yang diadakan oleh tokoh-tokoh PKI. Oleh Letkol Suadi Letnan I S. Surjosukanto diperintahkan untuk berangkat terlebih dahulu guna menyampaikan berita kepada Panglima Besar Sudirman, bahwa Letkol Suadi sedang mencari jalan untuk meloloskan diri dari kejaran Pasukan Siliwangi.¹³¹ Dalam perjalanan ke Yogyakarta Letnan I S. Surjosukanto sempat ditahan oleh pasukan PKI di Wuryantoro dan Pracimantoro yang berbatasan dengan Yogyakarta, tetapi dapat lolos. Ketika sampai Wonosari ditahan oleh KDM setempat yang waktu itu dipimpin oleh Mayor Seloadi. Sebagai utusan dari Panglima Besar Sudirman, kemudian Letnan I S. Surjosukanto diantar ke Markas Panglima Besar di Yogyakarta yang waktu itu diterima oleh Kapten Supardjo dan kemudian melaporkan kedatangannya kepada Letkol Suharto di rumahnya, kemudian terus kembali ke Surakarta.¹³²

Selama tanggal 18-25 September pasukan PKI Musso dapat menduduki Kabupaten Sukoharjo, yang dipimpin oleh Mayor Digdo, Letkol Iskandar dan Letkol Jadau sebagai bezeting komandannya ialah Suwitojo. Pada tanggal 23 September 1948 PKI Musso telah mengadakan pemecatan kepala-kepala desa dan mengadakan pemeriksaan uang kas, berpuluh-puluh ton minyak dan bahan makanan telah diangkat ke jurusan Timur, juga uang sebanyak Rp 336.304,01 dari

¹³¹Karena waktu itu Panglima Besar Sudirman belum tahu, bahwa pertempuran terjadi di Surakarta adalah permulaan dari Pemberontakan Madiun.

¹³²Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 8 B (10), hasil wawancara dengan Kolonel Purnawirawan S. Surjosukanto tanggal 23 September 1967.

suatu jawatan dapat dirampas dan dibawa lari.¹³³ Pasukan komunis tidak lama menduduki daerah-daerah tersebut, karena tak lama kemudian pasukan TNI telah dapat merebut kembali daerah-daerah yang diduduki. Selama PKI berkuasa di daerah-daerah tersebut., PKI telah melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap rakyat yang menentang-

nya. Di daerah-daerah Madiun, Ngawi, Ponorogo, Purwodadi dan lain-lain, PKI juga melakukan penangkapan dan pembunuhan kejam. Dari kalangan agama maupun pengikut TNI banyak yang dibunuh. Kepada rakyat di daerah-daerah PKI menyiarkan berita bohong, dikatakan bahwa yang ditahan adalah Belanda. Sehingga pemuda yang tidak tahu-menahu duduk persoalannya, telah ikut terseret dan membantu kaum pemberontak. Oleh karena itu pemuda-pemuda yang tergabung dengan PKI Musso kalau berhadapan dengan pasukan-pasukan TNI tidak langsung menyerang, tetapi mengajukan pertanyaan terlebih dahulu: "Pundi Landane Mas?" ("Mana Belandanya Bung?"). Jelaslah banyak pemuda-pemuda dan rakyat setempat yang sebenarnya tidak mengetahui untuk apa dan untuk siapa mereka mempertaruhkan jiwanya. PKI Musso telah menyalahgunakan kepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya. Tindakan yang penuh tipu muslihat dan pembunuhan keji telah menimbulkan kebencian dan amarah rakyat, sehingga hilanglah simpati rakyat terhadap PKI.¹³⁴

Pada hari-hari pertama pemberontakan, radio pemberontak sangat agresif dalam berpropaganda, akan tetapi pada hari-hari berikutnya ketika menyadari bahwa pemberontakan mereka tidak mendapat dukungan dari rakyat ; ditambah pasukan-pasukannya terdesak disegala front, radio pemberontak mulai menyiarkan suara lunak, malah kemudian

¹³³Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28), Surat kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 28 September 1948.

¹³⁴Dr. A.H. Nasution, *Op.cit.*, hal. 136.

mereka mengatakan bahwa aksi Madiun itu bukan pemberontakan, tetapi hanya koreksi saja dan mereka masih menghormati bendera Merah Putih dan menjunjung Undang-Undang Dasar RI. Namun, pembelaan itu tidak menolong ; karena ucapan berlainan sekali dengan perbuatan. Perbuatan mereka sejak tanggal 18 September dan hari-hari berikutnya adalah suatu perbuatan terror dan pemberontakan,¹³⁵ juga mereka telah memproklamasikan berdirinya pemerintahan baru dengan bendera Merah dan mengganti semua pegawai-pegawai yang menentanginya.

3.2 Reaksi Pemerintah Terhadap Pemberontakan

Ketika terdengar berita di Madiun terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI Musso, maka dengan segera pemerintah mengadakan Sidang Kabinet Lengkap pada tanggal 19 September 1948 yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Hasil sidang tersebut mengambil keputusan antara lain ; bahwa Peristiwa Madiun yang digerakan oleh FDR/PKI adalah suatu pemberontakan terhadap Pemerintah dan mengadakan instruksi kepada alat-alat Negara dan Angkatan Perang untuk memulihkan keamanan Negara. Memberikan kuasa penuh kepada Jendral Sudirman untuk melaksanakan tugas pemulihan keamanan dan ketertiban kepada keadaan biasa di Madiun dan daerah-daerah lainnya.¹³⁶

Kemudian pada malam harinya tanggal 19 September 1948, Presiden, Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman, Menteri Hamengku Buwono IX dan Panglima Besar Sudirman, mengucapkan pidato kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato tersebut antara lain Presiden mengatakan bahwa :

Di kota Madiun pada tanggal 18 September oleh dan

¹³⁵ Muhammad Dimjati, *Op.cit.*, hal . 184.

¹³⁶ Dr. A.H. Nasution, *Op.cit.*, hal. 133.

dibawah pimpinan PKI, bekas FDR dengan memakai tenaga kesatuan dari salah satu brigade di Jawa Timur telah melakukan penyerangan terhadap alat-alat Negara dan penggantian pemerintah daerah secara tidak sah dengan kekerasan senjata.¹³⁷

... bahwa tentara yang sejak dulu berada di pedalaman, oleh PKI telah diadu domba dengan tentara hijrah istimewa terhadap tentara Siliwangi. Dan dengan tegas disini dikatakan, bahwa Jadau dan Sujoto telah dipecat dari tentara. Di mana dalam usahanya untuk merebut kekuasaan pemerintah RI digunakannya kesatuan dari Brigade 29 bekas kelas-karan yang dipimpin oleh Letkol Dahlan. Karena Dahlan telah mengkhianati Negara dan melanggar sumpah tentara, maka Dahlan pun dipecat dari tentara.¹³⁸

Sedang Menteri Negara Hamengku Buwono dalam pidatonya antara lain mengatakan :

...kepada pemimpin dari semua partai dan badan-badan perjuangan agar supaya menghentikan permusuhan, dan membasmi pengacau-pengacau Negara. Rakyat kita membutuhkan pimpinan yang sehat dan bijaksana. Diharap kepada rakyat supaya membantu segala usaha dan tindakan pemerintah untuk menyelamatkan negara dan memberantas pengacau-pengacau yang diperalat oleh musuh untuk menghancurkan negara kita.¹³⁹

Dengan adanya berita tentang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tersebut, van mook segera datang ke

¹³⁷ Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Republik Indonesia Daerah Istimewa Daerah Djogyakarta*, Yogyakarta, 1953, hal. 283.

¹³⁸ Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28), Surat kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 20 September 1948.

¹³⁹ Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Op.cit.*, hal. 188.

Jakarta dan mengatakan kepada pers bahwa Pemerintah Belanda bersedia dan sanggup membantu Republik untuk menindas pemberontakan PKI. Tetapi oleh Hatta dikatakan ; bahwa pemerintah RI tidak mengizinkan campur tangan dari pihak asing dalam urusan yang terjadi dalam daerah Republik. Tentang pemberontakan Madiun dikatakannya, bahwa itu adalah urusan dalam negeri dan akan diselesaikan oleh Angkatan Perang RI sendiri.¹⁴⁰

Karena dalam setiap pertempuran yang terjadi antara pasukan pemberontak dan pasukan TNI yang kemudian timbul, pasukan pemberontak selalu mengalami kekalahan. Pada tanggal 22 September 1948 jam 19.00, Djokosujono menyampaikan seruan melalui Radio Gelora Pemuda, mengajak komandan-komandan territorial Jawa Timur untuk mengadakan perundingan. Tetapi ditegaskan, bahwa Djokosujono telah dipecat oleh Presiden dan dianggap sebagai pemberontak. Pembersihan dalam tubuh Angkatan Perang dari anasir-anasir yang membahayakan dilakukan. Juga pemerintah telah memecat Kolonel Djokosujono, Kolonel Ir. Sakirman, Letkol Martono Brotokusumo, Mayor Anas, Mayor Pramudji, Mayor Usman dan Kapten Musbah, sedangkan dalam usaha untuk mengembalikan keamanan di Madiun, Presiden telah menyatakan Jawa Timur sebagai Daerah Militer Istimewa dan telah mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Gubernur Militer Jawa Timur.¹⁴¹

Di Yogyakarta yang menjadi Ibu Kota RI tidak sampai terjadi suatu insiden, karena sebelum Presiden mengucapkan pidatonya ; pemerintah telah melakukan tindakan preventif terlebih dahulu sehingga pemberontakan tidak sampai menjalar ke Yogyakarta. Pemimpin-pemimpin PKI di daerah Yogya telah ditangkap. Dalam operasi penangkapan tersebut berhasil ditangkap : Tan Ling Djiw (Sekretaris Jendral PKI) di

¹⁴⁰ Muhammad Dimjati, *Op.cit.*, hal. 188.

¹⁴¹ a. Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28), Surat kab ar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 23 September 1948.

b. Pinardi, *Op.cit.*, hal. 105.

rumahnya di Jalan Dieng No.1 Yogyakarta, Abdulmadjid, dan Ngadiman. Tidak berhasilnya pemberontakan Madiun meluas ke Yogyakarta juga disebabkan karena sikap Komandan Brigade 10 yang tegas tidak dapat dipengaruhi oleh PKI untuk mengadakan aksi terhadap Divisi III/Siliwangi, sehingga aksi memecah belah angkata tentara di daerah Yogyakarta tidak berhasil.¹⁴²

3.3 Reaksi Pemuda Pelajar Terhadap Pemberontakan

Dengan adanya seruan presiden yang dilakukan melalui radio tentang timbulnya Pemberontakan PKI di Madiun dan anjuran agar rakyat ikut membantu pemerintah dalam usaha pengembalian keamanan dan pembersihan terhadap kaum pemberontak telah mendapat sambutan dari rakyat. Keragu-raguan yang selama ini timbul di kalangan rakyat dapat dihilangkan dan dengan serentak rakyat yang belum terikat oleh PKI telah membantu pemerintah dalam usaha pengamanan tersebut. Ditinjau dari segi psikologis memang sukar bagi kaum pemberontak untuk mencari pengikut baru di luar kalangan FDR; karena koreksi Musso dilaksanakan tidak konsekuen. Orang-orang yang dianggap menjalankan politik yang salah tidak segera disingkirkan, malah sesudah diadakan koreksi mereka menduduki jabatan yang lebih tinggi. Sedangkan kebanyakan rakyat terutama pengikut PNI, Masyumi dan Kaum Komunis Tan Malaka menginginkan orang-orang FDR yang bersalah itu disingkirkan. Koreksi Musso terhadap kesalahan FDR/PKI pada hakekatnya melindungi mereka yang salah. Inilah kelemahan koreksi Musso, sehingga pemberontakan di Madiun tidak mendapat sambutan dari segenap rakyat, malah menimbulkan berbagai kebencian dari berbagai pihak. Sebab seolah-

¹⁴² Yayasan Penerbit Diponegoro, *Sedjarah TNI Angkatan Darat KO dam VII, Sirnaning Jakso Katon Gapuraning Ratu*, Semarang, 1968, hal. 145-146.

olah reaksi tersebut hanya dipakai untuk menolong prestise pemimpin-pemimpin FDR saja.¹⁴³

Demi mendengar bahwa di Madiun telah terjadi pemberontakan yang dipimpin dan dilakukan oleh PKI, maka pada malam harinya telah dilakukan penangkapan serentak di berbagai daerah ; termasuk di daerah Yogyakarta terhadap pemimpin-pemimpin FDR/PKI. Kesatuan-kesatuan yang sejak semula menjadi pengikut Amir telah dilucuti, sehingga pemberontakan PKI Musso di Madiun tidak menjalar ke semua daerah Republik, tetapi hanya di daerah yang memang sudah sejak lama berada di bawah pengaruh FDR. Daerah-daerah tersebut antara lain: Cepu, Blora, Purwodari, Ngawi, Ponorogo dan lain-lain.

Perlucutan senjata terhadap pengikut-pengikut PKI di Yogyakarta dapat berjalan lancar. Pasukan-pasukan PKI yang berada di daerah Yogyakarta telah dapat dilucuti, yang terakhir adalah pasukan Latief dari Padokan. Kemudian para pengikut PKI yang ditangkap tersebut diserahkan kepada KMK yang dipimpin oleh Pranoto.¹⁴⁴

Demikianlah perlucutan senjata di Yogyakarta dapat berjalan dengan lancar, tanpa menimbulkan pertumpahan darah, karena masyarakat dan pemimpin militer beserta anak buahnya banyak yang mendukung pemerintah.

Pada tanggal 19 September 1948 Dr. Sukiman Pimpinan Partai Masyumi menyerukan kepada para pemuda dan semua Umat Islam supaya berdiri di belakang pemerintah dan membantu pemerintah dalam membasmi kaum pemberontak. Dari Partai Sosialis Sjahrir juga telah mengeluarkan maklumat yang menentang pemberontakan PKI Musso tersebut, dan menegaskan bahwa Peristiwa Madiun adalah suatu gerakan kontra-revolusi.¹⁴⁵

¹⁴³Muhammad Dimjati, *Op.cit.*, hal. 182.

¹⁴⁴Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28), hasil wawancara dengan Brigjen Kas Kodam VII/Diponegoro tanggal 4 September 1967 oleh Team Sejarah Kodam VII/Diponegoro.

¹⁴⁵Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Detik dan Peristiwa 17*

Tindakan Ketua Partai Masyumi yang tegas itu mendapat sambutan dari cabang-cabang Partai Masyumi di daerah-daerah, seperti yang terjadi di Purwodari. Oleh Ketua Cabang Partai Masyumi setempat segera diadakan rapat yang mengambil suatu keputusan; bahwa Partai Masyumi berdiri di belakang pemerintah dan menentang pihak yang akan menjatuhkan Republik.¹⁴⁶

Di Madiun sendiri pemberontakan PKI tidak mendapat dukungan dari seluruh rakyat, hal ini terbukti dengan adanya reaksi spontan dari para pemuda pelajar yang tergabung dalam TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar), TGP (Tentara Geni Pelajar) ataupun TP (Tentara Pelajar), serta pelajar-pelajar lainnya, baik yang tergabung dalam suatu organisasi maupun yang tidak. Mengetahui bahwa pemuda pelajar menentang politiknya, maka pada tanggal 15 September 1948 jam 15.00 asrama TRIP diserbu oleh satu peleton anggota Pesindo dengan maksud untuk melucuti para pemuda anggota TRIP. Dalam peristiwa perlucutan senjata tersebut seorang pemuda pelajar bernama Muljadi telah diserang dan ditusuk dengan bayonet hingga tewas. TRIP berhasil dilucuti, sedang para pemimpinnya sebanyak 4 orang ditangkap.¹⁴⁷

Kejadian ini ternyata tidak lain hanya sampai disini. Kekejaman anggota-anggota Pesindo yang di luar batas perikemanusiaan itu menyebabkan amarah para pemuda. Sejak peristiwa itu para pelajar mendirikan organisasi yang diberi nama Patriot Anti Musso (PAM) yang bertujuan merobohkan pemerintahan Musso. Dengan berbagai jalan mereka berusaha menjaga jangan sampai terjadi pengrusakan terhadap bangunan-bangunan penting oleh kaum pemberontak. Karena itu PKI Musso berusaha mempengaruhi para pemuda pelajar

Agustus 1945 – 23 Januari 1950, Yogyakarta, 1950, hal. 43.

¹⁴⁶Djawatan Penerangan Propinsi D jawa Tengah, *Republik Indonesia Propinsi Djawa Tengah*, Semarang, 1952, hal. 45.

¹⁴⁷Dinas Sedjarah Militer Angkatan Darat, *Peranan TNI Angkatan Darat Dalam Perang Kemerdekaan (Revolusi Fisik 1945-1950)*, Bandung, 1965, hal. 140-141.

agar memihak kepadanya. Akan tetapi usaha PKI tersebut gagal, sehingga keadaan bertambah meruncing. Dengan terang-terangan para pemuda menyatakan dirinya tetap taat kepada pemerintah RI. Tanpa menghiraukan bahaya yang mengancam jiwanya, para pemuda pelajar itu dengan penuh keberanian menempelkan plakat-plakat di setiap pelosok kota yang bertepatan anti Musso. Karena dianggap membahayakan, sekali lagi pihak pemberontak berusaha menarik simpati para pelajar dengan menyelenggarakan rapat pada tanggal 27 September 1948. dalam rapat tersebut Residen PKI Abdulmutalib memberi janji-janji muluk kepada kurang lebih 6000 pelajar yang hadir pada waktu itu. Ia menjanjikan akan membebaskan uang sekolah bagi pelajar Sekolah Rakyat dan Sekolah lanjutan Pertama. Sedangkan para murid yang putus hubungan dengan orang tuanya akan mendapat jaminan penuh serta janji-janji lainnya. Tetapi semua janji tersebut dengan spontan ditolak oleh para pemuda pelajar, bahwa mereka tidak membutuhkan semua itu, bahkan mereka menuntut agar Muljadi diganti. Karena rapat tidak mencapai hasil yang diharapkan, serta melihat suasana semakin runcing, maka rapat kemudian dibubarkan.¹⁴⁸

Selesai rapat para pemuda beramai-ramai pergi ke makam Muljadi dan di sana bersama-sama bernyanyi "Temanku Pahlawan". Dalam perjalanan pulang jika berpapasan dengan mobil mereka meneriakan "...Dum...Dum", kata sindiran untuk pembagian yang tidak adil oleh PKI Musso. Seorang pengendara mobil setelah dekat dengan Markas Tentara Pesindo kemudian menghentikan mobilnya dan memberi aba-aba kepada Markas Pesindo tersebut, sehingga segerombolan pemuda bersenjata senapan mesin dan senjata-senjata lain ke luar dari asrama dan mengarahkan laras senapannya ke arah para pelajar. Tetapi para pelajar tidak gentar menghadapi ancaman tersebut; bahkan dengan penuh keberanian serta dengan nada mengejek menantang mereka "...

¹⁴⁸Dinas Sejarah Militer Angkatan darat, *Loc.cit.*

kalau berani satu lawan satu". Pasukan pemberontak itu ternyata tidak berani berbuat apa-apa.¹⁴⁹

Tidak semua pelajar di Madiun menentang pemberontakan Musso tersebut, ada pula beberapa anggota TRIP Madiun seperti Alex Legowo, Sunarjo dan Surjo telah dapat dipengaruhi oleh propaganda PKI. Sehingga ketika PKI berkuasa mereka berkhianat pada perjuangan para kawan-kawannya. Alex Legowo dan Sunarjo kemudian ditangkap oleh anak buah mayor Sukowati, oleh Mayor Sukowati yang waktu itu menjabat sebagai Komandan STC Madiun; kedua pemuda tersebut diserahkan kepada pimpinan TRIP Madiun Sudarto. Setelah diadakan pemeriksaan, terbukti bahwa kedua pemuda tersebut selain melarikan diri dari kesatuannya, juga membawa lari beberapa pucuk senjata untuk dibawa bergabung dengan pasukan PKI. Kedua tawanan tersebut oleh pimpinan TRIP di Madiun dijatuhi hukuman mati, sedangkan pelaksanaan hukuman itu dilakukan oleh kawan-kawannya sendiri dari kesatuan TRIP di desa Kretek Dungus, di luar kota Madiun.¹⁵⁰

¹⁴⁹*Ibid*, hal 145-146.

¹⁵⁰Pinardi, *Op.cit.*, hal. 101-102.

BAB IV

GERAKAN PENUMPASAN PKI MUSSO

4.1. Gerakan Operasi Militer Terhadap PKI Musso

Setelah presiden memberi perintah kepada Angkatan Perang untuk segera mengembalikan keamanan dengan segera diadakan penangkapan terhadap orang-orang yang membahayakan negara dan diadakan penggerebegan tempat-tempat yang dianggap perlu. Supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik, Markas Besar Angkatan Perang segera menetapkan dan mengangkat Kolonel Sungkono Panglima Divisi VI Jawa Timur sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur yang mendapat tugas menggerakkan pasukan dari arah timur. Karesidenan Madiun untuk menumpas Pemberontakan PKI Musso dan mengamankan kembali seluruh Jawa Timur dari anasir pemberontak. Setelah mendapat perintah tersebut Kolonel Sungkono segera memerintahkan Brigade Surachmad bergerak menuju Madiun. Pasukan tersebut dipimpin oleh Mayor Jonosewojo yang terdiri atas Batalyon Sabirin Muchtar bergerak menuju Trenggalek terus ke Ponorogo, Batalyon Gabungan Pimpinan Mayor Sabaruddin bergerak melalui Sawahan menuju Dungus dan Madiun, Batalyon Sunarjadi bergerak melalui Tawangmangu, Sarangan, Plaosan bergerak Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel

Sadikin.¹⁵¹

Untuk tugas operasi ini Divisi Siliwangi mengerahkan kekuatan 8 Batalyon, yaitu :

1. Batalyon Achmad Wiaranatakusumah
6. Batalyon Lukas yang menggantikan Batalyon Umar
7. Batalyon Daeng
8. Batalyon Nasuhi
9. Batalyon Kusno Utomo. Letkol Kusno Utomo memegang dua batalyon dan menjabat sebagai Kepala Staf Brigade.
10. Batalyon Sambas, yang kemudian diganti oleh Batalyon Darsono
11. Batalyon A. Kosasih
12. Batalyon Kemal Idris

Di samping itu juga Pasukan Panembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Slamet Ryadi, Pasukan Tentara Pelajar yang dipimpin oleh Mayor Achmadi dan Pasukan-pasukan dari Banyumas yang dipimpin oleh Mayor Surono.¹⁵²

Batalyon Kemal Idris dan Batalyon A. Kosasih yang didatangkan dari Yogyakarta bergerak ke Utara dengan tujuan Pati. Batalyon Daeng bergerak ke Utara dengan tujuan Cepu, Blora, Batalyon Nasuhi dan Batalyon Achmad Wiranatakusumah bergerak ke Selatan dengan tujuan Wonogiri dan Pacitan. Batalyon Darsono dan Batalyon Lukas bergerak ke Madiun. Sedangkan Pasukan Panembahan Senopati bergerak ke Utara, Pasukan Tentara Pelajar yang dipimpin oleh Mayor Achmadi bergerak ke Timur menuju Madiun melalui Sarangan.¹⁵³

Maruto Nitimiharjo dari Partai Rakyat yang telah di-

¹⁵¹Dr. A.H. Nasution, *Sedjarah Perjuangan Nasional Dibidang Bersendjata*, Mega Book Store, Jakarta, 1966, hal. 135.

¹⁵²Yayasan Penerbit Diponegoro, *Sedjarah TNI Angkatan Darat Kodam VII/Diponegoro, Sirnaning Jaks o Katon Gapuraning Ratu*, Semarang, 1966, hal. 145.

¹⁵³*Loc.cit.*

tinggalkan oleh partainya, S.M. Abidin dari Partai Bangsa Indonesia dan Mr. Kasman menganjurkan ; hendaknya tindakan-tindakan pemerintah ini bukan dimaksud untuk mengencet aliran komunis, melainkan ditujukan semata-mata kepada orang yang mengacau. Menurut S.M. Abidin ; tidak seluruh anggota FDR bersalah dan tidak hanya FDR saja yang bersalah, dan ia meminta supaya kebebasan partai jangan dirintangi, sedangkan Wardoyo mengatakan bahwa ia belum yakin akan adanya gerakan merobohkan pemerintah (maksudnya pemberontakan-pen.), tetapi ia mengakui bahwa keadaan memang genting.¹⁵⁴

Dalam pemberontakan Madiun terlihat pula beberapa Batalyon Angkatan Darat ex Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI) di Surakarta dan Madiun. Terhadap oknum-oknum yang terlibat oleh pimpinan TLRI diambil tindakan tegas dengan mengerahkan kesatuan-kesatuan TLRI dari daerah Temanggung (sic) CA IV, dari daerah Juana CA V dari Kediri dan Lodaya CA I dan CA VI¹⁵⁵ untuk bekerjasama dengan Angkatan Perang lainnya menumpas pemberontakan.¹⁵⁶ Berkas TLRI di Surakarta yang tersangkut pemberontakan adalah kesatuan-kesatuan yang dipimpin oleh Letkol Sujoto dan Letkol Jadau yang tergabung dalam pasukan Panembahan Senopati.

Pasukan yang dipimpin oleh Letkol Kusno Utomo bergerak ke Selatan untuk mengejar Pasukan Jadau dan Sujoto

¹⁵⁴Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Republik Indonesia Daerah Istimewa Djogjakarta*, Yogyakarta, 1953, hal. 289.

¹⁵⁵CA singkatan dari Corps Armada yang dibentuk pada awal tahun 1948, di seluruh Pulau Jawa dibentuk 6 Corps Armada, yakni :

1. CA I di Blitar di bawah pimpinan Mayor Cetero Kuswardjo. 2. CA II di Cilacap dipimpin Letkol Wagiman. 3. CA III di Cirebon dipimpin Mayor Tirta-atmadja. 4. CA IV di Pekalongan dipimpin Mayor R. Suhadi, 5. CA V di Juana dipimpin Mayor Sardjuno, 6. CA VI di Tulungagung dipimpin Kolonel Rais Sastrogondo, vid. Dinas Sejarah TNI-AL *Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Periode Perang Kemerdekaan 1945-1950*, 1973, hal. 178.

¹⁵⁶Sudono Jusuf, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971, hal. 45.

yang melarikan diri ke daerah Wonogiri sejak terjadinya pertempuran dengan Pasukan Siliwangi, sedang pasukan yang dipimpin oleh Letkol Slamet Ryadi bergerak ke Utara Surakarta. Untuk menghambat pasukan TNI yang mengejarnya pasukan pemberontak menghancurkan jembatan di sebelah Utara Surakarta. Sedangkan Batalyon Sentot yang telah dapat mengamankan Walikukun kemudian terus bergerak ke Madiun.¹⁵⁷ Di Sukoharjo, Wonogiri dan tempat-tempat lain yang sempat mereka kuasai, pasukan pemberontak melakukan penangkapan terhadap Pamong Praja ; rakyat biasa yang tidak ada hubungan sama sekali dengan sesuatu partai telah pula menjadi korban keganasan dan pembunuhan. Tempat pembunuhan bagi orang-orang yang mereka tangkap adalah di Tirtomoyo.¹⁵⁸

Dalam pembunuhan yang mereka lakukan di Tirtomoyo banyak korban yang berasal dari Pamong Praja, antara lain Bupati Sukoharjo Suwarsono Honggoprajitno, Patih, Wedono, Asisten Wedono, Alim Ulama ; diantaranya Kyai Termas dari Pacitan. Mereka mati disembelih, ditembak ataupun dianiaya. Jenazah para korban tersebut pada pertengahan bulan Oktober 1948 sebanyak 65 orang kemudian digali, dimasukan peti mati dan selanjutnya dibawa ke Surakarta dan dimakamkan di Taman Bahagia. Beratus-ratus ribu penduduk Surakarta menghormati jenazah para korban tersebut, mereka banyak mencururkan air mata.¹⁵⁹

Akibat adanya pemberontakan tersebut daerah-daerah sekitar Surakarta, seperti daerah Sawangan, Tegalrejo, Mertoyudan, dan Selemman merupakan daerah-daerah genting. Setelah pasukan TNI dapat merebut kembali daerah-

¹⁵⁷Dokumen Semdam VII/Diponegoro No. 18 B (10) II, *Sedjarah TNI Periode II Tahun 1948-1950*, disusun oleh Sem Menif 15, hal. 12.

¹⁵⁸Yayasan Penerbit Diponegoro, *Op.cit.*, hal. 145.

¹⁵⁹a. Muhammad Dimijati, *Sedjarah Perjuangan Indonesia*, Penerbit Widjaja, Jakarta, 1951, hal. 195.

b. Djawatan Penerangan Prop. Djawa Tengah, *Republik Indonesia Propinsi Djawa Tengah*, Semarang, 1952, hal. 47.

daerah tersebut, kemudian diadakan penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang yang tersangkut pemberontakan. Tetapi di Pandan dan Purwodadi PKI dapat berkuasa agak lama. Daerah Jawa Tengah yang merupakan daerah kuat kaum pemberontak adalah Purwodadi dan Grobogan, karena di daerah tersebut Musso dan Amir banyak punya pengikut.¹⁶⁰

Dalam wawancara dengan wartawan AP, Kolonel Nasution Kepala Staf TNI menerangkan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia mengharap akan dapat merebut kembali kota Madiun dalam waktu satu minggu. Diakui juga bahwa gerakan pasukan pemerintah yang sudah-sudah sangat lambat, dan hanya dapat maju tidak lebih dari 12 mil sehari. Pasukan TNI giat melakukan pengintaian di tempat-tempat yang diduduki kaum pemberontak ; dengan menyebarkan pamflet-pamflet dari udara untuk memberikan penjelasan tentang keadaan sebenarnya.¹⁶¹

Untuk menjaga keselamatan Negara, pemerintah perlu bertindak cepat; perlu adanya dasar untuk melakukan tindakan yang semestinya. Undang-undang keadaan bahaya dianggap kurang mencukupi, karena itu perlu adanya Undang-undang tentang Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya selama 3 bulan. Satu-satunya pasal Undang-undang Tentang Pemberian Kekuasaan Penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya :¹⁶²

Selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 15 September 1948, kepada Presiden diberikan kekuasaan penuh untuk menjalankan tindakan-tindakan dan mengadakan peraturan-peraturan yang menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang ada, guna menjamin keselamatan negara dalam menghadapi keadaan bahaya yang memuncak.

¹⁶⁰Djawatan Penerangan Prop. Djawa Tengah, *Op.cit.*, hal 44-45.

¹⁶¹Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (II) Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 28 September 1948.

¹⁶²Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah, *Op.cit.*, hal 289

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 September 1948
Presiden Republik Indonesia
(Soekarno)

Pada waktu hampir sepertiga potensi Angkatan Darat dikerahkan untuk menumpas pemberontakan Madiun, maka Angkatan Kepolisian juga tidak tinggal diam. Bahkan tidak sedikit prestasi-prestasi yang dicapai oleh Pasukan Mobile Brigade Angkatan Polisi Negara di berbagai medan pertempuran, khususnya di front Timur, yaitu antara Nganjuk-Madiun dan juga dalam pembebasan kembali kota Ponorogo dari kekuasaan pemberontak. Pada tanggal 19 September 1948 Markas Besar Mobile Brigade Besar di Jawa Timur di Blitar menerima berita laporan, bahwa di Madiun telah terjadi penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata Brigade 29. Sore hari itu juga Komandan Mobile Brigade Besar Jawa Timur Muhammad Jasin, memerintahkan Wakil Komandan Sutjipto Judodihardjo untuk bersama dengan pasukan TNI yang lain segera menuju Madiun menumpas pemberontakan tersebut dengan mengerahkan pasukan-pasukan Mobile Brigade Besar Jawa Timur.¹⁶³

Dalam Gerakan Operasi Militer terhadap PKI Musso, ikut serta Mobile Brigade Jawa Timur dan Mobile Brigade Jawa Tengah. Pada tanggal 19 September 1948 malam, satu Batalyon Mobile Brigade yang terdiri dari dua Kompi Gabungan Basuki – Malang yang dipimpin oleh Pembantu Inspektur Polisi II Imam Bachri telah diperintahkan ikut menumpas pemberontakan tersebut. Menurut rencana semula bahwa Batalyon Mobile Brigade (Mobrig) tersebut akan diberi arah gerak menuju Madiun dengan melewati Gunung Wilis dan Dungus. Tetapi karena Nganjuk perlu dikuasai kembali, maka Batalyon tersebut diperintahkan oleh Komandan Militer

¹⁶³Pinardi, *Peristiwa Madiun 1948*, Inkopak-Hazera, Jakarta, 1966, hal. 131.

setempat supaya bergerak menguasai jalan raya Nganjuk yang diduduki PKI Musso. Kota Nganjuk dapat direbut kembali, setelah itu Batalyon tersebut bergerak menuju Guyangan menduduki Bagor dan Wilangan. Pertempuran terjadi dengan seru, tetapi akhirnya pasukan pemberontak dapat dipukul mundur.¹⁶⁴

Karena kedudukan Pemerintah Komunis di Madiun mulai terancam akibat kekalahan di segala front, pidato-pidato mereka mulai terasa lunak. Dalam pidato tanggal 20 September malam, Kolonel Djokosujono yang menjabat Komandan Militer Madiun antara lain mengatakan :

Banyak orang, termasuk Presiden, mengira bahwa kita akan menjatuhkan Republik dan dikira mendirikan pemerintah baru dan dikira juga akan menghancurkan Angkatan Perangnya. Hal ini tidak benar, peristiwa Madiun bukanlah perbuatan kekuasaan yang akan menjatuhkan Republik. Tetapi hanya merupakan koreksi terhadap pemerintah ...dan semata-mata bermaksud untuk menghilangkan unsur-unsur kolonial dan feodal.

Tetapi pidato tersebut tidak dapat melunakan sikap pemerintah, operasi pemupasan tetap dijalankan, pertempuran-pertempuran tetap berkobar, daerah demi daerah dapat direbut kembali.

Setelah Surakarta aman kembali, pada tanggal 21 September 1948 Panglima Besar Sudirman diantar oleh Kepala Staf Pertahanan Jawa Tengah Kolonel Bambang Suggeng mengadakan pemeriksaan daerah Surakarta bersama Gubernur Militer Gatot Subroto dan pembesar-pembesar lainnya setelah daerah tersebut dapat diamankan kembali

¹⁶⁴Inspektur Jendral Polisi Memet Tanumihardja SH, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjajah ABRI, 1971, hal. 55.

oleh pasukan-pasukan TNI.¹⁶⁵

Dalam Operasi Militer tersebut menurut Panglima Besar Sudirman ; Madiun harus ditundukan terlebih dahulu karena Madiun merupakan motor penggerak dalam pemberontakan tersebut. Bila Madiun sudah jatuh baru daerah-daerah yang lain ikut berontak ditundukan pula, dan menurut rencana paling lambat dalam waktu setengah bulan hendaknya Madiun sudah dapat dikuasai kembali oleh Republik.¹⁶⁶

Kota-kota yang telah diduduki oleh pasukan pemberontak dalam waktu singkat dapat diduduki kembali oleh pasukan pemerintah. Pasukan komunis yang dipimpin oleh pasukan Sujoto telah dapat dipukul mundur dari daerah Surakarta dan melarikan diri ke daerah Purwodadi, sedang pasukan ex Mayor Sudigdo yang menduduki sebelah Selatan Surakarta mundur ke Baturetno dan Purwantoro. Sementara pengejaran terhadap kaum pemberontak dilancarkan, dilakukan pula penerangan-penerangan melalui selebaran-selebaran dari pesawat udara, siaran RRI dan penerangan ke pelosok-pelosok. Dengan adanya penerangan tersebut, pasukan-pasukan yang dulu terhasut oleh propaganda PKI menjadi insap kembali dan berbalik memberi bantuan kepada kesatuan-kesatuan pemerintah yang bergerak ke Madiun. Pasukan Panembahan Senopati yang sebagian besar terseret ingin menuntut balas atas kematian Kolonel Sutarto dapat diselamatkan kembali oleh Letkol Slamet Ryadi dan ditampung dalam Kesatuan Panembahan Senopati kembali, setelah terlebih dahulu diberi penjelasan-penjelasan kepada mereka akan keadaan yang sebenarnya. Daerah-daerah yang sempat mereka kuasai antara lain adalah daerah Surakarta, ke Utara sampai Pati, Grobogan, Purwodadi, Cepu, Rembang, Juwana, sebelah Selatan Wonogiri dan Pacitan, selain daerah

¹⁶⁵Dokumen Semdam VII/Diponegoro No. 18 (10) II, *Sedjarah TNI Periode II Tahun 1948-1950*, disusun oleh Sem Menif 15, hal. 11.

¹⁶⁶Muhammad Dimjati, *Op.cit.*, hal. 183-184.

Madiun sendiri.¹⁶⁷

Di Blora pasukan pemberontak telah menduduki daerah tersebut sampai tanggal 23 September 1948, di daerah kaum pemberontak mengadakan penangkapan dan pembunuhan. Pengikut Masyumi dan PNI terpaksa mengundurkan diri ke desa-desa, untuk selanjutnya dari sana mereka mengerahkan tenaga rakyat guna mengadakan perlawanan terhadap kaum pemberontak. Tetapi kemudian kaum pemberontak dapat dipukul mundur dari daerah tersebut. Sewaktu pasukan pemberontak menduduki daerah Blora, kaum pemberontak berusaha mengambil hati rakyat dengan menjanjikan pembagian tanah dan lain-lain. Rakyat dipaksa untuk membangun pertahanan desa guna menghadapi pasukan pemerintah.¹⁶⁸

Kemudian pada tanggal 23 malam dengan harapan agar serangan pasukan pemerintah dihentikan, dengan melalui Radio Madiun Amir Sjarifuddin mengatakan bahwa:

Perjuangan kita sekarang tak lebih dan tak kurang hanya berupa gerakan untuk mengadakan koreksi terhadap perkembangan revolusi kita. Karena itu dasar-dasarnya pun tetap sama dan tidak pernah diubah...konstitusi kita masih tetap sama; bendera kita masih tetap Merah Putih dan lagu kebangsaan kita tidak lebih dari Indonesia Raya.¹⁶⁹

Dari hasil operasi yang dilancarkan, Kementerian

¹⁶⁷Yayasan Penerbit Diponegoro, *op.cit.*, hal. 146.

¹⁶⁸Republik Indonesia Propinsi Jawa Tengah, *Op.cit.*, hal 45-46.

¹⁶⁹*The struggle we are now carrying on here is not less than a movement to correct the evolution of our revolution. Therefore the basis remains the same and never changing. The revolution according to our considerations remains one which is national in character, which can be called a revolution of bourgeois democrats. Our constitutions remains the same one; our flag is the same red and white; while our nation anthem is none other than the "Indonesia Raya".* Vid. George Mc Turnan kahin, *Nationalism and Revolution In Indonesia*, first printing, Cornell University Press. Ithaca and London, 1970, page 298.

Pertahanan mengumumkan bahwa di Selatan Surakarta pasukan berada di Wonogiri, pemimpin-pemimpin pemberontak telah melarikan diri ke arah Selatan. Sedangkan di Utara Surakarta pengejaran terhadap kaum pemberontak diteruskan. Di sekitar Walikunun, Sarangan dan Plaosan; Pamong Praja dan Pamong Desa telah bekerja seperti biasa, penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PKI Musso dan orang-orang yang dicurigai dilakukan. Di sekitar kota Blitar beberapa pengacau menghasut rakyat yang mengatakan bahwa Musso menjadi Presiden, berhasil ditangkap Polisi. Di sebelah Utara Megelang pada tanggal 26 September 1948 segerombolan orang bersenjata yang dipimpin oleh Hermani anggota Pesindo telah mengadakan pengacauan.¹⁷⁰

Pasukan pemberontak dalam usahanya mendapatkan simpati rakyat telah melakukan hasutan dan tipuan, sehingga beberapa orang penduduk berhasil diperalat supaya memusuhi pasukan pemerintah. Pasukan pemberontak yang terdiri dari 20 orang yang mendapat bantuan dari beberapa orang penduduk yang bersenjatakan golok mengadakan penyerangan terhadap asrama TNI dari Divisi Siliwangi. Serangan itu mereka lakukan pagi hari sekitar jam 03.45 tanggal 28 September 1948 di sebuah tempat beberapa kilometer di sebelah Selatan Magelang ; serangan pertama dilakukan dari dua arah, yakni dari arah Timur dan Barat. Sehingga terjadi tembak-menembak antara kedua belah pihak hingga jam 04.50. Serangan balasan dipimpin oleh Kamil yang dapat memukul mundur pasukan pemberontak ke arah Timur. Jam 05.45 untuk kedua kalinya mereka menyerang asrama tersebut dari arah Timur dan Selatan, pertempuran terjadi hingga jam 06.45. Serangan kedua inipun dapat digagalkan, sehingga mereka dapat digagalkan dalam usahanya menguasai jalan raya Magelang-Yogyakarta.¹⁷¹

¹⁷⁰Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28) Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 28 September 1948.

¹⁷¹Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28) Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 29 September 1948.

Sedangkan pasukan pemerintah yang lain sudah dapat menduduki Sukoharjo, antara Wonoguri dan Ponorogo sejak tanggal 26 September 1948. dalam pertempuran yang terjadi di Sukoharjo telah gugur Letnan Bakir; kemudian jenazahnya dimakamkan dengan upacara kemiliteran pada tanggal 27 September 1948 di Surakarta. Kemudian pasukan pemerintah melanjutkan gerakannya ke daerah Ngawi, telah terjadi pula pertempuran di sekitar Magetan. Sedang dari arah Timur pasukan TNI telah pula bergerak ke arah Madiun. Gerakan pasukan TNI yang lain berada 25 kilometer dekat Ponorogo, sedang di Kebumen gerakan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PKI Musso telah berhasil.¹⁷²

Sewaktu di Maospati Batalyon Sukowati mengalami perlawanan hebat dari kaum pemberontak, karena itu pasukan tersebut kemudian menggabungkan diri dengan induk pasukannya. Sisa-sisa pasukan pemberontak di Kaliyoso (Sebelah Utara Surakarta) dapat dipukul mundur oleh pasukan TNI. Kemudian pada tanggal 28 September 1948 pasukan TNI berhasil menduduki Genong. Antara Ngawi – Madiun. Dengan demikian kedudukan kaum pemberontak di Madiun terancam. Sementara itu tersiar kabar bahwa Musso dengan beberapa pemimpin pemberontak telah meninggalkan Madiun, karena di Madiun dirasakan tidak aman lagi.¹⁷³

Perlawanan yang hebat ialah di sepanjang jalan raya Ngawi – Madiun, karena di sanalah ditempatkan pasukan-pasukan pemberontak yang bersenjata lengkap ; sehingga pasukan TNI mengalami hambatan ke Madiun.

Pasukan yang dipimpin oleh Mayor Achmad Wiranatakusumah lebih cepat sampai di Madiun, karena melalui Gunung Lawu. Pasukan pemberontak yang bertahan di Madiun tidak menyangka bahwa mereka akan diserang dari lambung kiri, sehingga pertahanan mereka dipusatkan di Ngawi saja.¹⁷⁴

¹⁷²Muhammad Dimijati, *Op.cit.*, hal. 184.

¹⁷³Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28) Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 30 September 1948.

¹⁷⁴Muhammad Dimijati, *Op.cit.*, hal. 185.

Menjelang kehancuran kaum pemberontak, Supardi salah seorang pimpinan *coup* di Madiun dalam usaha mengelabui pemerintah mengatakan bahwa : Front Nasional bukanlah pemerintahan komunis, komunis tidak bermaksud untuk menyerang republik. Tindakan *coup* itu ialah tindakan koreksi, sedangkan Musso tetap bungkam.¹⁷⁵

Gerakan Operasi Militer yang dialncarkan oleh pasukan yang taat kepada pemerintah RI berjalan dengan singkat. Dalam 12 hari Madiun dapat dikuasai kembali, teapntya tanggal 30 September 1948 jam 16.15. Malam harinya jam 22.00 Gubernur Militer Gatot Subroto memerintahkan Angkatan Perang supaya terus melakukan pengejaran terhadap pasukan pemberontak yang bersarang di Purwodadi, Pacitan, Ponorogo, Juru Bicara Menteri Pertahanan dalam pengumannya menyatakan; bahwa Musso melarikan diri ke Dungus, sebelah selatan Madiun. Komandan Pasukan Pemberontak mengirim surat kepada Letkol Kretarto untuk mengadakan perundingan, akan tetapi pemerintah tidak mau mengadakan hubungan dengan kaum pemberontak.¹⁷⁶

Waktu pasukan TNI memasuki Madiun, Musso Cs tidak berada di Madiun. Sebelum mengundurkan diri kaum pemberontak sempat menghancurkan Kantor Telepon dengan mempergunakan trekbom. Oleh orang-orang pemerintah kemudian dibentuk kembali pemerintahan di Madiun. Bendera Merah putih dikibarkan kembali di seluruh kota. Menurut wartawan – antara Madiun; sebelum kaum pemberontak melarikan diri, mereka terlebih dahulu mempersiapkan pesediaan bahan makanan dan memindahkan alat-alat perlengkapan ke daerah pegunungan. Radio Gelora Pemuda sudah sejak lama tidak lagi mengadakan siaran, ternyata telah mereka rusak. Sebagian dari Percetakan Negara dan Percetakan Muda juga diangkut. Sewaktu mereka menguasai Madiun pemerintah

¹⁷⁵Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat, *Kontra Revolusi Gestapu PKI*, Bnadung, 1966, hal. 19.

¹⁷⁶Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28) Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 1 Oktober 1948.

komunis di sana sempat mengedarkan uang RI yang baru, di lain daerah belum beredar, karena sejak pecahnya pemberontakan Percetakan Uang RI jatuh ke tangan PKI.¹⁷⁷

Pada bulan September 1948 Kepala Penerangan Sdr. Maladi, menuju Cepu dan Purwodadi melakukan penerangan sesudah Pemberontakan Madiun yang menjalar ke Jawa Tengah itu dapat ditumpas oleh kesatuan TNI. Di berbagai tempat sepanjang jalan yang dilalui oleh petugas-petugas penerangan masih terjadi pertempuran dengan pihak pemberontak yang tidak mau menyerahkan diri.¹⁷⁸

Dalam penyerbuan ke Madiun tersebut jatuh beberapa korban perwira menengah dan perwira pertama, antara lain adalah : Letkol Marhadi, Letkol Wijono, Kapten Bismo, Kepala Kepolisian Karesidenan Madiun dan lain-lain.

Gerakan Operasi Militer pembasmian pemberontakan Madiun tersebut dikenal dengan nama "Gerakan Operasi Militer I" atau disingkat dengan "GOM I".

4.2. Akhir Pemberontakan

Jatuhnya Madiun bukan berarti berakhirnya petualangan pasukan pemberontak, karena mereka masih dapat meloloskan diri. Mereka melarikan diri dengan merencanakan perang gerilya. Selama mereka melarikan diri masih pula melakukan pembunuhan atau perampasan dan pembakaran harta benda di tempat-tempat yang mereka lalui.

Dalam wawancara dengan wartawan, Menteri Natsir menerangkan, bahwa Negara tetap membasmi pemberontakan. Tiap ideologi dan oposisi tetap dihargai. Tetapi bila melampaui batas hingga menimbulkan kekacauan tetap akan dibasmi, tidak peduli dari golongan apapun juga.¹⁷⁹

¹⁷⁷Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28) Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 2 Oktober 1948.

¹⁷⁸Kementerian Penerangan Djawatan Republik Indonesia, *Sedjarah Republik Indonesia*, 1953, hal. 136.

¹⁷⁹Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28), Surat Kabar

Menurut berita yang diterima dari Madiun, setelah Madiun dapat direbut kembali oleh pasukan-pasukan TNI, maka jam 17.30 sore keamanan telah terjamin kembali, dan tiap-tiap rumah telah berkibar bendera Merah Putih.¹⁸⁰

Sesudah Wonogiri dapat dipulihkan keamanannya, maka pada tanggal 1 Oktober 1948 Residen Sudiro mengunjungi Wonogiri untuk menyelesaikan segala sesuatu, terutama dalam pengembalian keamanan. Berita direbut kembalinya Madiun disiarkan dengan segera ke daerah-daerah ; Kedu, Yogyakarta, Surakarta dan juga ke lain-lain daerah-daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.¹⁸¹

Sementara itu pasukan pemberontak yang melarikan diri dari Madiun terus dikejar oleh pasukan TNI ; mereka melarikan diri ke Kandangan. Dalam pengunduran diri dari Madiun pimpinan pasukan dipegang oleh Amir, bukan oleh Musso. Kandangan merupakan daerah basis gerilya mereka. Tetapi sebelum pasukan pemberontak sampai di tempat tujuan, daerah tersebut telah dapat dikuasai oleh Batalyon yang dipimpin oleh Mayor Sabaruddin dari Divisi Sungkono. Pasukan amir diserang dan mengundurkan diri di daerah Gunung Wilis.¹⁸²

Dengan dipukul mundurnya kaum pemberontak, penduduk Madiun aman kembali. Masuknya Mahasiswa Akademi Militer dan Pasukan Siliwangi ke kota Madiun disambut gem-bira oleh masyarakat, terutama pemuda pelajar yang selama pendudukan pasukan pemberontak melakukan aksi illegal memperjuangkan kembalinya kekuasaan RI. Salah seorang pelajar Madiun yang menjadi korban ialah Sutopo, pemenang lari 10.000 meter pada PON I di Surakarta. Sejak kedatangannya ke Madiun ia turut aktif melawan pasukan pemberontak,

Kedaulatan Rakjat, tanggal 1 Oktober 1948.

¹⁸⁰Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 1 Oktober 1948.

¹⁸¹Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 1 Oktober 1948.

¹⁸²George Mc Turan kahin, *OP.cit.*, hal. 299-300.

tetapi ia dapat ditangkap dan dibunuh di Dungus pada tanggal 4 Oktober 1948.¹⁸³

Pada tanggal 1 Oktober dilakukan pengejaran terhadap pasukan pemberontak di Dungus, pertempuran tidak berjalan lama, karena pasukan pemberontak segera mengundurkan diri ke sebelah Selatan. Selama Dungus dikuasai oleh pasukan pemberontak, telah dilakukan pembunuhan kejam. Penyembelihan dilakukan di sebuah kamar, sehingga darah berceceran di lantai kamar. Kurang lebih 1000 orang dibunuh dengan dipotong lehernya, sebagian lagi mati ditembak dari jarak dekat. Mereka yang dibunuh adalah pimpinan Masyumi, PNI, Pamong Desa, Pamong Praja, Pengikut Tan Malaka, tentara pelajar dan penduduk biasa. Gadis Basjid seorang wartawan wanita dari Harian Siasat yang mengikuti perjalanan Divisi Siliwangi dari Surakarta ke Tawangmangu dan Sarangan untuk menyerbu Madiun, menulis di Harian Nasional Yogyakarta tentang kekejaman kaum pemberontak antara lain mengatakan sebagai berikut :

Waktu Pasukan Kiansantang yang paling depan akan memasuki kompleks pabrik gula, terdengarlah teriakan minta tolong dari sebuah rumah administrator. Kurang lebih 50 orang tergeletak di lantai berceriterakan, bahwa sebelum kaum pemberontak melarikan diri; dua orang telah melakukan penembakan dari luar melalui jendela. Di Dungus di sebelah timur mereka melakukan hal yang sama dengan cara yang lebih kejam lagi, begitu pula di Magetan, Sumoroto, Ponorogo, Purwodadi dan Kanigoro. Di sini menunjukkan kepada kita, bahwa gerakan politik yang kemudian berubah menjadi perebutan kekuasaan pemerintah; bukan suatu aliran yang dapat memberi manfaat atau kebahagiaan rakyat Indonesia, betapapun mulianya cita-cita yang mereka dengungkan.

¹⁸³ Muhammad Dinjati, *Op.cit.*, hal. 185.

Dari Dungus pasukan pemberontak lari ke Ngebel dalam keadaan kocar-kacir. Berjuta-juta uang RI dan barang-barang perhiasan emas berlian yang mereka ambil dari Bank, rumah-rumah gadai dan jawatan-jawatan di kota Madiun mereka bawa kabur. Barang-barang lain yang berat seperti : mesin tulis, beras berkarung-karung, amunisi, kambing, kuda, cikar, mobil-mobil rusak dan lain-lain mereka tinggalkan di tengah jalan, karena mereka terus dikejar oleh pasukan-pasukan TNI.¹⁸⁴

Di Ngebel mereka bertahan selama 6 hari, kemudian pada tanggal 7 Oktober 1948 mereka bergerak terus menuju ke Balong, antara Sumoroto dan Ponorogo, dari Balong mereka terus ke Siluang, karena adanya serangan gencar dari pasukan TNI pada tanggal 11 Oktober 1948 kemudian mereka bergerak ke Tegalombo di sebelah Selatan Pacitan. Di Tegalombo mereka dapat bertahan agak lama. Abdulmutalib mengakui bahwa mereka melakukan pembunuhan kejam, tetapi pembunuhan itu yang melakukan adalah tentara PKI bukan oleh sipil yang dipimpinya. Dari Tegalombo, rombongan dibagi dua, satu bagian menuju Bandar; Abdulmutalib ikut yang ke Bandar, kemudian kemudian menuju ke Kisman-toro. Disana bertemu dengan rombongan PKI Wonogiri yang dipimpin oleh Jadau; rombongan ini sebagian dikirim ke Purwantoro, tetapi karena mendapat serangan dari TNI kemudian mereka kembali lagi ke Kismantoro.¹⁸⁵

Sedang Musso dengan beberapa orang pengawalnya menuju ke pegunungan Selatan Ponorogo. Induk pasukan Amir adalah yang paling kuat persenjataannya, juga pengiringnya paling lengkap, seperti Djoko Sujono, Abdulmutalib, Batalyon Abdul Rachman, Marotu Darusman, Suripno, Su-

¹⁸⁴ *Ibid*, hal. 191-192.

¹⁸⁵ *Ibid*, hal. 194.

marsono dan lain-lain pemimpin besar PKI. Alimin tidak ikut, karena sewaktu timbul pemberontakan ia berada di Surakarta bersama pasukan PKI di Wonogiri.¹⁸⁶

Daerah Pati-Semarang-Surakarta-Madiun merupakan Daerah Militer sesuai dengan Penetapan Presiden No. 13 Tahun 1948 tanggal 28 September 1948. karena itu kemudian Gubernur Militer mengumumkan pemberian ampun bagi mereka yang ikut-ikutan saja dalam peristiwa pemberontakan tersebut. Pengumuman tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut:

Pengumuman No. 13

Gubernur Militer Surakarta-Semarang-Pati-Madiun mengumumkan kepada semua perwira, bintang, prajurit dan mereka yang terseret berada di pihak PKI Musso yang bertempur melawan Tentara Republik Indonesia di daerah Surakarta-Semarang-Pati dan Madiun.

Sesudah Madiun jatuh dan selangkah demi selangkah pasukan pemerintah maju ke segala pelosok pusat pemberontakan dengan menghancurkan kekuatan bersenjata PKI Musso pasukan demi pasukan, maka dengan perasaan kasih sayang terhadap mereka yang hanya di perkuda saja dengan segala macam berita palsu, kami umumkan sebagai berikut:

Mereka yang menyerah dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, akan diampuni dan dijamin jiwanya:

1. Menghadap kepada komandan pasukan tentara RI yang terdekat dengan membawa bendera merah putih; senjata tidak terhunus, senapan dan lain-lain senjata agar ditujukan ke bawah.
2. Jika lebih dari satu orang, harus dalam formasi

¹⁸⁶Muhammad Dimijati, *Loc.cit.*

militer dengan salah satu yang tertinggi pangkatnya atau tertua menjadi penanggungjawab.

3. Senjata-senjata yang dibawa harus diserahkan kepada komandan tersebut.
4. Senjata yang disembunyikan atau yang diketahui disembunyikan harus diberitahukan tempatnya.
5. Kepada masing-masing komandan seksi ke atas yang berada di bawah pimpinan kami;
 - a. Yang menyerah menurut syarat-syarat ini dijamin jiwanya dan segera teruskan kepada kami.
 - b. Yang tidak memenuhi syarat-syarat ini kejar terus dan perlakukan menurut perintah order harian kami yang sudah-sudah.
 - c. Yang mengkhianati syarat-syarat ini, yaitu menggunakan syarat-syarat tersebut sebagai akal menyerang supaya dibinasakan.

Dikeluarkan : di tempat

Tanggal : 4Oktober 1948

Jam : 19.00

Gubernur Militer

Surakarta-Semarang-Pati-Madiun

Gatot Subroto¹⁸⁷

Pengumuman No. 13 dari Gubernur Militer tersebut ditujukan kepada mereka yang hanya ikut-ikutan dan terseret dalam pemberontakan PKI Musso, agar kekuasaan segera dapat dipulihkan kembali. Operasi penumpasan terhadap tokoh-tokoh pemberontakan dan mereka yang tidak mau mengindahkan pengumuman tersebut tetap dijalankan, sehingga mereka tak pernah merasa aman karena terus dikejar-kejar oleh pasukan TNI. Terpaksa mereka harus berpindah

¹⁸⁷Dokumen Semdam VII/Diponegoro No. 18 (10) II, *Sedjarah TNI Periode II Tahun 1948-1950*, disusun oleh Sem Menif 15, hal. 12.

dari satu tempat ke tempat lain, tetapi banyak pula diantara mereka yang menyerahkan diri.

Di Jepon yang terletak di sebelah Timur Blora, selama PKI Musso berkuasa mengalami nasib yang serupa. Di sini terjadi pembunuhan kejam, diantara korban pembunuhan adalah; seorang pegawai Jawatan Penerangan, seorang Mantri Guru dan seorang Polisi. Banjarejo juga mereka duduki. Di Ngawen banyak jatuh korban, tetapi di Kunduran (antara-Blora-Purwodadi) jatuh korban lebih banyak lagi, yakni 65 orang tewas. Di hutan-hutan antara Kunduran dan Tondanan kaum pemberontak sebelum melarikan diri telah membunuh tawanan mereka. Di Blora diantara pegawai-pegawai negeri yang gugur antara lain: Mr. Iskandar Surjatmadja (Bupati Blora), Dr. Susanto (Kepala Kesehatan Karesidenan Pati), Gunandar (Kepala Bank Rakyat) dan Abbu Umar (Wakil STII dalam KNIP).¹⁸⁸

Tanggal 5 Oktober 1948 Purwodadi dapat direbut kembali oleh TNI, selanjutnya Cepu dan Blora. Kota Cepu selama 12 hari merupakan kota pertempuran, tetapi kemudian dapat dikuasai kembali dengan memakan banyak korban. Setelah terjadi pertempuran sengit, Cepu akhirnya dapat direbut dari pasukan pemberontak Laskar Minyak dan Pesindo. Randublatung telah dapat diduduki kembali. Dalam operasi ini gugur Letkol Sunandar dan Kepala Kepolisian Pati, Agil. Di Doplang pasukan pemberontak melarikan diri, karena tak lama sesudah daerah itu dikuasai dapat direbut kembali oleh pasukan TNI. Dari Cepu pasukan pemberontak kemudian melarikan diri ke daerah Sambong, serta membunuh Camat setempat. Karena selalu mendapat serangan dari pasukan TNI, pasukan pemberontak kemudian mengundurkan diri dari Sambong ke Jiken.¹⁸⁹

Blora baru dapat direbut pada tanggal 13 Oktober, setelah mendapat serangan dari dua jurusan, yaitu dari Cepu

¹⁸⁸Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah, *Op.cit.*, hal 46.

¹⁸⁹*Ibid*, hal.. 45-46.

oleh Batalyon Kemal Idris dan dari Kudus oleh Batalyon Daeng. Ketika diadakan pembersihan di daerah Blora tersebut, telah disaksikan oleh Anggauta-anggauta wakil KYN yang mengadakan peninjauan di tempat-tempat kejadian pemberontakan.¹⁹⁰ Pasukan Siliwangi dan Ronggolawe telah menamatkan pemerintahan komunis di Blora, segera dilakukan pula penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat pemberontakan. Beberapa orang yang memimpin yang mengepalai pembunuhan dihukum mati; sedang yang lain dihukum kerja paksa. Daerah lain yang mengalami ekor peristiwa Madiun ialah Pati. PKI di daerah Pati telah melakukan pembunuhan terhadap orang-orang PKI sendiri yang dianggap lemah, mereka dibunuh di daerah hutan Blora. Di Pati ini pun pasukan pemberontak tidak dapat bertahan lama, karena segera pasukan TNI dapat merebut kembali daerah tersebut. Terhadap mereka yang melakukan pemberontakan, kemudian pemerintah mengadakan penangkapan.¹⁹¹

Di daerah Purwodadi, Cepu dan Bojonegoro kaum pemberontakan melakukan pembunuhan-pembunuhan kejam. Jembatan-jembatan jalan raya dan jalan kereta api banyak yang dihancurkan. Gedung-gedung dan hutan jati banyak pula yang mereka bakar. Seperti di daerah Kediri, kaum pemberontak membakar hutan jati dan 180.000 ton kayu bakar untuk kereta api. Di Ngawi berton-ton bibit padi mereka musnahkan. Kota Pacitan dan Pati dapat dikuasai oleh TNI pada tanggal 22 Oktober 1948.¹⁹²

Pengejaran terhadap kaum pemberontakan terus dijalankan. Pasukan Amir yang terpukul di Purwantoro lalau meneruskan perjalanan ke Utara mendaki lereng Gunung Lawu melalui desa Jeruk, Ngrete, Watasono dan Kebang di daerah pegunungan kapur yang tandus. Pengiringnya kira-kira 2000 orang yang bersenjata lengkap; diantaranya ikut

¹⁹⁰Yayasan Penerbit Diponegoro, *op.cit.*, hal. 146.

¹⁹¹Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah, *Op.cit.*, hal 46.

¹⁹²Muhammad Dinjati, *Op.cit.*, hal. 95.

berpuluh-puluh perempuan, anak-anak dan ibu-ibu dari keluarga pemimpin pemberontak yang ikut lari meninggalkan Madiun dengan membawa harta benda yang tidak sedikit. Mereka berjalan kaki dan sebagian naik kuda. Para pemuda dan tentara merah ikut mengawal dari lambung kanan, lambung kiri, dari muka dan belakang. Berangsur-angsur perbekalan mereka makin habis, dan banyak yang menderita sakit Karena payah mengikuti perjalanan yang beratus-ratus kilometer. Di Kebang mereka mendapat serbuan dari pasukan TNI, sehingga rombongan sipil yang dipimpin oleh Abdulmutallib terpisah dari induk pasukannya. Mereka terpaksa mengambil jalan sendiri. Ketika Abdulmutallib bersama sekretarisnya, nona Sriatin (dari Pesindo) masuk ke Girimarto, mereka dikenali oleh penduduk setempat, kemudian ditangkap. Pada tanggal 15 Oktober 1948 Abdulmutallib menjalani hukuman mati. Sebelum ditembak terlebih dahulu berwasiat mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya yang ditinggal di Madiun.¹⁹³

Sedang pasukan Amir terus bergerak ke Purwodadi melalui Tawangmangu untuk bertemu dengan pasukan Sujoto yang kabarnya masih kuat dan menduduki daerah Purwodadi. Sesampainya di Tawangmangu mereka mendapat serangan, sebagian lagi kembali ke Selatan. Dari Tawangmangu induk pasukan Amir meneruskan perjalanan ke Sarangan, di sana tidak ada penjagaan pasukan TNI, sehingga mereka sempat beristirahat selama dua hari. Kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Utara sampai di Ngrambe dan Walikukun, di sana sempat pula beristirahat. Ketika pasukan melintasi jalan raya Solo-Madiun, kebetulan ada rombongan mobil dari Yogyakarta menuju Madiun, kemudian mereka sergap, penumpangnya dibunuh.¹⁹⁴

Ternyata penumpang mobil yang dibunuh itu, ialah Pembantu Komisaris Besar Polisi Durjat, Surjo (Ketua DPA

¹⁹³ *Ibid.*, hal. 197.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hal. 197-198.

bekas Gubernur Jawa Timur), Mayor Samsu Darsono, Letnan Sumarto, Mayor Suhadi, Komisaris I Soeroko, Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur di Blitar dan Kepala Karesidenan Bojonegoro. Kejadian tersebut sangat menggemparkan masyarakat di Yogya. Untuk menghormati mereka yang gugur di Kepresidenan dikibarkan bendera setengah tiang pada tanggal 4 Nopember 1948. Dan sebagai pengganti Surjo, diangkatlah Soetardjo Kartohadikusumo selaku ketua DPA.¹⁹⁵

Untuk memperkuat pasukan TNI yang sedang bertempur, pada tanggal 17 Oktober 1948 tiga Kompi Mobrig Jawa Tengah yang dipimpin oleh Inspektur R.M. Bambang Suprpto, diperintahkan bergerak dari Solo menuju Cundi dan Tlawah ; untuk menumpas pasukan Musso yang terpecah akibat serangan pasukan TNI. Dari Tlawah pasukan terus bergerak ke Purwodadi dan melakukan pembersihan di kota tersebut. Tanggal 21 Oktober 1948 pasukan melanjutkan gerakannya ke Wirosari dan menyerang Batalyon Poernawi yang pro PKI, kemudian pasukan kembali lagi ke Tlawah. Dari Tlawah kemudian pada tanggal 23 Oktober 1948 pasukan menyerang Truko yang dikuasai dua kompi pasukan pemberontak. Pasukan pemberontak dapat dipukul mundur ke arah Blora dan sebagian lagi masuk hutan jati. Tanggal 25 oktober 1948 dari Truko pasukan kembali lagi ke Purwodadi. Selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 1948 dari Purwodadi lalu menduduki Kudus dan ikut melakukan penyerangan terhadap Batalyon Senopati yang pro PKI, dan berhasil merampas kurang lebih 100 pucuk senjata.¹⁹⁶

Sedangkan Musso yang melarikan diri ke daerah Ponorogo tertembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948 oleh Brigade S yang dipimpin oleh Kapten Sunandar sewaktu melakukan patroli. Musso yang menyamar sebagai kusir dan dikawal oleh dua orang kepercayaan, lalu terjadi tembak

¹⁹⁵ a. Sudono Jusuf, *Op.cit.*, hal 56.

b. Muhammad Dimjati, *Loc.cit.*

¹⁹⁶ Sudono Jusuf, *Op.cit.*, hal 56-57.

menembak. Musso lari ke sebuah rumah penduduk desa, dengan menggunakan dua buah pistol vikers ia bertahan di rumah tersebut, dan membalas tembakan dari balik pintu dan jendela. Walaupun ketika itu ia terkepung, ia tidak mau menyerah. Seruan dari pihak TNI supaya menyerah tidak diindahkan. Waktu itu patroli TNI yang mengepung belum tahu bahwa orang tersebut sebenarnya adalah Musso, disangka tentara komunis biasa saja. Akhirnya setelah diadakan tembakan gencar dari luar rumah, Musso tertembak dan tak lama kemudian meninggal. Mayat Musso kemudian dipotret, diperlihatkan kepada pegawai-pegawai pemerintah yang dipanggil dari Madiun. Sesudah dipastikan mayat tersebut adalah mayat Musso, kemudian dikubur di salah satu tempat yang dirahasiakan.¹⁹⁷

Sedangkan induk pasukan Amir telah sampai di Ngawi terus mengadakan perjalanan ke Utara menjelajahi hutan jati dan akhirnya melintasi Bengawan Solo menuju ke Cepu. Ternyata pasukan Sujoto sudah tidak ada lagi di sana, karena Cepu, Blora, Pati dan Purwodadi sudah jatuh ke tangan pasukan TNI, pasukan Sujoto setelah mendapat serangan dari pasukan TNI kemudian mengundurkan diri dan bermaksud mengadakan perjalanan ke Madiun; karena didengar bahwa pasukan Amir masih ada di sekitar Ponorogo. Waktu induk pasukan Amir sampai di Sarangan, pasukan Sujoto sudah menyeberangi Bengawan Solo menuju ke Madiun. Di dekat Madiun pasukan Sujoto menyerah pada tanggal 25 Nopember 1948.¹⁹⁸

Pada tanggal 12 Nopember 1948 pasukan Amir ter-

¹⁹⁷Muhammad Dimijati, *Op.cit.*, hal. 192..

¹⁹⁸*Ibid.*, hal. 198.

Diantara anak buah pasukan Sujoto dan Sudiarto dari daerah Purwodadi banyak yang ikut berjuang berg erilya pada waktu terjadi Agresi Militer Belanda II, hingga sesudah gen catan senjata Sudiarto ikut aktif lagi dalam dinas TNI dan ikut dikirim ke Ambon untuk memadamkan pemberontakan RMS dan gugur di medan bakti pada bulan Oktober tahun 1950. kemudian menyusul Slamet Ryadi yang gugur di Ambon pada tanggal 4 Nopember 1950.

libat tembak menembak selama 4 jam di desa Wirosari dengan pasukan TNI yang datang dari Lebak. Pasukan Amir dapat dipukul mundur, kemudian mereka melarikan diri ke arah Timur.¹⁹⁹ Tetapi terus dikejar oleh pasukan TNI, dimana pada tanggal 19 Nopember 1948 dapat ditangkap 11 orang pasukan pemberontak dan kemudian dibawa ke Sragen. Dua orang lagi tertangkap ternyata berasal dari Ponorogo dan Sukoharjo. Kemudian pada tanggal 20 Nopember 1948 di Pitakenceng, Caruban terjadi tembak menembak dengan 7 orang pemberontak, dua diantaranya dapat ditangkap oleh rakyat. Dalam usaha penangkapan ini, seorang penduduk yang ikut berjuang tertembak mati oleh pemberontak. Di daerah Kendal di desa Muncul, Batalyon Sukowati telah dapat menahan 47 pasukan pemberontak.²⁰⁰

Pada tanggal 20 Nopember 1948 pasukan Amir menuju Tambakromo, sebelah Timur Kayen sebelah Selatan Pati. Mereka terdiri dari kurang lebih 500 orang, ada yang beserta keluarga mereka. Keadaan mereka sangat menyedihkan. Banyak diantara mereka yang ingin melarikan diri, tetapi rakyat selalu siap menangkap mereka. Banyak mayat pemberontak ditemukan karena sakit, atau kelaparan.²⁰¹

Pasukan Amir dan Djokosujono yang dikejar TNI, dari Getas terus ke Utara menuju Ngasinan, diantara jalan Wirosari Blora. Kemudian mereka diserang oleh pasukan TNI dari Wirosari dan Blora, mereka melarikan diri masuk hutan-hutan menuju Gratil. Pasukan mereka yang terdepan sudah sampai di Tanduan, tetapi di tempat tersebut mendapat serangan pasukan TNI dari arah Timur, terpaksa mereka melarikan diri ke arah Barat ke Karangasem. Di daerah Karangasem mereka berkeliaran di jalan-jalan antara Karangasem dan Gan-

¹⁹⁹Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28), Surat kabar *Suara merdeka*, tanggal 25 Nopember 1948.

²⁰⁰Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28), Surat kabar *Suara merdeka*, tanggal 26 Nopember 1948.

²⁰¹Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28), Surat kabar *Suara merdeka*, tanggal 26 Nopember 1948.

dungsari. Sewaktu di Gandungsari mereka mengancam penduduk yang tidak mau membantu mereka, bahwa rumah mereka akan dibakar dan orang-orangnya akan dibunuh. Tetapi rakyat tidak mengindahkan ancaman mereka, bahkan mereka memberitahu kepada pasukan TNI yang terdekat. Dalam suatu operasi yang dilancarkan, pasukan TNI berhasil menangkap dua orang pengintai mereka (sekko) yang sedang melakukan penyelidikan di sekitar Gandungsari. Kecuali dua orang sekko itu, ada 15 orang pasukan Amir yang sedang melakukan penyamaran dapat ditangkap.²⁰²

Dalam suatu operasi pemabersihan di daerah Gedong di desa Nawangan, pada tanggal 20 Nopember 1948 telah berhasil ditangkap oleh pasukan TNI, antara lain : Komandan Pasukan Pemberontak ex Kolonel Djokosujono anggauta Politbiro PKI; Maruto Darusman, Sardjono, Francisca Fangidai dan beberapa puluh pemuda Pesindo.²⁰³ Tanggal 24 Nopember 1948 di Grobogan di sinyalir ada 300 orang bersenjata yang pada kam 07.00 melewati Kotekan (7 Km sebelah Barat Grobogan), diduga adalah gerombolan pemberontak yang mengundurkan diri ke arah Timur dengan melewati hutan-hutan Sedayu dan Jatipohon pada malam hari, kemudian menuju ke Barat, sepanjang jalan pasukan pemberontak menyebar uang ratusan yang ditanda tangani oleh Menteri Keuangan Maramis sebanyak kurang lebih 3 karung.²⁰⁴

Pasukan Amir tidak terperikan betapa sengsaranya, mereka banyak yang kelaparan. Sehingga sewaktu melewati ladang jagung; jagung yang masih muda pun telah mereka makan, banyak yang sakit perut termasuk Amir sendiri yang terkena disentri. Pada tanggal 26 Nopember 1948 rombongan mereka sampai di Brati (sebelah Barat Purwodadi) tetapi

²⁰²Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28), Surat kabar *Suara Merdeka*, tanggal 24 Nopember 1948.

²⁰³Prof. Dr. Slametmuljana, *Nasionalisme Sebagai Pedjuan gan Bangsa Indonesia*, Jilid II, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1969, hal. 267-268.

²⁰⁴Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Suara Merdeka*, tanggal 25 Nopember 1948.

pasukan TNI lebih cepat bergerak; sebelum mereka masuk garis status quo mereka telah diserbu oleh TNI, dan terjadi pertempuran di desa Brati. Sehingga mereka melarikan diri, tetapi banyak pula yang menyerah kepada TNI karena tidak tahan lagi menderita, dikejar-kejar selama dua bulan sejak dari Madiun.²⁰⁵

Dalam pertempuran ini Amir dapat meloloskan diri pasukan mereka tinggal beberapa puluh orang saja. Kemudian mereka menyeberangi Sungai Lusi menuju ke desa Klambu, antara Klampok dan Bringin (7 Km dari Purwodadi). Pasukan TNI mengadakan taktik menggiring ke titik buntu yang mematikan. Taktik ini ternyata berhasil, karena pasukan pemberontak terjepit di daerah rawa-rawa. Mereka dikelung oleh kesatuan-kesatuan TNI, akhirnya Amir menyerahkan diri beserta pasukannya pada tanggal 29 Nopember. Suripno dan Harjono yang selalu dekat dengan Amir ikut pula tertangkap. Kemudian mereka digiring ke Purwodadi, seterusnya di bawa ke Surakarta. Mereka tampak kurus kering, pakaiannya pun sudah sangat lusuh. Kemudian pada tanggal 4 Desember 1948; Amir Sjarifuddin, Djokosujono, Maruto Darusman, Suripno dan lain-lain gembong FDR dibawa ke Yogyakarta dengan kereta api. Mereka dipenjara bersama-sama dengan kurang lebih 35.000 orang pengikut PKI serta simpatisannya di Yogyakarta. Dengan tertangkapnya Amir Cs di desa Klambu, maka berakhirilah riwayat pemberontakan PKI Musso. Dalam Gerakan Operasi Militer ini, dari TNI tercatat 159 orang gugur.²⁰⁶

Atas perintah Presiden, sebagian tawanan kemudian dilepas, karena adanya serangan Agresi Militer Belanda, dengan maksud agar mereka dapat ikut serta melawan tentara Belanda. Alimin sempat lolos, sedang 11 orang tawanan antara lain : Amir Sjarifuddin, Suripno, Maruto Darusman, Djokosujono, D. Mangku, Gey Gee Hwat, Sardjono, Harjono,

²⁰⁵Muhammad Dimjati, *Op.cit*, hal. 199.

²⁰⁶*Ibid*, hal. 200.

Katamhadi, Ronomarsono dan Sukarno dijatuhi hukuman mati pada tanggal 19 Desember 1948 di desa Ngalihan, Kabupaten Karanganyar Surakarta. Sedang yang dilepas kembali antara lain : Nyoto, Aidit dan Lukman.²⁰⁷

4.3 Berbagai Pendapat Tentang Pemberontakan

Ketika Madiun sudah dikuasai kembali oleh pemerintah RI, pers luar negeri ramai membicarakan peristiwa tersebut. Pers Amerika mengatakan bahwa kekalahan Madiun itu berarti kekalahan strategi komunisme di Asia Tenggara sejak berakhirnya Perang Dunia ke II. Sebaliknya pers Belanda yang reaksioner mengatakan bahwa, peristiwa Madiun itu hanya sandiwara saja, untuk mengelabui dunia tentang keadaan di Indonesia yang sebenarnya ; yaitu orang-orang komunis disuruh pura-pura berontak untuk menimbulkan kesan seolah-olah Republik Indonesia bukan komunis.²⁰⁸

Dalam pidato memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1948, Presiden Soekarno dalam pidatonya antara lain mengatakan :

Demikianlah jadinya kalau orang tidak berdiri lagi pada dasar Pancasila, mereka meninggalkan nasionalisme; oleh karena mereka memecahkan persatuan bangsa. Mereka meninggalkan kemanusiaan, meninggalkan kedaulatan rakyat, oleh karena mereka memperkosa kehendak rakyat banyak. Mereka meninggalkan Ketuhanan; oleh karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan keadilan sosial, oleh karena mereka meninggalkan gotong royong yang sejati. Mereka merampok, membakar, membunuh dan menyembelih, suatu perbuatan yang

²⁰⁷Prof. Dr. Slametmuljana, *Op.cit*, hal. 267-268.

²⁰⁸Muhammad Dimijati, *Op.cit*, hal. 188.

dikutuk oleh kemanusiaan, kesopanan, agama dan peradaban. Kejadian pemberontakan Madiun yang menyedihkan itu adalah tragedi yang ditinggalkan oleh pikiran sehat, yang membuat pengacau-pengacau mendurhakakan revolusi yang elementer.²⁰⁹

Sedangkan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 17 Nopember 1948 antara lain mengatakan :

Ada orang yang hilang harapannya tentang hasil perjuangannya sendiri, lantas menggantungkan nasib kepada negara asing. Sikap ini menyalahi cita-cita nasional. Dengan itu yang dibela ialah cita-cita negeri tempat bergantung tadi.

Peristiwa Madiun adalah suatu tragedi nasional yang sedih. Akibatnya tidak saja menimbulkan kesukaran pada waktu sekarang, tetapi juga mempengaruhi hasil panen di masa yang akan datang, Karena persediaan padi dan bibit habis dibakar. Kaum pemberontak di Madiun tidak puas dengan merebut kekuasaan dan memaksa rakyat tunduk dan taat kepada mereka. Mereka membunuh lawan politiknya dengan cara yang amat kejam. Teror adalah senjata diktator, bukan jalan yang merdeka, tetapi jalan kepada perhambaan rakyat. Sistem perhambaan tidak akan melahirkan orang yang merdeka yang bersifat sosial. Tujuan Revolusi Nasional kita lebih jauh lagi, yaitu mencapai kemerdekaan manusia dari segala tindasan”.

Serikat Sekerja kacau organisasinya, gara-gara FDR ia harus dibangun kembali atas dasar yang sehat, ditujukan kepada kepentingan dan keselamatan buruh sebagai faktor produksi yang terpenting. Pada waktu akhir-akhir ini sukar membangun kembali Organisasi Serikat Sekerja, karena pe-

²⁰⁹*Ibid*, hal. 204-205.

mimpin-pemimpin yang mengerti kepentingan buruh yang mau melepaskan kepentingan Serikat Sekerja dari pengaruh partai politik merasa terkunci langkahnya. Syukurlah pada tanggal 25 Desember 1948 yang akan datang akan diadakan suatu konferensi buruh untuk membangun kembali. Barisan tani hendaknya dapat hidup kembali di atas dasar yang sehat dengan pimpinan yang sehat. Gerakan tani pada dasarnya harus memperkuat sendi negara yang lagi berjuang; tidak seperti di masa lalu yang ikut merobohkan negara.²¹⁰

Sebab-sebab gagalnya pemberontakan menurut Jendral Mayor Sungkono (Nopember 1948), antara lain disebabkan :

Karena mereka meninggalkan tujuan baik, bertindak semau-maunya menyalahi Undang-undang; keadilan dan perikemanusiaan; hingga dengan spontan menjadi liar demoralisasi, tidak berdisiplin menurut rencana semula. Mereka merampas harta benda, merampas kekuasaan secara paksa; segala perbuatannya tidak lagi dikemukakan oleh pikiran sehat. Akhirnya tergelincirlah perbuatan mereka itu.²¹¹

Ada yang mengatakan tentang kegagalan pemberontakan Madiun, karena rencana mereka itu kurang teratur dan karena kurang disiplin. Semangat kurang teguh, karena tadinya hanya dipenuhi semboyan-semboyan saja; sehingga ketika mereka berhadapan dengan TNI yang membawa bendera Merah Putih (sedang mereka membawa bendera merah), semangat mereka menjadi buyar, darah nasionalismenya masih mengalir di tubuh mereka ; hingga alat senjata di tangan mereka tidak menolong, lagi pula rakyat tidak mendukung mereka. Ketika kaum pemberontak menduduki Suko-

²¹⁰Kementerian Penerangan Djawatan Republik Indonesia, *Op.cit.*, hal. 292-293.

²¹¹Muhammad Dimijati, *Op.cit.*, hal. 203-204.

harjo dan Wonogiri., kepada penduduk kampung dan desa dikatakan bahwa Republik Yogya sudah menyerah kepada Belanda. Secara paksa mereka membagi-bagikan sawah bengkok selaku permulaan revolusi sosial, tetapi ketika pasukan Siliwangi datang dengan membawa bendera Merah Putih rakyat baru sadar bahwa yang datang itu bukan NICA, pemerintah republik masih tetap berdiri. Dengan demikian rakyat yang dipaksa memihak Madiun, berbalik lagi ke pihak Republik.²¹²

Sedang menurut Aidit salah seorang tokoh PKI, mengatakan bahwa Madiun Affair tidak dimaksud untuk mendirikan pemerintahan Soviet (komunis-pen), yang terang peristiwa itu adalah terror putih dari peristiwa 1926-1927. Peristiwa Madiun itu akan membuat kader lebih hati-hati dan militan.²¹³

Menurut Suripno salah seorang pimpinan PKI juga, mengatakan bahwa kegagalan itu disebabkan karena kurangnya perhitungan terhadap penyokong rencana PKI, terutama terhadap rakyat sekitar Madiun yang terlalu dipercayai. Selanjutnya ia mengemukakan banyak kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, kekurangan organisasi, kurang kuatnya peranan ideologi, serta kurang teraturnya militer. Salah satu kesalahan dari Dewan Justice yang mengadakan penangkapan massal terhadap rakyat Madiun oleh tentara Komunis; jadi sebagai kesimpulan rakyat tidak mendukung gerakan komunis.²¹⁴

Pendapat seorang tokoh komunis lain, tetapi tidak ikut PKI, ialah Rustam Effendi, bekas seorang pemuka CPM (Corps Polisi Militer) yang sudah dipecat antara lain mengatakan :

Kegagalan Madiun itu adalah hasil dari salah satu politik oportunist yang tidak bisa diampuni maupun

²¹²*Ibid*, hal. 203.

²¹³Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat, *Op.cit.*, hal 21.

²¹⁴*Ibid*, hal. 20-21.

ditolerir ditinjau dari kaca mata Revolusi Nasional, ataupun dari sudut Revolusi Internasional, aksi dan tindakan yang dilakukan oleh PKI Amir-Setiadjud (rupanya Rustam Effendi tidak suka menggunakan istilah PKI Musso dan rupanya banyak orang lain yang berpendapat bahwa Puts Madiun digerakan oleh Amir Cs dan FDR dan telah diatur sebelum Musso datang, dan Musso hanya dijadikan pion saja) di Madiun itu merugikan kegiatan progresif kita, merugikan sekali tenaga revolusi, baik yang berada di Indonesia ini, maupun yang berada di lapangan Internasional.

Sekarang banyak alasan-alasan yang dikemukakan orang untuk menutupi kesalahan yang telah diperbuat Madiun itu. Sikap dan pendirian revolusioner tidak boleh takut mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, sebab dengan mengakui kesalahan-kesalahan itu kita dapat mengambil kesimpulan yang jitu. Usaha dan muslihat untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita sendiri, adalah sama sendirinya berbau oportunist.

Digunakan sekarang oleh mereka yang sudah bersalah, alasan-alasan untuk membersihkan diri, seolah-olah kejadian Madiun itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada para pemimpin FDR karena segalanya itu akibat-akibat dari provokasi musuh kita.

Adalagi alasan yang dikemukakan, andaikata peristiwa Madiun itu tidak gagal, tentu kita tidak dipersalahkan orang, *an sich* memang alasan ini betul dan tepat, dan sesungguhnya kita banyak terdapat anasir-anasir reaksioner yang sudah diselundupkan ke kalangan rakyat kita, yang giat memprovoser kejadian yang memang tidak dikehendaki. Begitu pula memang sudah menjadi kelajiman, kebiasaan hidup, kalau kita memang mengalami kegagalan, tentu kita akan diludahi dan diejek umum, dan yang biasanya bersifat dan berhati budak, yang andaikata kita me-

ng, mereka akan mendahului menyembah kita, itulah sekarang yang sangat keras dan gembira dan bersorak sorai, akan tetapi segalanya itu tidak boleh kita jadikan alasan guna menutup-nutupi kesalahan kita sendiri, guna membersihkan diri sendiri. Justru kita tahu bahaya-bahaya yang mengincar kita, karena kita tahu akibat-akibat yang akan terjadi bila tindakan kita gagal, maka oleh sebab itulah kita perlu serta harus kita hati-hati sekali, harus kita lebih teliti dan lebih tanggung jawab dalam menghitung faktor-faktor yang ada, sehingga jangan sampai dorongan sentiment dan provokasi. Bukan musuh yang harus menentukan apa yang kita perbuat, tetapi tenaga kita dan kekuatan kita sendiri.

Banyak yang tidak bersikap tegas, dan cuma meng "amin" dan membuntut saja, sebab ketakutan pada pemimpin-pemimpin sayap kiri, dimana politik sekarang ternyata meleset, maka merekalah yang akan lebih dulu giat melemparkan batu kepada teman-temannya yang salah. Kita tidak ikut menunggangi pencolong yang sudah berbalik.

Tentang kerugian-kerugian, kita tinjau dari sudut nasional yang diakibatkan *avontuur* Madiun itu; sama kita rasai dan alami aksi polisionil kedua, yang lalu KMB tidak perlu terjadi. Perbuatan Madiun adalah perbuatan yang tergopoh-gopoh, perbuatan orang yang takut ketinggalan pasar. Peristiwa Madiun semata-mata menguntungkan kaum imperialis.²¹⁵

Bekas pemimpin komunis Darsono yang sewaktu terjadi pemberontakan PKI Musso masih berada di Nederland., telah memberi komentar pula atas peristiwa Madiun, sewaktu diwawancarai oleh wartawan Rinto Alwi, koresponden dari

²¹⁵Muhammad Dimjati, *Op.cit*, hal. 205-206.

Surat kabar Kedaulatan Rakjat di Nederland,²¹⁶ ia menyalahkan pengikut-pengikut Marxis di sini, membusuk-busukan Soviet Rusia yang katanya sudah meninggalkan pelajaran Marxis dan menjadi negara imperialis. Bahkan ia mengatakan bahwa :

“... Pemberontakan Madiun bukan atas perintah Moskow tetapi hanya kefanatikan kaum FDR/PKI saja. Apa yang dilakukan oleh PKI sekarang ini (maksudnya pemberontakan Madiun-pen) pada hakekatnya ialah merusak dan melemahkan kedudukan Republik. Disengaja atau tidak, aksi Musso itu memperkuat musuh Republik, Musso pada hakekatnya adalah suatu produk dari aksi militer Belanda terhadap Republik pada bulan Juli 1947. sekiranya Musso menang, belum tentu perjuangan PKI sudah selesai, karena blokade ekonomi akan dijalankan terus sesama Negara Kapitalis terhadap Republik Soviet Madiun sekiranya Madiun menang.”²¹⁷

Ada pula yang membuat analisa yang mengatakan bahwa :

Maksud dan tujuan Madiun memang baik dan mulia yaitu hendak membela rakyat yang tertindas yang selama revolusi belum mengecap berkahnya jaman kemerdekaan. Titik berat rencana mereka ialah untuk melaksanakan revolusi sosial, menciptakan keadilan sosial yang sudah lama diidam-idamkan, bahwa mereka mendahulukan membagi-bagikan bengkok, membela tani melarat dan buruh rendah agar dapat

²¹⁶Darsono sudah lama meninggalkan komunisme, lalu menjadi seorang sosialis dan non aktif dalam pergerakan politik. Awal tahun 1950 ia pulang ke Jawa dan banyak menulis dalam Surat Kabar Express di Surabaya, Vid. Muhammad Dimjati, *Op.cit.*, hal. 206-207.

²¹⁷Muhammad Dimjati, *Loc.cit.*

hidup selayaknya dan supaya jangan terus-menerus ditindas oleh kaum feodal dan kaum borjuis Indonesia yang berlindung di belakang pemerintah Republik. Hanya saja maksud mulia itu sayang menjadi gagal karena dikeruhkan oleh organisasi-organisasi jahat yang ikut menyelundup di kalangan FDR, yaitu penjahat-penjahat yang berlindung di belakang revolusi Madiun untuk menjalankan rol kejahatan. Mereka mau menjadi pengikut komunis PKI bukan karena sadar akan ideologi komunis, tetapi hanya mau mencari kekayaan secara gampang, tidak usah bekerja keras, cukup merampas hak milik si kaya yang dikatakan kaum borjuis atau feodal. Jadi mereka itu menggunakan istilah-istilah politik untuk dipakai sebagai perisai untuk menghalalkan yang haram. Penjahat-penjahat semacam ini tidak sedikit, dan bukan hanya terdapat di kalangan penjahat-penjahat bawahan seperti golongan penjahat Magetan yang ditarik masuk ke dalam PKI, tetapi juga di kalangan atasan sedikit terpelajar dan tahu politik, yang ingin hidup mewah dan kaya raya utruk memuaskan hawa nafsunya, mereka itu masuk FDR/PKI tidak semata-mata memperjuangkan ideologi, tetapi ideologi yang baik itu digunakan untuk kepentingan perseorangan sesudah dapat mengumpulkan kekayaan karena adanya kecauan dan pertempuran itu, lalu bersembunyi ke kota lain, menyamar lalu beli rumah, lalu hidup mewah dan kalau ditanya dia mengatakan anti Madiun, anti FDR/PKI dan menyatakan kesetiaannya kepada pemerintah Republik. Sama saja dengan orang-orang yang mengaku Republikein yang mempergunakan kesempatan rame-rame revolusi ini untuk memperkaya diri sendiri. Revolusi Nasional digunakan untuk alat mencari kekayaan dan kemegahan, sonder mengingat nasib rakyat yang diinjak-injak dan dijadikan sebagai landasan. Jadi dari segi ideologis peristiwa Madiun itu

tidak dapat disalahkan, salahnya terletak pada orang-orang yang menggunakan kedok ideologi itu yang menyimpang dari pokok tujuan ; sehingga revolusi sosial Madiun membelok menjadi Puts, menjadi terorisme dan peralgojoan.²¹⁸

Tentang pemberontakan PKI Musso, Semaun mengatakan kepada Mr. Jusuf Wibisono yang sedang mengadakan kunjungan ke Moskow²¹⁹ bahwa :

“... Pemberontakan Madiun bukan instruksi dari Moskow, melainkan rencananya sendiri”. Tentang diri Musso dikatakannya ; “... dia memang orang nakal”. Keterangan Semaun tersebut meragukan, sebab menurut pelajaran komunisme; segala taktik boleh dipakai asal maksudnya tercapai, jika perlu menipu, berdusta. Menurut pendapatnya (Mr. Jusuf Wibisono); “... mungkin karena pemberontakan itu gagal, maka sudah tentu Moskow tidak mau mengakui bahwa pemberontakan itu atas perintahnya. Mungkin keterangan Semaun tersebut karena mendapat petunjuk dari pimpinan komunis Moskow; bahwa pemberontakan Musso itu atas tanggungjawabnya sendiri dan sekali-kali bukan atas anjuran atau dorongan dari Kremlin.²²⁰

²¹⁸*Ibid*, hal. 204-205.

²¹⁹Sesudah Pemberontakan Madiun Semaun menetap di Moskow.

²²⁰Mr. Jusuf Wibisono, Tjatatatan p erdjalanan ke Moskow, Malah *Mimbar Indonesia* tahun V No. 47, tanggal 25 No pember 1950, Penerbit Yayasan Dharma, hal.25.

BAB V

KESIMPULAN

Dari isi dokumen yang didapat sesudah pemberontakan PKI Musso; PKI sudah merencanakan mangadakan pemberontakan, jauh sebelum Musso datang kembali ke Indonesia. Untuk maksud tersebut kaum komunis Indonesia telah mempengaruhi Angkatan Perang., sasaran utama ialah menimbulkan sentimen yang ada dalam tubuh Angkatan perang. Sedang keadaan ekonomi yang memburuk dijadikan alat untuk menghasut rakyat, rencana pemerintah untuk mengadakan rasionalisasi ditentang dan dijadikan alasan untuk menjatuhkan pemerintah. Pasukan yang telah dapat dipengaruhi kemudian dipindahkan dari medan pertempuran, ke daerah-daerah yang akan dijadikan basis pertahanan komunis. Di tiap-tiap Kementerian atau Jawatan paling sedikit harus ada 2/3 pegawai kaum FDR, agar kelak tiba saatnya berontak Kementerian atau Jawatan tersebut akan mudah jatuh ke tangan mereka.²²¹

Pemberontakan PKI Musso mengalami kegagalan, karena pemimpin-pemimpin komunis seperti Musso, Sumarsono, Amir Sjarifuddin dan lain-lain tidak mempelajari pola berpikir, pandangan hidup dan struktur sosial bangsa Indo-

²²¹Muhammad Dimjati, *Sedjarah Perdjuaan Indonesia*, Penerbit Widjaja, Jakarta, 1951, hal, 202.

nesia yang memang sudah sejak lama merupakan masyarakat yang memiliki bermacam-macam paham, pandangan hidup dan struktur sosial. Juga mereka telah salah perhitungan dalam menganalisa dan menilai situasi politik di Indonesia pada waktu itu. FDR/PKI menganggap bahwa kaum buruh dan tani yang merupakan kelompok terbesar masyarakat Indonesia adalah merupakan pendukung-pendukungnya, karena FDR/PKI memperjuangkan nasib buruh dan tani.

Kekuatan politik sebelum terjadinya pemberontakan pun seharusnya sudah dapat dijadikan bahan analisa tentang kekuatan lawan dan kekuatan PKI sendiri, sampai dimana sebenarnya kemampuannya.²²² Tetapi para pemimpin PKI tidak mau tahu (atau memang tidak tahu), mereka terlalu berambisi memperjuangkan garis politiknya sehingga tidak lagi memikirkan situasi negara yang masih dalam keadaan bahaya karena ancaman dari pihak Belanda masih mengintai. Ditambah lagi terdapatnya perbedaan pendapat diantara pimpinan PKI, baik antara pimpinan politik dengan pimpinan politik maupun antara pimpinan politik dengan pimpinan militer. Tidak semua setuju dengan rencana pemberontakan tersebut, mengingat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan. Diantara kedua tokoh yang berekecimpung dalam bidang politik seperti Musso dan Amir Sjarifuddin, dengan Kolonel Sumarsono yang berekecimpung dalam bidang militer belum terdapat persesuaian paham. Musso yang mengetahui (dianggap mengetahui) secara mendalam tentang soal-soal politik dan gerakan massa cenderung untuk menunda program oposisinya dengan jalan yang non parlementer tersebut,

²²²Waktu itu dalam negara RI terdapat tiga golongan yang merupakan dua kekuatan; yakni golongan pemerintah, golongan pendukung pemerintah dan golongan oposisi (FDR/PKI). Golongan pemerintah sebagian besar dari partai-partai Islam dan Partai Nasional Indonesia (PNI), sedangkan Golongan Pendukung Pemerintah antara lain GRR, BPR dan Barisan Bantengnya dan Pengikut-pengikut Partai Sosialis Tan Malaka. Sehingga kekuatan pemerintah semakin besar bila dibanding dengan Golongan Oposisi (FDR/PKI).

maka tokoh-tokoh militer menganggap saatnya untuk berontak telah tiba. Mungkin Kolonel Sumarsono sebagai seorang yang bertanggung jawab tentang teknis militer tidak begitu saja menerima dan tunduk saja pada orang-orang sipil meskipun menurut perhitungan politis tidak bisa dibenarkan. Mereka harus menempatkan ideologi dan sumpah partai di atas kekuasaan militernya, bahkan di atas kepentingan negara dan bangsa.²²³

Adanya perbedaan pendapat diantara pimpinan-pimpinan FDR/PKI mengakibatkan pemberontakan PKI Musso di Madiun yang direncanakan akan diadakan bulan Nopember 1948, tetapi karena kurang pengendalian sehingga cepat meletus.²²⁴ dan mengalami kegagalan. Kegagalan ini menurut Aidit; karena mereka tidak mengambil kesempatan baik sejak Kemerdekaan Indonesia dengan mempengaruhi tenaga-tenaga bersenjata, bahwa masa antara 1945-1948 mereka telah bekerja untuk pembangunan partai dan memimpin revolusi tidak intensif. Kekurangan dan keterlambatan dalam mempengaruhi tenaga bersenjata itu telah mengakibatkan lambatnya pembangunan partai, hal ini terbukti bahwa perintang dari gerakan komunis adalah kekuatan bersenjata.²²⁵

Atas jasa-jasanya dalam melakukan pembersihan terhadap pengaruh-pengaruh pemberontakan PKI Musso di daerah masing-masing, kepada Kesatuan Mobrig Karesidenan Malang dan Kediri telah diberi tanda penghargaan pada tanggal 4 Agustus 1949 yang diberikan oleh Panglima Besar Sudirman. Tanda penghargaan tersebut telah diserahkan dengan perantaraan Komandan Mobrig Jawa Timur Moh. Jasin.²²⁶

²²³Makmun Salis, *Komunisme dan Kegiatannya di Indonesia*, Dinas Sedjarah Militer Angkatan Darat, Bandung, 1972, hal.97.

²²⁴Nugroho Notosusanto, *Sedjarah Hankam*, Cetakan I, Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Hankam, 1968, hal.80.

²²⁵ Dinas Sedjarah Militer Angkatan Darat, *Kontra Revolusi Gestapu PKI*, Bandung, 1966, hal. 15.

²²⁶Inspektur Jendral Polisi Memet Tanumihardja SH, *Sedjarah Perkembangan*

Dengan terjadinya Pemberontakan Madiun, maka secara nyata telah terjadi pula Rasionalisasi dan Rekonstruksi TNI dalam arti mental dan fisik. Pemberontakan di Madiun telah mempersatukan segala potensi yang masih ada menjadi satu kebulatan tenaga yang lebih kompak, seolah-olah terjadi suatu operasi yang berbahaya akan tetapi dapat menyembuhkan penyakit yang berat. Pemerintah dapat mengakhiri segala macam dualisme dalam negara RI yang ada pada waktu itu.²²⁷

Dalam penumpasan pemberontakan PKI Musso di Madiun, pemerintah RI mempergunakan pasukan yang sebenarnya adalah kesatuan cadangan yang dipersiapkan untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda, bila Belanda menyerang. Amunisi yang sedikitnya untuk pertahanan, telah dipergunakan untuk menghancurkan kaum pemberontak, sehingga banyak senjata yang rusak dan hilang ; persediaan sangat berkurang.²²⁸

Segi-segi yang menguntungkan dari penumpasan Pemberontakan PKI Musso di Madiun ialah :²²⁹

1. Dunia internasional telah menyaksikan mendalamnya rasa demokrasi di antara rakyat Indonesia.
2. Belanda tidak lagi memakai alasan “momok komunisme” untuk menakut-nakuti dunia internasional, supaya simpati terhadap revolusi bangsa Indonesia lenyap.

Angkatan kepolisisan, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, 1971, hal. 56.

²²⁷Jendral A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*, Jilid II, Seruling Massa, Jakarta, 1971, hal 240.

²²⁸Yayasan Penerbit Diponegoro, *Sedjarah TNI Angkatan Darat Ko dam VII/Diponegoro, Sirnaning Jaks o Katon Gapuraning Ratu*, Semarang, 1968, hal. 152.

²²⁹Djawatan Penerangan Prop. Djawa Tengah, *Republik Indonesia Prop. Djawa Tengah*, Semarang, 1952, hal. 47.

Kekhilafan Pemerintah RI waktu itu ialah tidak segera mengambil tindakan tegas membubarkan organisasi politik PKI, sehingga terjadi Pemberontakan G.30 S/PKI tahun 1965. secara organisatoris PKI memang sudah dibubarkan, namun keputusan tertulis tidak pernah diumumkan. Jendral Nasution dalam suatu wawancara dengan team dari Dinas Sedjarah Militer Angkatan Darat antara lain mengatakan : “... mengenai rencana operasi saya yang menyusun, tetapi kalau tak salah ada kata-kata pembubaran, tetapi bagaimana kalimatnya saya sendiri sudah tidak ingat”. Memang sebenarnya Pemerintah RI-pun telah merencanakan untuk menuntut secara hukum yang berlaku bagi mereka yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam Pemberontakan PKI Musso di Madiun. Akan tetapi rencana itu terkatung-katung karena beberapa minggu kemudian Belanda telah melancarkan Agresi Militernya yang kedua. Dengan terjadinya Agresi Militer Belanda tersebut seolah-olah Pemberontakan PKI di Madiun dianggap selesai, sehingga dengan adanya kekhilafan pemerintah tersebut operasi-operasi pembersihan dan penangkapan-penangkapan terhadap tokoh-tokoh FDR/PKI tidak lebih dari tindakan yang bersifat preventif agar supaya pemberontakan dapat dilokalisir. Sekalipun secara militer pemberontakan PKI Musso di Madiun dapat dilumpuhkan sama sekali, tetapi secara ideologi tidak.²³⁰

Menurut Pangdam II/Pepelrada Sumatera Utara Brig.Jen P. Sobirin berpendapat :

Bahwa timbulnya pemberontakan PKI kedua tanggal 30 September adalah akibat tidak berhasilnya penumpasan oknum-oknum PKI waktu mereka mengkhianati pada Peristiwa madiun 18 September 1948 yang lalu. Tokoh-tokoh pemberontakan Madiun yang kini mengulangi kejahatannya yakni D.N.Aidit, M.H.Lukman,

²³⁰Makmun Salis, *Op.cit.*, hal. 141.

Sudisman, Nyoto dan lain-lain.²³¹

Untuk menghormati para pahlawan yang telah gugur akibat kejahatan Pemberontakan PKI Musso di Madiun, maka telah dibangun Monumen R.M.T.A Soerjo Gubernur Pertama Jawa Timur yang dibuat oleh Sanggar Anomsari Surabaya pimpinan Anwar. Monumen tersebut terdiri dari 3 patung, masing-masing R.M.T.A Soerjo berada di bagian paling depan, berpakaian adat dengan tangannya menunjuk, di belakang terdapat dua patung, masing-masing Kompol Tingkat I Soeroko (kanan) dari Kepolisian Bojonegoro dan Komisariss Besar Polisi M.Durjat, Kepala Polisi Jawa Timur (kiri). Tinggi patung 4 meter dan pada pondasinya terdapat relief, berat patung masing-masing 4 ton terbuat dari beton penuh. Monumen didirikan di atas tanah Perhutani Ngawi, di hutan Bogo Kecamatan Kedunggalar Madiun. Diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1975.²³²

²³¹ *Berita Yudha*, tanggal 6 Djanuari 1966, No. 326, Tahun I, hal.1.

²³² Surat Kabar *Sinar Harapan*, tanggal 10 Oktober 1975 TH.X I, No. 4617, hal.II.

DAFTAR SUMBER

BUKU :

- Amidjaja, Rosad, Suatu Tindjauan Historis Tentang Adanya Gagasan Persetudjuan Linggardjati Sebagai Alternatif Pemerintah Republik Indonesia Dalam Usahanya Berjuang Di Bidang Diplomas, Seminar Sedjarah Nasional II Tanggal 26-29 Oktober 1970 di Yogyakarta.
- Brackman, Arnold C *Indonesian Comunism*, Third Printing A Praeger Publisher, New York, 1963,
- Dimjati, Muhammad *Sedjarah Perdjuangan Indonesia*, Penerbit Widjaja, Jakarta, 1951
- Dinas Sedjarah Militer TNI-AL, *Sejarah Tentara Nasinal Indonesia Angkatan Laut* (Periode Perang Kemerdekaan) 1945-1950, 1973.
- Djamhari, Drs. Saleh A, *Markas Besar Komando Djawa .1948-1949*, Lembaga Sejarah Hankam, Jakarta, 1967.
- Djawatan Penerangan Propinsi Djawa Tengah, *Republik Indonesia Propinsi Djawa Tengah*, Semarang, 1952
- Hatta, Muhammad, *Kumpulan Karanga*, Penerbit dan Balai Buku Indonesia, Jakarta-Amsterdam-Surabaya, 1953.
- _____, *Rasionalisasi, Tintamas*, Cetakan II, Jakarta, 1951.
- Harahap, E.St., *Pantja Zaman*, diterbitkan oleh Bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan Departemen PP dan K, Jakarta, 1959.
- Hardjono, Abito Martono, *Dokumentasi Perdjuangan Pemuda Indonesia 1915-1950*, Toko Buku Islamiah, Cetakan I, Medan, 1950.

- Jusuf, Sudono, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, 1971.
- Kementerian Penerangan Djawatan Radio Republik Indonesia, *Sedjarah Radio Indonesia*, 1953.
- _____, *Detik Dan Peristiwa 17 Agustus 1945 – 23 Januari 1950*, Yogyakarta, 1950.
- _____, *Lukisan Revolusi Indonesia 1945-1949*, Yogyakarta, 1949.
- _____, *Kepartaian Dan Parlemnteria Indonesia*, Jakarta, 1954.
- _____, *Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, 1953.
- Kusumasumantri SH., Prof. Iwa, *Sedjarah Revolusi Indonesia Masa Perjuangan Sebagai Perintis Revolusi*, Jilid I, Grafika, Jakarta, 1963.
- _____, *Sedjarah Revolusi Indonesia, Masa Revolusi Bersenjata*, Jilid II, Grafika, Jakarta, Tidak Bertahun.
- Kahin, George Mc Turnan, *Nationalism And Revolution In Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca-London, 1970.
- Marboen, Drs. Moela, *Gerakan Operasi Militer I Untuk Menumpas Pemberontakan Madiun*, Mega Book Store, Jakarta, 1965.
- Nasution, A.H. *Tentara Nasional Indonesia*, Jilid I, Cetakan II, Ganaco, Bandung, 1963.
- _____, *Tentara Nasional Indonesia*, Jilid II, Seruling Masa, Jakarta, 1971
- _____, *Pokok-Pokok Gerilya*, Cetakan III, Copyright PT. Pambimbing Masa. Percetakan Perdana, Jakarta, 1964.

- _____, *Sedjarah Perjuangan Nasional Dibidang Bersenjata*, Mega Book Store, Jakarta, 1966.
- _____, *Menuju Tentara Rakjat*, Yayasan Penerbit Minang, Jakarta, 1963.
- Notosusanto, Nugroho, *Sedjarah Dan Hankam*, Cetakan I, Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Sedjarah Hankam, Jakarta, 1968.
- _____, *Markas Besar Komando Djawa*, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, 1973.
- Panitya Penjusun Buku Peringatan 2 Tahun DPRD Sementara Kota Besar Surakarta, *Kenang-Kenangan Kota Besar Surakarta 1945-1953*, Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, 1953.
- Panitya Sewindu Divisi Diponegoro, *Lintasan Sedjarah Terbentuknya Divisi Diponegoro*, Percetakan DADT & T Diponegoro, Semarang, 1958.
- Pinardi, *Peristiwa Madiun 1948*, Inkopak - Hazera, Jakarta, 1967.
- Pringgodigdo, Mr. A.K., *Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Pustaka Rakjat N.V. Jakarta, 1950.
- Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat, *Kontra Revolusi Gastepu PKI*, Bandung, 1966.
- _____, *Peranan TNI Angkatan Darat Dalam Perang Kemerdekaan* (Revolusi Phisik 1945-1950), Bandung, 1965.
- _____, *Sejarah TNI Angkatan Darat 1945-1965*, Cetakan I, Bandung, 1965.
- Salim, Makmun, *Komunisme dan Kegiatannya di Indonesia*, Dinas Sejarah Militer Angkatan Darat, Bandung, 1972, (belum terbit).
- Sedjarah Militer Kodam VIII/Brawijaja*, Paragon, Malang, (tidak ada tahun terbit)

Slametmuljana, Prof. Dr., *Nasionalisme Sebagai Modal Pedjuangan Bangsa Indonesia*, Jilid II, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1969

Soepeno, *Kamus Populer*, Penerbit Ksatria, Surabaya, 1955.

Soewargana, Oejoeng, Nugroho Notosusanto, *Rentjana Pelajaran Terurai Tentang Komunisme*, 1967, tidak ada penerbit dan tempat terbit.

Sutomo, *Kemana Bekas Pedjuang Bersendjata*, Balapan, Jakarta, 1952.

Sukarno, Ir. *Dibawah Bendera Revolusi*, Jilid I, Cetakan II, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1963.

Suryadi, Didi, sebuah Study Sedjatah Sekitar Lahirnya Divisi Siliwangi Pada Tanggal 20 Mei 1946, Seminar Sedjarah Nasional II Tanggal 26-29 Agustus 1970 di Yogyakarta.

Tjokrosisworo, Sudarjo, *Sedjarah Kilat Pergerakan Kemerdekaan Indonesia 20 Mei 1908-1948*, Penerbit Kementerian Penerangan Propinsi Djawa Tengah, Solo, 1948.

Tirtoprodjo, SH., Drs. Susanto, *Sedjarah Pergerakan Nasional Indonesia*, PT Pembangunan, Jakarta, Cratakan IV, 1970.

Tanumiharja, SH., Inspektur Djendral Polisi Memet, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI, 1971.

Yayasan Penerbit Diponegoro, *Sedjarah TNI-AD Kodam VII/Diponegoro, Sirnaning Jakso Katon Gapuraning Ratu*, Semarang, 1968.

DOKUMEN, MAJALAH DAN SURAT KABAR

Dokumen Semdam VII/Diponegoro, A No. 7 p (28), Surat Kabar

Suara Merdeka, tanggal 15 September 1948.

_____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Suara Merdeka*, tanggal 20 Nopember 1948.

_____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Suara Merdeka*, tanggal 23 Nopember 1948.

_____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Suara Merdeka*, tanggal 24 Nopember 1948.

_____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Suara Merdeka*, tanggal 25 Nopember 1948.

_____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Suara Merdeka*, tanggal 26 Nopember 1948.

_____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 20 Maret 1948.

_____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 23 Maret 1948.

_____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 30 Maret 1948.

_____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 5 Mei 1948.

_____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 14 Mei 1948.

_____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 2 Juni 1948.

_____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 1 Juli 1948.

_____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 18 Agustus 1948.

- _____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 10 September 1948.
- _____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 13 September 1948.
- _____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 15 September 1948.
- _____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 20 September 1948.
- _____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 23 September 1948.
- _____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 28 September 1948.
- _____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 29 September 1948.
- _____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 30 September 1948.
- _____, A No. 7 p (28), Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, tanggal 1 Oktober 1948.
- _____, A No. 24 B (10).

Dokumen Semdam VII/Diponegoro, No. 6 B (10) II, hasil wawancara kedua dengan Letkol Purnawirawan Soemarto Kusumodirdjo, Tanggal 30 Agustus 1967 oleh Team Sejarah Kodam VII/Diponegoro.

_____, No. 10 B (10) II, hasil wawancara kedua dengan Mayor Purnawirawan Hadi Koesoemo, Tanggal 20 Agustus 1967 oleh Team Sejarah Kodam VII/Diponegoro.

_____, No. 6 B (10) II, hasil wawancara kedua dengan Kapten

Purnawirawan M.A. Djamino, Tanggal 29 Agustus 1967 oleh Team Sejarah Kodam VII/Diponegoro.

_____, No. 7 B (10) II, hasil wawancara kedua dengan Brigjen Widodo, Tanggal 4 September 1967 oleh Team Sejarah Kodam VII/Diponegoro.

_____, No. 8 B (10) II, hasil wawancara kedua dengan Kolonel Purnawirawan Soerjosukanto, Tanggal 23 September 1967 oleh Team Sejarah Kodam VII/Diponegoro.

_____, No. 18 B (10), Sedjarah Tentara Kita.

_____, No. 18 B (10) II, Sedjarah TNI Periode II Tahun 1948-1950, disusun oleh Sem Menif 15.

Lettu Drs. L. Arif Budhiman, Analisa Bandingan Pemberontakan Madiun dan Pemberontakan G 30 S/PKI:
Vidya Yudha No. 5 Th.ke II/1969, Ke I
Vidya Yudha No. 6 Th.ke II/1969, Ke II
Vidya Yudha No. 7 Th.ke II/1969, Ke III
 Pusat Sedjarah Militer Angkatan Darat, Bandung.

Madjalah *Kurir*, No. 4, tgl. 3 Nopember 1949, Pencetak Sinar Asia, Yogyakarta, hal. 4.

Mr. Jusuf Wibisono, Tjataan Perdjalanana Ke Moskow (XVIII), Majalah *Mimbar Indonesia* Th. Ke V No. 47, tanggal 25 Nopember 1950, Penerbit Yayasan Dharma, hal. 4.

Surat Kabar *Sinar Harapan*, Jum'at 10 Oktober 1975, Tahun XV, No. 4617, hal. II.

Surat Kabar *Berita Yudha*, Oktober 1966, No. 326, Tahun I. hal. I.

Harian *Kompas*, tanggal 24 April 1976, No. 254, Th. Ke-XI, hal.I.

LAMPIRAN I

MAKLUMAT PEMERINTAH

PARTAI POLITIK. Anjuran Pemerintah tentang pembentukan partai politik

Berhubung dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada Pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai politik hendaknya mempe rkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu bahwa:

- 3 Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik itulah dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
- 4 Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggauta Badan Perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.

Jakarta, 3 November 1945
WAKIL PRESIDEN
MOHAMMAD HATTA

LAMPIRAN II

SUSUNAN KABINET RI KE ENAM

(Kabinet Presidentil).

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Perdana Menteri | : Drs. Moh. Hatta |
| 2. Meteri Pertahanan | : Drs. Moh. Hatta |
| 3. Meteri Dalam Negeri | : Haji Agus Salim |
| 4. Meteri Luar Negeri | : Dr. Dukiman Wirjosandjojo |
| 5. Meteri Penerangan | : Moh. Natsir |
| 6. Meteri Keuangan | : Mr. A.A. Maramis |
| 7. Meteri Perhubungan | : Ir. DJuanda |
| 8. Meteri Kesehatan | : Dr. Leimena |
| 9. Meteri Perburuhan/Sosial | : Kusman |
| 10. Meteri Kehakiman | : Mr. Susanto Tirtoprodjo |
| 11. Meteri P.P. dan K | : Mr. Ali Sastroamidjojo |
| 12. Meteri Pekerjaan Umum | : Mr. Laoh |
| 13. Meteri Kemakmuran | : Mr. Sjafruddin Prawiranegara |
| 14. Meteri Dist. Makanan | : I. Kasimo |
| 15. Meteri Agama | : K.H. Maskur |
| 16. Meteri Negara Koordinator Untuk Keamanan | : st. Hamengkubuwono IX |
| 17. Meteri Pembangunan dan Urusan Pemuda | : Supeno |